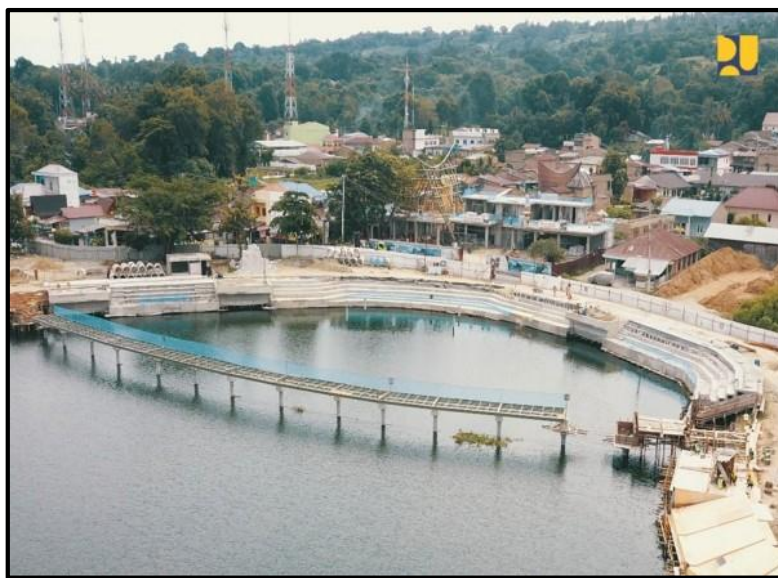


RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025 – 2045



**PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR**

2023 | BAPPEDALITBANG KAB. SAMOSIR

KATA PENGANTAR

Rencana Pemerintah Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta dalam rangka upaya mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah maka diinstruksikan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif dan bottom-up, (3) Pendekatan Top-Down dan (4) Pendekatan Politis, sehingga memperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mengedepankan aspek sinkronisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen ini dapat dijadikan pedoman perencanaan selama periode 20 tahun dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.

Akhirnya atas perhatian dan masukannya, kami ucapkan terima kasih.

Pangururan, Desember 2023
Bupati Samosir

Vandiko Timoteus Gultom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD	I - 3
1.4 Maksud Dan Tujuan	I - 4
1.5 Sistematika Penulisan.....	I - 5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 6
2.1 Refleksi Pembangunan Kabupaten Samosir	II - 6
2.2 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Samosir	II - 9
2.2.1 Karakteristik lokasi dan wilayah	II - 9
2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II - 15
2.2.3 Wilayah Rawan Bencana	II - 24
2.2.4 Aspek Demografi	II - 25
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 26
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 26
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II - 31
2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II - 34
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II - 35
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II - 35
2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II - 36
2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 37
2.4.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi	II - 38
2.5 Aspek Pelayanan Umum.....	II - 43
2.5.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib.....	II - 43
2.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non - Pelayanan Dasar ...	II - 54
2.5.3 Fokus Layanan Pemerintahan Urusan Pilihan.....	II - 76
2.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	II - 83
2.6.1 Kondisi Umum Capaian TPB (KLHS RPJMD)	II - 84
2.6.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial	II - 85
2.6.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi	II - 86
2.6.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup	II - 86
2.6.5 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	II - 86
2.7 Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya	II - 87
2.7.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	II - 87
2.7.2 Penelaahan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045	II - 93
2.7.3 Penelaahan RPJPD dengan Kabupaten Tetangga	II - 93
BAB III TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.....	III - 96

3.1 Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk.....	III - 96
3.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk.....	III - 96
3.1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	III - 98
3.2 Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Penduduk	III - 99
3.2.1 Rumah/Tempat Tinggal.....	III - 99
3.2.2 Air Bersih dan Sanitasi.....	III - 100
3.2.3 Energi/Listrik	III - 100
3.2.4 Persampahan.....	III - 101
3.2.5 Sarana Kesehatan	III - 101
3.2.6 Sarana Pendidikan.....	III - 102
BAB IV PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	IV - 104
4.1 Rencana Struktur Ruang.....	IV - 104
4.1.1 Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Samosir	IV - 104
4.1.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.....	IV - 105
4.2 Rencana Pola Ruang	IV - 115
4.2.1 Rencana Kawasan Lindung.....	IV - 115
4.2.2 Rencana Kawasan Budidaya.....	IV - 118
4.3 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	IV - 124
4.4 Arah Pemanfaatan Ruang	IV - 126
4.5 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045.....	IV - 127
BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	V - 146
5.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Samosir	V - 146
5.1.1 Permasalahan berdasarkan Indikator Makro.....	V - 146
5.1.2 Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar	V - 149
5.1.3 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	V - 152
5.1.4 Urusan Pilihan.....	V - 160
5.1.5 Urusan Perangkat Penunjang	V - 162
5.2 Isu Strategis	V - 165
5.2.1 Isu Strategis Internasional.....	V - 165
5.2.2 Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara	V - 165
5.2.3 Isu Strategis Kabupaten Samosir.....	V - 167
BAB VI VISI DAN MISI DAERAH.....	VI - 169
6.1 Visi.....	VI - 169
6.2 Misi.....	VI - 170
BAB VII ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	VII - 175
7.1 Arah Kebijakan Daerah	VII - 175
7.2 Pentahapan Pembangunan	VII - 176
7.2.1 Periode I (2025 - 2029)	VII - 176
7.2.2 Periode II (2030 - 2034)	VII - 177
7.2.3 Periode III (2035 - 2039)	VII - 178
7.2.4 Periode IV (2040 - 2045).....	VII - 180
7.3 Sasaran Pokok Daerah.....	VII - 182
7.3.1 Penyesuaian Target Sasaran Pokok dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	VII - 190
BAB VIII PENUTUP	VIII - 191

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2005 dan 2022.....	II – 7
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan.....	II – 11
Tabel 2.3.	Persentase ketinggian lahan di Kabupaten Samosir.....	II – 11
Tabel 2.4.	Persentase kemiringan lahan di Kabupaten Samosir.....	II – 11
Tabel 2.5.	Luas Sub DAS yang ada di Pulau Samosir.....	II – 13
Tabel 2.6.	Data curah hujan Kabupaten Samosir tahun 2015 - 2022.....	II – 14
Tabel 2.7.	Luas kawasan lindung dalam rencana pola ruang.....	II – 15
Tabel 2.8.	Luas kawasan budidaya dalam rencana pola ruang.....	II – 15
Tabel 2.9.	Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering Per Kecamatan di Kabupaten Samosir.....	II – 17
Tabel 2.10.	Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Samosir.....	II – 17
Tabel 2.11.	Luas Tanam dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Samosir.....	II – 18
Tabel 2.12.	Potensi Unggulan Pertanian Hortikultura per Kecamatan di Kabupaten Samosir Tahun 2022.....	II – 18
Tabel 2.13.	Komoditas Peternakan dan Unggas Kabupaten Samosir.....	II – 18
Tabel 2.14.	Luas Tanam dan Produksi Perkebunan Kabupaten Samosir Tahun 2022.....	II – 19
Tabel 2.15.	Potensi Luas Tanam Unggulan Perkebunan di Kabupaten Samosir tahun 2022.....	II – 19
Tabel 2.16.	Produksi Perikanan Kabupaten Samosir tahun 2015 - 2022.....	II – 20
Tabel 2.17.	Produksi Perikanan di Kecamatan Kabupaten Samosir Tahun 2022.....	II – 20
Tabel 2.18.	Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah Kabupaten Samosir.....	II – 20
Tabel 2.19.	Objek Wisata Alam Kabupaten Samosir.....	II – 22
Tabel 2.20.	Objek Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Samosir.....	II – 23
Tabel 2.21.	Objek Wisata Rohani Kabupaten Samosir.....	II – 23
Tabel 2.22.	Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samosir (Ha).....	II – 25
Tabel 2.23.	Banyaknya Gempa Bumi yang dirasakan di Kabupaten Samosir.....	II – 26
Tabel 2.24.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 27
Tabel 2.25.	PDRB Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Konstan (ADHK-2000) Tahun 2015-2022 (Jutaan Rp.).....	II – 28
Tabel 2.26.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2022 (Milyar Rp.).....	II – 28
Tabel 2.27.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2022.....	II – 30
Tabel 2.28.	Gini Ratio (Ketimpangan) Tahun 2015-2022.....	II – 31
Tabel 2.29.	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2021.....	II – 31
Tabel 2.30.	Penduduk Miskin Ekstrim Tahun 2021 dan 2022.....	II – 32
Tabel 2.31.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2022.....	II – 32
Tabel 2.32.	Rasio Murid-Guru di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 34
Tabel 2.33.	Komponen IPM Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 34
Tabel 2.34.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Samosir.....	II – 34
Tabel 2.35.	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Samosir.....	II – 35
Tabel 2.36.	Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 36

Tabel 2.37.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022.....	II – 37
Tabel 2.38.	Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2022.....	II – 37
Tabel 2.39.	Angkatan Kerja Kabupaten Samosir dengan jenis Pendidikan Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2022	II – 37
Tabel 2.40.	Beban Rasio Tanggungan Penduduk Tahun 2015-2022	II – 38
Tabel 2.41.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Samosir 2016-2022.....	II – 38
Tabel 2.42.	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Samosir 2015-2022	II – 40
Tabel 2.43.	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir Tahun 2016-2022.....	II – 42
Tabel 2.44.	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 44
Tabel 2.45.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 45
Tabel 2.46.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 45
Tabel 2.47.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 45
Tabel 2.48.	Rasio guru dan murid serta rasio sekolah dengan murid.....	II – 46
Tabel 2.49.	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 47
Tabel 2.50.	Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 47
Tabel 2.51.	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 48
Tabel 2.52.	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 48
Tabel 2.53.	Rasio Tenaga Medis/Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2022	II – 48
Tabel 2.54.	Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, Jumlah Persalinan Medis dan Non Medis Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 49
Tabel 2.55.	Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 49
Tabel 2.56.	Panjang jalan kondisi baik di Kabupaten Samosir tahun 2022	II – 50
Tabel 2.57.	Kondisi jembatan di Kabupaten Samosir tahun 2022	II – 50
Tabel 2.58.	Kondisi jaringan irigasi Kabupaten Samosir tahun 2022	II – 51
Tabel 2.59.	Jumlah bangunan ber-IMB Kabupaten Samosir tahun 2015 - 2022	II – 51
Tabel 2.60.	Jumlah RTLH yang ditangani Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022.....	II – 52
Tabel 2.61.	Persentase pengguna air bersih dan sanitasi Kabupaten Samosir tahun 2016 - 2022	II – 52
Tabel 2.62.	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 53
Tabel 2.63.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 54
Tabel 2.64.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 54
Tabel 2.65.	Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 55
Tabel 2.66.	Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022 (Jiwa)	II – 55
Tabel 2.67.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2022.....	II – 56
Tabel 2.68.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2015-2022	II – 56

Tabel 2.69.	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja menurut Pendidikan tahun 2015-2022	II – 56
Tabel 2.70.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022.....	II – 57
Tabel 2.71.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Samosir Menurut Golongan Umur Tahun 2015 – 2022	II – 57
Tabel 2.72.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Samosir Menurut Pendidikan Tahun 2015 – 2022	II – 57
Tabel 2.73.	Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022.....	II – 59
Tabel 2.74.	Jumlah penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022.....	II – 59
Tabel 2.75.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022.....	II – 60
Tabel 2.76.	Pencapaian Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 61
Tabel 2.77.	Pola Pangan Harapan Kabupaten Samosir tahun 2017 - 2022	II – 62
Tabel 2.78.	Persentase volume sampah yang tertangani di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 62
Tabel 2.79.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk	II – 63
Tabel 2.80.	Pengujian air dan udara di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 63
Tabel 2.81.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Samosir tahun 2015-2022	II – 64
Tabel 2.82.	Rasio penduduk ber-KK per satuan penduduk di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 64
Tabel 2.83.	Rasio cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 64
Tabel 2.84.	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 65
Tabel 2.85.	Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 65
Tabel 2.86.	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 66
Tabel 2.87.	Rasio Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 66
Tabel 2.88.	Jumlah uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Samosir tahun 2016 – 2019.....	II – 67
Tabel 2.89.	Jumlah angkutan darat di Kabupaten Samosir 2015-2022	II – 67
Tabel 2.90.	Trayek/ Rute Kapal Kayu di Kabupaten Samosir 2023.....	II – 68
Tabel 2.91.	Jumlah angkutan danau di Kabupaten Samosir 2015-2022.....	II – 68
Tabel 2.92.	Jumlah dermaga di Kabupaten Samosir 2015-2022	II – 68
Tabel 2.93.	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022	II – 68
Tabel 2.94.	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022	II – 69
Tabel 2.95.	Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 70
Tabel 2.96.	Jumlah Pelaku UKM dan Koperasi di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II – 70
Tabel 2.97.	Jumlah BPR / LKM Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022	II – 71
Tabel 2.98.	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022 (juta rupiah).....	II – 71
Tabel 2.99.	Jumlah omzet simpanan masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022	II – 71
Tabel 2.100.	Jumlah investor PMA dan PMDN Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022	II – 72

Tabel 2.101.	Jumlah investor PMA dan PMDN Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022.....	II – 72
Tabel 2.102.	Jumlah organisasi kepemudaan Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022.....	II – 72
Tabel 2.103.	Cabang olahraga yang berprestasi di Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2022.....	II – 73
Tabel 2.104.	Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 74
Tabel 2.105.	Benda Cagar Budaya yang dilestarikan.....	II – 74
Tabel 2.106.	Situs Cagar Budaya yang dilestarikan.....	II – 74
Tabel 2.107.	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kabupaten Samosir tahun 2015-2022.....	II – 75
Tabel 2.108.	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 75
Tabel 2.109.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Samosir	II – 76
Tabel 2.110.	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 77
Tabel 2.111.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2019-2022	II – 77
Tabel 2.112.	Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Samosir tahun 2015-2022	II – 78
Tabel 2.113.	Banyaknya Kunjungan Wisatawan Asing (Wisman) dan Nusantara (Wisnus) ke Kabupaten Samosir menurut bulan (kali)	II – 79
Tabel 2.114.	Jenis sarana dan prasarana Pariwisata Kabupaten Samosir Tahun 2015 2022	II – 79
Tabel 2.115.	Indikator Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022.....	II – 80
Tabel 2.116.	Indikator Peternakan Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022	II – 82
Tabel 2.117.	Panjang jaringan listrik PT.PLN (Persero) menurut jenis jaringan di Kabupaten Samosir	II – 82
Tabel 2.118.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 83
Tabel 2.119.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022.....	II – 83
Tabel 2.120.	Pelaku Industri Rumah Tangga Kabupaten Samosir Tahun 2020	II – 84
Tabel 2.121.	Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Samosir.....	II – 86
Tabel 2.122.	Identifikasi RPJP Kabupaten se-Kawasan Danau Toba	II – 94
Tabel 3.1.	Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Samosir	III – 97
Tabel 3.2.	Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan jenis kelamin	III – 98
Tabel 3.3.	Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan kelompok umur	III – 98
Tabel 3.4.	Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal Kabupaten Samosir.....	III – 100
Tabel 3.5.	Proyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Samosir.....	III – 100
Tabel 3.6.	Proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Samosir	III – 100
Tabel 3.7.	Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan Kabupaten Samosir	III – 101
Tabel 3.8.	Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Samosir	III – 102
Tabel 3.9.	Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kabupaten Samosir.....	III – 102
Tabel 4.1.	Proyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Samosir.....	IV – 127
Tabel 5.1.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pendidikan.....	V – 149
Tabel 5.2.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesehatan.....	V – 150
Tabel 5.2.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	V – 150
Tabel 5.4.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V – 151

Tabel 5.5.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	V – 151
Tabel 5.6.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Sosial.....	V – 152
Tabel 5.7.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja.....	V – 152
Tabel 5.8.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	V – 153
Tabel 5.9.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pangan.....	V – 153
Tabel 5.10.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanahan	V – 154
Tabel 5.11.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup	V – 154
Tabel 5.12.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	V – 155
Tabel 5.13.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V – 155
Tabel 5.14.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	V – 156
Tabel 5.15.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perhubungan	V – 156
Tabel 5.16.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika.....	V – 157
Tabel 5.17.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V – 157
Tabel 5.18.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal	V – 158
Tabel 5.19.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	V – 158
Tabel 5.20.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Statistik	V – 159
Tabel 5.21.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kebudayaan.....	V – 159
Tabel 5.22.	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan.....	V – 160
Tabel 5.23.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kearsipan	V – 160
Tabel 5.24.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pariwisata	V – 161
Tabel 5.25.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian dan Perikanan	V – 161
Tabel 5.26.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perdagangan	V – 162
Tabel 5.27.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perindustrian.....	V – 162
Tabel 5.28.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perencanaan	V – 162
Tabel 5.29.	Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah Urusan Keuangan	V – 163
Tabel 5.30.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepegawaian.....	V – 163
Tabel 5.31.	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	V – 164
Tabel 5.32.	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah urusan Pengawasan	V – 164
Tabel 5.33.	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Sekretariat Dewan	V – 165
Tabel 5.34.	Keterkaitan Permasalahan Kabupaten Samosir dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Samosir.....	V – 168
Tabel 6.1.	Perumusan Misi RPJPD	VI – 170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Sikronisasi perencanaan Pembangunan.....	I - 2
Gambar 1.2.	Hubungan antar dokumen	I - 4
Gambar 1.3.	Bagan alir penyusunan RPJPD	I - 5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Samosir	II - 10
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kabupaten Samosir	II - 11
Gambar 2.3.	Peta Geologi Wilayah Kabupaten Samosir	II - 13
Gambar 2.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir 2015-2022.....	II - 27
Gambar 2.5.	Piramida Penduduk Kabupaten Samosir 2022	II - 27
Gambar 2.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022	II - 30
Gambar 2.7.	Gini Ratio (Ketimpangan) Tahun 2015-2022	II - 31
Gambar 2.8.	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2022.....	II - 32
Gambar 2.9.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015 - 2022	II - 33
Gambar 2.10.	Angka Harapan Hidup Tahun 2015-2022.....	II - 33
Gambar 2.11.	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015-2022	II - 33
Gambar 2.12.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2022	II - 35
Gambar 2.13.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2015 -2022	II - 36
Gambar 2.14.	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2022.....	II - 43
Gambar 2.15.	Realisasi Retribusi Kabupaten Samosir Tahun 2016-2022...	II - 43
Gambar 2.16.	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	II - 58
Gambar 2.17.	Serapan Tenaga Kerja 2021 Berdasarkan Lapangan Usaha .	II - 59
Gambar 2.18.	Skor PPH aktual dan Skor PPH Ideal Kabupaten Samosir Tahun 2022	II - 62
Gambar 2.19.	Persentase Capaian TPB Kabupaten Samosir	II - 85
Gambar 2.20.	Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Samosir.....	II - 86
Gambar 2.21.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial.....	II - 86
Gambar 2.22.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi	II - 87
Gambar 2.23.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup	II - 87
Gambar 2.24.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	II - 88
Gambar 2.25.	Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045.....	II - 90
Gambar 3.1.	Proyeksi Penduduk Indonesia.....	III - 97
Gambar 3.2.	Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Samosir 2015 dan 2020 dan Proyeksi Tahun 2025 - 2045	III - 97
Gambar 3.3.	Piramida Penduduk Kabupaten Samosir 2023 dan 2045	III - 98
Gambar 3.4.	Persebaran Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2022	III - 99
Gambar 4.1.	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Samosir.	III - 114
Gambar 4.2.	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Samosir	III - 123
Gambar 4.3.	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Samosir.....	III - 125

Gambar 5.1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provsu dan Kab. Samosir Tahun 2011-2022	III – 146
Gambar 5.2. Kemiskinan Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kab. Samosir Tahun 2005-2022	III – 146
Gambar 5.3. Angka Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara dan se-Kawasan Danau Toba Tahun (Sumber : BPS Kab. Samosir 2023).....	III – 147
Gambar 5.4. Ketimpangan Provinsi Sumatera Utara dan Kab. Samosir Tahun 2010-2022 (Sumber : BPS Kab. Samosir 2023).....	III – 148
Gambar 5.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kab. Samosir (Sumber : BPS Kab. Samosir 2023).....	III – 148
Gambar 5.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	III – 148
Gambar 5.7. IPM dengan metode perhitungan baru yang resmi berlaku sejak tahun 2016.....	III – 149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah seperti yang tertuang pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga *time frame* perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Ketiga *time frame* tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan RPJPD kabupaten tetangga. Perencanaan ini disusun ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang pada prosesnya dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).

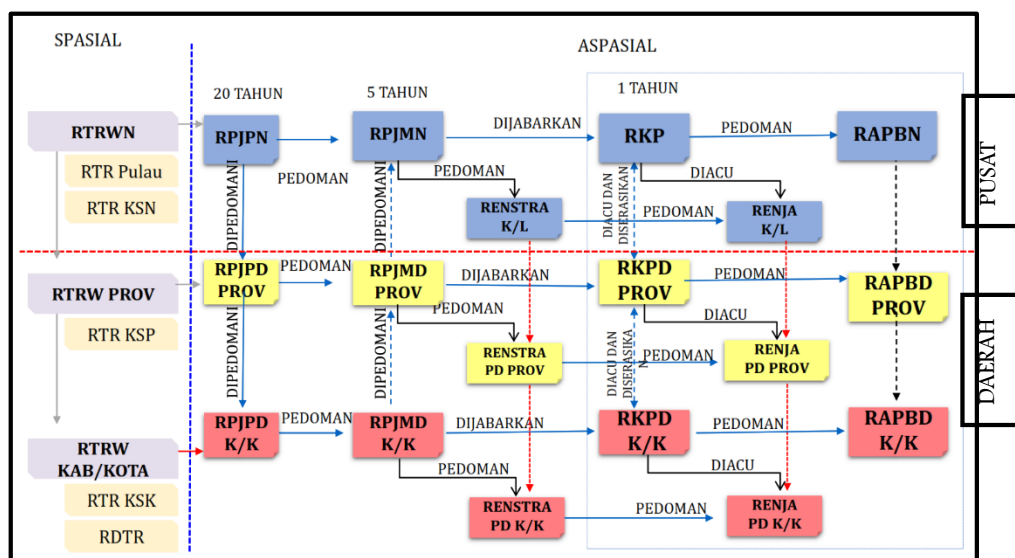
RPJPD Kabupaten Samosir memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun. Visi pembangunan jangka panjang daerah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan periode RPJMD. Penyusunan RPJPD menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan. Saat ini, periode pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 sudah memasuki tahap ketiga. Dalam kurun waktu dari 2005-2010 dan 2010-2015 hingga pada periode ketiga, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun hasil penyelenggaraan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045. Padahal, pengendalian dan evaluasi untuk RPJPD diperlukan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.

Secara prosesnya, perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.

- a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan teknokratis pada penyusunan RPJPD ini digunakan untuk evaluasi kinerja pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang, penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten, RPPLH Kabupaten, RPJPD daerah tetangga, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Samosir. Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk pendekatan partisipatif yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok merupakan bentuk penjabaran dari pendekatan politik, yang juga diperkuat melalui penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan menggunakan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas



Gambar 1.1. Sikronisasi perencanaan Pembangunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Pada penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045, beberapa landasan hukum menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun RPJPD, antara lain:

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 ayat 6;
- c. Landasan Operasional, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor xx Tahun xxxx tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2017-2037;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD

Penyusunan RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Utara. RPJPD dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional dan provinsi. Sesuai dengan amanat pada pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017, pada penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 juga harus mempedomani RTRW Kabupaten Samosir Nomor : 3 Tahun 2018 yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Samosir Tahun 2018-2038 melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Diperlukan juga pengintegrasian sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dengan RPPLH Kabupaten Samosir yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Samosir Nomor Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, RPJPD daerah lain juga perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Samosir dengan daerah sekawasan Danau Toba (Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan).



Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 perlu ditelaah, baik dari tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Adapun beberapa dokumen yang akan ditelaah dalam penyusunan RPJPD ini antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara (RPJPD) Tahun 2025-2045;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tahun 2017-2037;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038.

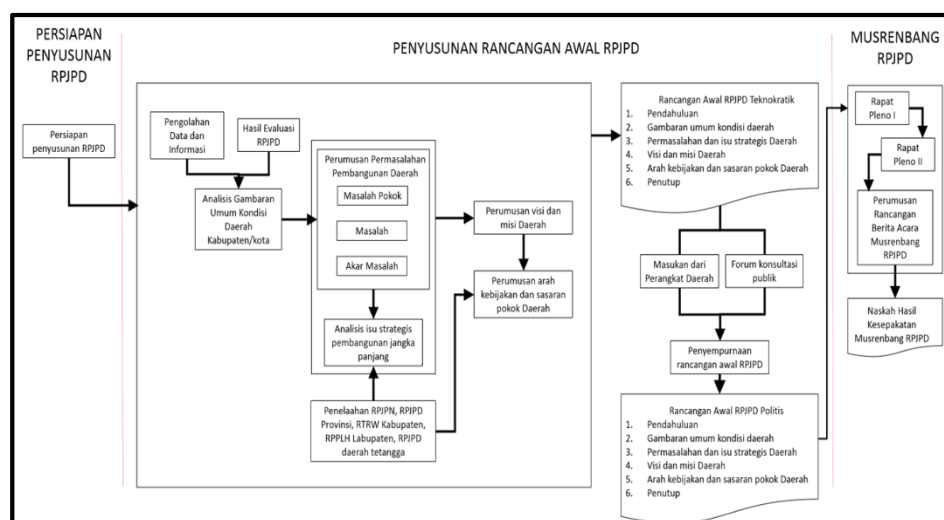
1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir 20 (dua puluh) tahun kedepan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 adalah untuk:

- a. Menganalisis gambaran umum kondisi Kabupaten Samosir;
- b. Perumusan permasalahan pembangunan jangka panjang dan isu – isu strategis Kabupaten Samosir;
- c. Perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Samosir; dan
- d. Menyusun indikator capaian kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Samosir.



Gambar 1.3. Bagan Alir Penyusunan RPJPD

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan refleksi pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum daerah.

BAB III TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Bab ini menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana pemerintah daerah.

BAB IV PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN RPJPN 2025 - 2045

Bab ini menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan daerah dan indikasi program strategis serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Samosir dan sarana prasarana sesuai daerah.

BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan dan isu – isu strategis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalahnya. Penyajian isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dijelaskan berdasarkan bidang urusan pembangunan daerah, baik secara internal maupun eksternal.

BAB VI VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai visi dan misi RPJPD. Visi dan misi RPJPD akan menggambarkan jangkauan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045

BAB VII ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan untuk tiap tahapan 5 (lima) tahunan serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 (dupa puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat pedoman dan kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Samosir

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Samosir digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir pada jangka panjang. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1 Refleksi Pembangunan Kabupaten Samosir

Pelaksanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 diuraikan dalam periodisasi pembangunan lima tahunan dengan target indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD. Indikator kinerja dokumen RPJPD Kabupaten Samosir tahun 2005-2025 merupakan indikator yang bersifat **kualitatif**, sehingga pencapaian indikator yang bersifat kualitatif tersebut disajikan dengan pencapaian indikator kinerja makro. Secara umum pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2005-2022 dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2005 dan 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,75	71,00	-1,75
2	Angka Kemiskinan	39.970 (30,59%)	9,89%	-20,70
3	Angka Pengangguran	4,63%	1,14%	-3,49
4	Pertumbuhan Ekonomi	± 3,42%	6,10%	2,68
5	Pendapatan Perkapita	Rp.8.433.000 dengan pertumbuhan sebesar 8,13%	Rp.9.335.500	902.500
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio)	NA	0,291	
7	PDRB Per Kapita (ADHB)	8.481.600	37.077.360	337,15

Pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2005-2025 dengan menetapkan visi Kabupaten Samosir yakni **“Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Internasional 2025”**. Adapun program yang sudah dilaksanakan dalam pencapaian visi RPJPD Kabupaten Samosir tahun 2005-2045 tersebut adalah:

1. Ditetapkannya Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang RPJPN tahun 2020-2024 dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas.
2. Hasil Sidang Dewan Eksekutif UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pada tanggal 07-07-2020, menetapkan Kaldera Toba sebagai **UNESCO Global Geopark**. Kabupaten Samosir sendiri terdapat 5 Geosite yang sudah ditetapkan yakni : Geosite Pusuk Buhit; Geosite Tele; Geosite Endapan Danau Huta

Tinggi Sidihoni dan Geosite Ambarita-Tuktuk-Tomok; Geosite Batak museum Simanindo-Batu Hoda-Stone Tombs.

3. **Bandar Udara Internasional** Sisingamangaraja XII (sebelumnya Bandar Udara Silangit). Pada tanggal 24 Nopember 2017, Bandara Silangit diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu bandara berkelas internasional di Pulau Sumatera.
4. Pembangunan konektivitas jalan di Kabupaten Samosir dimulai dari proses peralihan status jalan Provinsi menjadi jalan Nasional di Kabupaten Samosir pada tanggal 23 April 2015 yang pembangunannya dimulai pada tahun 2017 untuk mewujudkan program Pemerintah pembentukan 10 Bali baru di Indonesia.
5. Pembangunan pelabuhan **ferry bertaraf internasional**
Konektivitas antar wilayah di kawasan Danau Toba terdapat empat pelabuhan bertaraf internasional yakni:
 - (1) Pelabuhan Nainggolan/Sippinggan – penyeberangan Muara
 - (2) Pelabuhan Simanindo – penyeberangan Tigaras
 - (3) Pelabuhan Onanrunggu – penyeberangan Balige
 - (4) Pelabuhan Ambarita – penyeberangan Ajibata
6. Pembangunan **Jembatan Tano Ponggol**
Pembangunan jembatan Tano Ponggol yang dimulai sejak tahun 2020 mengadopsi kearifan lokal adat Batak dengan nama “Jembatan Dalihan Natolu”. Jembatan ini akan meningkatkan kenyamanan konektivitas jalur darat, menjadi ikon baru dan daya tarik wisata di Kabupaten Samosir.
7. Pembangunan **Water Front Pangururan**
Penataan *Water Front* Pangururan pada tahun 2022 didesain menjadi wisata yang ikonik yang dipersiapkan untuk menyambut wisatawan mancanegara maupun domestik. *Water Front* Pangururan ini diharapkan dapat mendongkrak PAD Kabupaten Samosir.
8. **Objek wisata unggulan bertaraf internasional**
 - a. Kawasan Tuktuk Siadong
Tuktuk Siadong adalah salah satu kelurahan yang terletak di antara Desa Ambarita dan Desa Tomok, di mana wisatawan dapat menikmati keindahan Danau Toba dari kawasan ini. Fasilitas hotel dan restoran juga tersedia dengan menawarkan berbagai jenis makanan Nasional maupun Internasional serta menjadi pusat toko *souvenir* dengan berbagai jenis produk khas Samosir.
 - b. Batu Kursi Persidangan Siallagan
Batu Kursi Persidangan Siallagan terletak di Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo merupakan batu persidangan yang berusia ratusan tahun. Revitalisasi perkampungan Huta Siallagan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR pada tahun 2021.
 - c. Menara Pandang Tele
Penataan menara pandang Tele melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR yang pendanaannya bersumber dari Bank Dunia melalui program *Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas* (Indonesia Tourism Development Project-ITDP) akan mengembangkan Kawasan Menara Pandang Tele yang dimulai pada tahun 2022.
 - d. Penataan Kampung Ulos Hutaraja dimulai pada tahun 2021 dengan tujuan melestarikan budaya *martonun* (bertenun) dan pelestarian rumah adat tradisional Batak Toba sebagai bagian dari objek wisata budaya dan edukasi.

9. **Event bertaraf internasional**

Sport Events :

- a. Samosir Lake Toba Ultra Marathon, *event* lomba lari tingkat internasional tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2022
- b. GFNY (Grand Fondo New York) Asia Championship tahun 2018, kejuaraan balap sepeda tingkat internasional di Samosir dengan *tag line* “*Riding in Samosir Like Riding in Paradise*”
- c. Toba Audax tahun 2019, ajang lomba balap sepeda taraf internasional

Music Events etc :

- a. Samosir Music International tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019
- b. Herman De Lago & Samosir-Austria Orkestra tahun 2014
- c. Samosir Rumanian Music International tahun 2015
- d. Samosir *Cheerful & Tourist Got Talent* tahun 2014 dan 2015

Kalender *event* pariwisata di Kabupaten Samosir yang bertajuk “*Horas Samosir Fiesta*” sejak tahun 2014 sementara tahun 2020 dan 2021, *event* Horas Samosir Fiesta tidak diselenggarakan karena pandemi COVID-19.

10. Pembangunan **hotel bertaraf internasional**

Untuk meningkatkan amenitas wisatawan di Kabupaten Samosir, melalui kehadiran para investor bidang perhotelan antara lain :

- a. Parna Group bersama Marclan International membangun hotel bertaraf internasional yang diberi nama Marianna *Resort & Convention* di Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo yang menjadi **resort/hotel bintang lima pertama** di Danau Toba/Samosir yang dilaunching pada tahun 2023;
- b. Hutahaean Group melakukan pembangunan hotel bintang empat yang diberi nama Labersa Samosir Hotel & Convention Center di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

11. Penyusunan dokumen **Integrated Tourism Master Plan (ITMP)** untuk KSPN Danau Toba. Tahun 2018, Kementerian PUPR melakukan penyusunan dokumen ITMP untuk KSPN Danau Toba dengan mendapat bantuan dari Bank Dunia.

12. Rekomendasi Evaluasi RPJPD tahun 2005-2025

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 direkomendasikan agar penyusunan dapat memuat :

- a. Penyusunan RPJPD 2025-2045 diharapkan capaian RPJPD dapat diukur sesuai peraturan yang berlaku. Dari hasil pengidentifikasian pencapaian target kinerja sasaran RPJMD periode I sampai periode terakhir diperoleh pencapaian target kinerja sasaran RPJMD yang tinggi (75% - 90%).
- b. Dalam penyusunan RPJMD selama periode RPJPD agar tetap berpedoman kepada RPJPD berjalan, sehingga adanya keselarasan RPJPD dan RPJMD.
- c. RPJPD sebaiknya dilakukan evaluasi periodik setiap 5 (lima) tahun, bersamaan dengan evaluasi RPJMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- d. Dokumen RPJPD ke depan, perlu mempertimbangkan pembelajaran pembangunan yang relevan dengan dasar pemikiran menuju pertengahan abad ke-21.
- e. Periode RPJPD berikutnya supaya lebih mengutamakan pencapaian target kinerja dan tidak memuat indikator kinerja terlalu tinggi dengan melihat perkembangan pembangunan skala Nasional dan Internasional.

2.2 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Samosir

Pada aspek geografi dan demografi ini diuraikan mengenai penjelasan aspek geografi dan demografi Kabupaten Samosir yang mencakup karakteristik lokasi wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan aspek demografi.

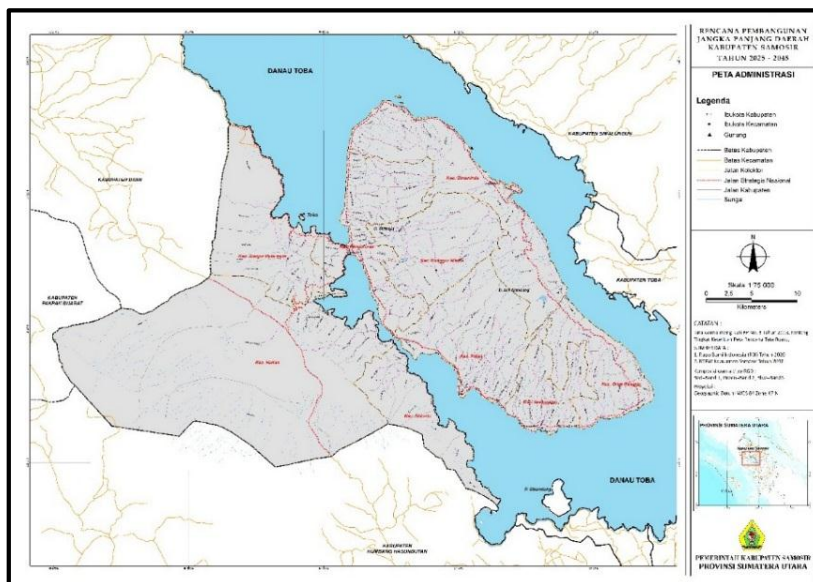
2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas, Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Samosir terletak di antara 2021'38"- 2049'48" Lintang Utara dan 98024'00" - 99001'48" Bujur Timur dengan ketinggian antara 904 - 2.250 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah ± 2.069,05 km², terdiri dari luas daratan ± 1.444,25 km² (69,80 persen) yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dan sebagian wilayah daratan Pulau Sumatera, dan luas wilayah danau ± 624,80 km² (30,20 persen) dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Barat : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat

Secara spasial, orientasi wilayah Kabupaten Samosir dalam konstelasi Provinsi Sumatera Utara serta batas wilayah administratif Kabupaten Samosir ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Samosir

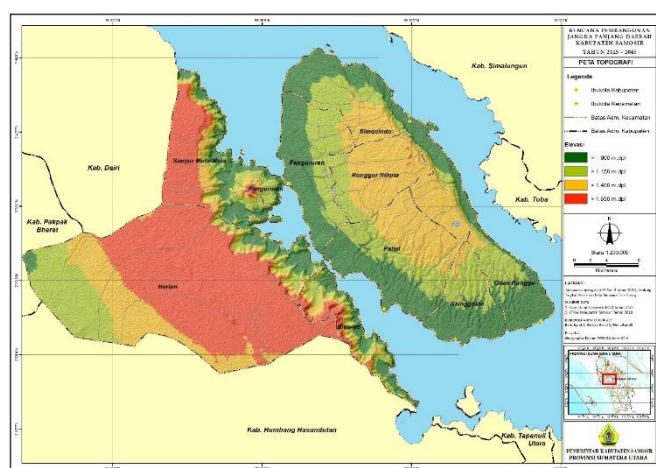
Kabupaten Samosir terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan serta 380 dusun/lingkungan. Kecamatan Harian adalah wilayah terluas yaitu seluas 38,81% dan kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Sitiotio seluas 3,51% dari luas wilayah Kabupaten Samosir, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah	% Luas
1	Sianjur Mulamula	12	-	140,20	9,71
2	Harian	13	-	560,45	38,81
3	Sitiotio	8	-	50,76	3,51
4	Onan Runggu	12	-	60,89	4,22
5	Nainggolan	13	2	87,86	6,08
6	Palipi	17	-	129,55	8,97
7	Ronggurnihuta	8	-	94,87	6,57
8	Pangururan	25	3	121,43	8,41
9	Simanindo	20	1	198,20	13,72
JUMLAH		128	6	1.444,25	100

2. Topografi

Kabupaten Samosir terletak pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang. Komposisi tanah didominasi jenis tanah *Tuff* Toba, pasir bercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya berupa lapisan tanah batuan yang relatif kurang subur untuk pertanian.



Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 904-2.250 meter dpl dengan kontur sesuai tabel 2.3.

Tabel 2.3
Persentase ketinggian lahan di Kabupaten Samosir

No	Ketinggian	% luas
1	904 m s / d 1.000 m dpl	± 10 %
2	1.000 m s / d 1.500 m dpl	± 25 %
3	> 1.500 m dpl	± 65 %

Topografi Kabupaten Samosir pada umumnya berbukit dan bergelombang, dengan komposisi kemiringan seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Persentase kemiringan lahan di Kabupaten Samosir

No	Kemiringan Lahan	Klasifikasi	% luas
1	0 - 2°	Datar	± 10 %
2	2° - 15°	Landai	± 20 %
3	15° - 40°	Miring	± 55 %
4	> 40°	Terjal	± 15 %

Sumber : RTRW Kabupaten Samosir

Ekosistem Danau Toba adalah bagian dari Zona Batak kulminasi yang merupakan bagian dari Zona Bukit Barisan di Sumatera Bagian Utara bersama rangkaian Pegunungan Aceh (Van Bemmelen, 1949). Danau Toba merupakan kaldera dari aktivitas vulkanik yang menjadi *water catchment area*. Cekungan yang terjadi secara alamiah tersebut digunakan untuk menampung air hujan, sungai maupun mata air. Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dengan menggunakan citra spot 5 tahun 2005 diketahui pola tutupan lahan Kabupaten Samosir pada tahun 2006 masih didominasi oleh vegetasi hutan, yaitu sekitar 49% dari total wilayah kabupaten namun di lain pihak vegetasi rumput dan tanah terbuka juga cukup dominan, yaitu sekitar 27%.

3. Geologi

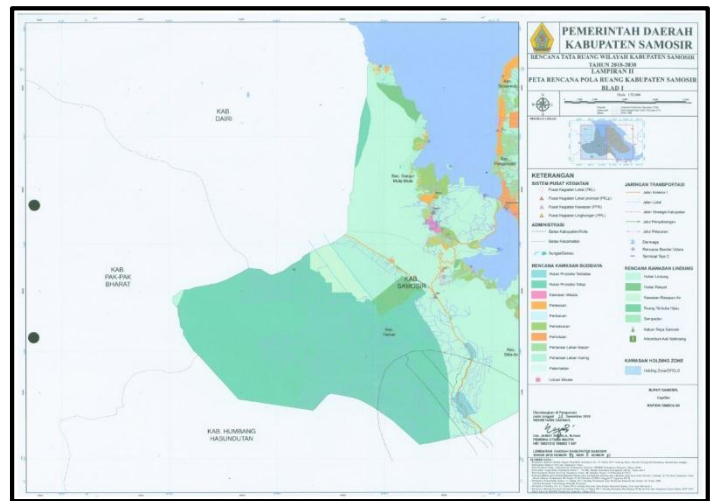
Berdasarkan hasil analisis geologi tata lingkungan diketahui bahwa batuan yang tersusun di Kabupaten Samosir umumnya didominasi oleh material letusan gunung api purba yang sudah berusia ribuan tahun. Hal ini jelas terlihat dengan ditemukannya tanah-tanah berbatu di berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Selain itu, pada lapisan atasnya banyak sekali dijumpai kandungan tanah diatomea. Jenis tanah ini cukup ekonomis untuk dijadikan bahan baku pada beberapa jenis industri. Namun tentunya perlu ada kajian tersendiri mengenai kandungan unsur-unsur fisik dan kimia pada tanah diatomea tersebut.

Jenis batuan lainnya yang terdapat di Kabupaten Samosir adalah jenis sirtu (pasir batu) dan batu kapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi bangunan. Saat ini sudah ada beberapa usaha masyarakat yang mengolah batu kapur menjadi batu bata, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Siambalo Kecamatan Pangururan dan Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi.

Daerah patahan di Kabupaten Samosir memiliki zona-zona percepatan yang berbeda-beda, yang terdiri dari :

1. Zona A = 0,20 - 0,25 g, tersebar di bagian Utara Kabupaten Samosir (Dolok Sibutan - Dolok Suara - Dolok Sigaung-gaung);
2. Zona B = 0,25 - 0,30 g, tersebar di bagian tengah Danau Toba (sisi tebing utara dan selatan);
3. Zona C = 0,30 - 0,35 g, tersebar di bagian tengah patahan semangko, mulai dari tepi tebing selatan Danau Toba hingga bagian selatan Pardomuan - Sihabong-habong – Pusu.

Kabupaten Samosir tidak memiliki gunung api aktif (Tipe A/B/C) namun tetap memiliki potensi terkena sebaran abu letusan Gunung Sinabung dan Helatoba yang menuju ke arah Kabupaten Samosir. Selain itu Gunung Pusuk Buhit juga masih berpotensi untuk dapat aktif, sehingga daerah di sekitarnya dapat dikatakan juga sebagai daerah rawan bencana. Ini berarti perlu dilakukan rencana mitigasi atau rencana jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir memiliki berbagai potensi sumber daya geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya yang masih terjaga kelestariannya. Pulau Samosir merupakan bagian dari Kaldera Toba yang memperlihatkan sekuen geologi yang fenomenal terutama yang berkaitan dengan jejak-jejak terjadinya erupsi kaldera "supervolcano", terbentuknya Kaldera Toba, terbongkarnya batuan dasar dan proses terbentuknya Pulau Samosir.

4. Hidrologi

Dari sisi hidrologi, Kabupaten Samosir memiliki beberapa sumber air bersumber dari sungai, mata air, danau, dan rawa. Air permukaan tersebut umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sumber air baku, irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro.

Daerah Tangkapan Air Danau Toba dan DAS Batu Garigis yang berada di Kabupaten Samosir merupakan bagian dari DAS Alas Singkil dan DAS Asahan. dapat dibagi menjadi sub-sub DAS di antaranya 17 sub-sub DAS yang berada di sekeliling Danau Toba dan 8 sub-sub DAS yang ada di Pulau Samosir serta ada 128 sub-sub DAS yang lebih kecil lagi, yang kesemuanya masuk mengalir ke Danau Toba dan keluar melalui Sungai Asahan.

Kondisi sungai yang ada khususnya di Pulau Samosir mengalami tingkat kerusakan sangat tinggi disebabkan terjadinya penggundulan hutan di daerah hulu sehingga gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung, penyimpanan dan pendistribusian air. Untuk menyelamatkan sumber daya air khususnya daerah aliran sungai super prioritas hingga tahun 2012 yang ada di Kabupaten Samosir seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Luas Sub DAS yang ada di Pulau Samosir

No	Sub DAS	Luas (Ha)
1	Sungai Sipapan	7.200
2	Sungai Sigumbang	16.800
3	Sungai Bolon	21.700
4	Sungai Silubung	16.800
5	Sungai Guluan	46.400
6	Sungai Arun	32.800
7	Sungai Hairi	18.600
8	Sungai Uparoring	15.000
Jumlah		175.300

Sumber : SLHD Kab. Samosir 2008

5. Klimatologi

Sesuai dengan letaknya yang berada di garis katulistiwa, Kabupaten Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C dan rata-rata kelembaban udara 85%. Pada tahun 2009, terdapat 9 (sembilan) lokasi stasiun pengamatan curah hujan di Kabupaten Samosir yang tersebar di setiap kecamatan yaitu di Sianjur Mula-mula, Harian, Sitio-tio, Onan Runggu, Nainggolan, Palipi, Ronggur Nihuta, Pangururan dan Simanindo. Secara umum pengamatan curah hujan dilakukan di Kabupaten Samosir dari tahun 2016 sampai dengan 2022 umumnya curah hujan tertinggi dibulan Desember dengan rata-rata 198 mm dan terendah dibulan Juli setiap tahunnya dengan rata-rata 62 mm.

Tabel 2.6
Data curah hujan Kabupaten Samosir tahun 2015 - 2022

Bulan	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Januari	-	65	137	86	217	18	68	211	115
Februari	-	139	71	164	139	36	0	63	87
Maret	-	63	204	99	139	104	258	198	152
April	-	66	226	172	73	211	128	227	158
Mei	1	144	69	185	175	120	181	58	133
Juni	-	57	86	112	118	164	136	55	104
Juli	-	41	8	23	152	128	66	13	62
Agustus	-	28	151	12	169	77	152	171	109
September	-	90	148	246	23	148	65	69	113
Oktober	-	45	123	253	283	69	166	58	142
November	-	126	218	175	126	218	229	58	164
Desember	-	161	233	385	133	167	57	251	198
Total	-	1.025	1.674	1.912	1.746	1.460	1.506	1.432	

6. Penggunaan lahan

Kawasan peruntukan hutan produksi terdapat di Kecamatan Harian dengan luas kurang lebih 17.608,07 Ha, tersebar di Kecamatan Sianjur Mulamula dan Kecamatan Harian. Sedangkan Kawasan hutan rakyat kurang lebih 3.543,40 Ha di wilayah Kecamatan Palipi, Ronggur Nihuta, Sianjur Mulamula, Pangururan, Simanindo dan Harian, yang dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 7.887,85 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 15.283,25 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan antara lain melalui pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan sentra di Kecamatan Harian. Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 16.706,59 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan budidaya peternakan dikembangkan di semua kecamatan.

Kawasan perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan danau dan budidaya perikanan darat. Kawasan perikanan tangkap meliputi wilayah perairan Danau Toba Kabupaten Samosir sesuai penetapan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Potensi panas bumi sebagai energi terbarukan terdapat di Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi dan Kelurahan Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan dengan kapasitas sumber daya diperkirakan sebesar 150 MW.

Tabel 2.7
Luas kawasan lindung dalam rencana pola ruang

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan hutan lindung	50.654
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	533,95 CAT 648 km2
3	Kawasan perlindungan setempat	Na
4	Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	Na
5	Kawasan rawan bencana alam	Na
6	Kawasan lindung geologi.	Na
Total		

Sumber : Perda RTRW Kab. Samosir

Tabel 2.8
Luas kawasan budidaya dalam rencana pola ruang

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	50.654
2	Kawasan hutan rakyat	3.543,4
3	Kawasan Pertanian Basah dan Kering dan perkembunan	7.887,85; 15.283,25; 16.706,59
4	Kawasan Perikanan	Na
5	Kawasan Peternakan	Na
6	Kawasan Pertambangan	Na
7	Kawasan Industri	Na
8	Kawasan Pariwisata	Na
9	Kawasan Permukiman	Na
10	Kawasan Lainnya	Na

Sumber : Perda RTRW Kab. Samosir

Kawasan peruntukan permukiman di bagi dalam dua kategori yaitu pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang meliputi kawasan PKL/PKWp, PKLp dan PPK sedangkan kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah kabupaten adalah Kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas kawasan Strategis Kabupaten yang dikembangkan di kabupaten, meliputi:

- a. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari wilayah Perkotaan Pangururan adalah pusat pelayanan yang melayani kebutuhan seluruh wilayah kabupaten, baik ke dalam maupun ke luar Kabupaten dan kawasan minapolitan sektor budidaya perikanan darat terutama dikembangkan pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Siotio serta didukung oleh kecamatan-kecamatan lainnya;
- b. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan geologi, sosial dan budaya dan warisan dunia meliputi meliputi lokasi yang ditunjuk sebagai Geosite yang merupakan bagian dari Kawasan Geo-Area Taman Bumi (Geopark) di Kabupaten Samosir yang terdiri dari:
 - Geosite Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk pada Kecamatan Simanindo;
 - Geosite Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
 - Geosite di Perkampungan si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mulamula;

- Geosite Sesar Tebing Kaldera Danau Toba yang mencakup Kawasan Panatapan Tele di Kecamatan Harian;
 - Geosite Tufa Toba yang mencakup sepanjang kelokan Tele di Kecamatan Harian;
 - Geosite Kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian;
 - Geosite Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan Pekampungan Sigulatti di Kecamatan Sianjur Mula-Mula;
 - Geosite Lembah Sagala di Kecamatan Sianjur Mula-Mula;
 - Geosite Geo Arkeologi Tomok dan Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
 - Geosite Metadesimen permokarbon yang mencakup Sabak Simpang Limbong di Desa Tanjung Bunga di Kecamatan Pangururan; dan
 - Geosite Kawasan Aek Rangat di Kecamatan Pangururan.
- c. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas kurang lebih 105 (seratus lima) Ha di Desa Tanjung Kecamatan Simanindo;
 - Kawasan perdesaan pantai Pasir Putih Parbaba (Desa Sialangan, Hutabolon, Situngkir, Siopat Sosor dan Parbaba Dolok);
 - Kawasan wisata pondok remaja Lagundi di Kecamatan Onan Runggu.

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

RTRW Kabupaten Samosir mengatur bahwa PKWp ditetapkan di Kecamatan Pangururan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Samosir dengan daerah pelayanannya seluruh wilayah Kabupaten Samosir. PKLp ditetapkan di Tele, dengan daerah pelayanan Kecamatan Harian, Sitiotio, Sianjur Mula-Mula, kecamatan di Kabupaten Humbang Hasudutan, Pakpak Bharat dan Dairi yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; Onan Runggu, dengan daerah pelayanan Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu dan Toba yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir; Simanindo Sangkal, dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, sebagian Kecamatan Ronggur Nihuta dan kecamatan di Kabupaten Karo dan Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Tomok, dengan daerah pelayanan Kecamatan Simanindo, Ronggur Nihuta, Onan Runggu dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Simalungun. Sedangkan, Sub PKLp ditetapkan di Parbaba, Rianiate, Nainggolan, Mogang dan Ambarita. Sedangkan PKK ditetapkan di Ronggur Nihuta, Sabulan, Harian Boho dan Sagala.

1. Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan kering dan lahan basah. Luas lahan kering pertanian tanaman pangan adalah 11.534,43 hektar dan luas lahan basah sebesar 6.023,99 hektar (Keputusan Bupati Samosir Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan). Lahan pertanian lahan kering dan lahan basah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering Per Kecamatan di Kabupaten Samosir

No	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah	Persentase	Pertanian Lahan Kering	Persentase
1	Sianjur Mula-mula	305,77	5,1%	1.705,01	14,8%
2	Harian	1.006,52	16,7%	1.475,62	12,8%
3	Sitio-tio	785,44	13%	1.156,25	10%
4	Onan Runggu	1.001,11	16,6%	2.440,67	21,2%
5	Nainggolan	1.156,65	19,2%	3.720,60	32,3%
6	Palipi	85,59	1,4%	22,36	0,2%
7	Ronggur Nihuta	592,74	9,8%	192,76	1,7%
8	Pangururan	930,84	15,5%	736,12	6,4%
9	Simanindo	159,33	2,6%	85,04	0,7%
	Total	6.023,99	100%	11.534,43	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

Luas lahan sawah yang paling luas di Kabupaten Samosir pada tahun 2022 untuk padi sawah seluas 9.525 ha dengan total produksi 50.900 ton, angka produksi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 dengan luas 8.495 ha mampu memproduksi padi sawah sebanyak 43.336 ton. Sedangkan untuk komoditas jagung tahun 2022 di Kabupaten Samosir luas tanaman jagung seluas 7.539 ha dengan total produksi sebanyak 54.619 ton. Angka ini meningkat dari tahun 2015 dengan luas tanaman jagung sebesar 1.476 ha mampu memproduksi jagung sebanyak 6.542 ton. Tanaman kacang tanah pada tahun 2022 seluas 68 ha dengan total produksi sebesar 74 ton menurun dari tahun 2015 dengan luasan sebesar 160 ha dengan produksi sebesar 3.098 ton. Ubi kayu juga mengalami penurunan dari tahun 2015 seluas 194 ha dengan produksi sebesar 6.695 ton menjadi seluas 125 ha dengan produksi sebesar 3.837 ton pada tahun 2022. Sedangkan ubi jalar pada tahun 2015 seluas 194 ha dengan produksi sebesar 4.774 ton meningkat pada tahun 2022 seluas 529 ha dengan produksi sebesar 10.855 ton.

Tabel 2.10
Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Samosir

Tahun	Padi		Jagung		Kacang Tanah		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
2015	8.495	43.336	1.476	6.542	160	3.098	194	6.695	194	4.773
2016	4.766	38.916	2.156	7.306	133	193	169	5.639	297	5.833
2017	9.627	39.888	3.215	19.513	57	115	112	8.089	298	6.375,2
2018	10.584	42.066	5.176	17.414	56	84	105	3.956	407	7.623,9
2019	8.663	47.619	6.731	47.848	68	73	101	2.671	434	9.326
2020	8.745	42.788	6.472	31.056	195	216	171	3.810	393	8.201
2021	9.499	48.835	6.329	28.424	80	108	137	5.012	367	9.697
2022	9.525	50.900	7.539	54.619	68	74	125	3.837	529	10.855

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

b. Pertanian Hortikultura

Berdasarkan data dari laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Kabupaten Samosir, produksi tanaman hortikultura Kabupaten Samosir pada tahun 2022 yang paling banyak adalah tanaman kentang sebanyak 17.355,1 ton, diikuti oleh tanaman kubis sebanyak 7.257 ton, bawang merah 5.178,3 ton, dan cabai besar 1.105,45 ton.

Tabel 2.11
Luas Tanam dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Samsir

Tahun	Cabe		Bawang Merah		Kubis		Kentang	
	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
2015	149	1.474	215	1.353	74	1.124	539	12.950
2016	220	1.155	200	1.259	-	-	589	13.050
2017	214	1.410	238	1.680	138	28.160	618	13.050
2018	166	1.485	244	1.839	386	76.585	485	16.472
2019	141	959	220	1.565	387	-	448	9.314
2020	148	617	302	2.095	234	5.626	651	11.851
2021	160	1.048	320	3.323	250	6.368	718	16.147
2022	169,9	1.105,45	258,8	5.178,3	297	7.257	689	17.355,1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samsir

Tabel 2.12
Potensi Unggulan Pertanian Hortikultura per Kecamatan di Kabupaten Samsir Tahun 2022

No	Kecamatan	Potensi (ha)					
		Cabe	Tomat	Bawang Merah	Kubis	Kentang	Kangkung
1	Sianjur Mula-mula	15	2	47,0	0	0	0
2	Harian	66,7	0,5	28,7	296	676	0
3	Sitio-tio	9	0,5	34	0	0	0,12
4	Onan Runggu	4,7	0	17,4	0	12	0
5	Nainggolan	1,8	0,2	8,0	0,1	0	0,5
6	Palipi	12,7	0	24,9	0	0	0,08
7	Ronggur Nihuta	0	0	0,4	0	0	0
8	Pangururan	11,2	2	67,9	0	0	9,2
9	Simanindo	12	3,5	30,5	0,3	1	9,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samsir

c. Peternakan

Populasi ternak yang paling banyak dipelihara di Kabupaten Samsir adalah babi, kambing, sapi dan kerbau sementara itu, populasi unggas yang paling banyak dipelihara adalah ayam buras dan itik. Banyaknya populasi babi tahun 2022 sebanyak 6.805 ekor, ternak kambing sebanyak 2.136 ekor, ternak sapi sebanyak 621 ekor dan ternak kerbau sebanyak 12.044 ekor sementara unggas sebanyak 26.243 ekor ayam buras dan 1.612 ekor itik.

Tabel 2.13
Komoditas Peternakan dan Unggas Kabupaten Samsir

Tahun	Ternak (ekor)				Unggas (ekor)	
	Babi	Kambing	Sapi	Kerbau	Ayam Buras	Itik
2015	42.352	9.700	2.128	28.181	148.499	17.038
2016	29.137	7.192	1.105	26.001	261.275	8.221
2017	23.816	6.139	1.004	23.937	267.762	3.578
2018	29.426	5.824	1.002	23.104	158.134	1.339
2019	28.154	5.404	905	21.764	87.237	1.688
2020	9.306	5.260	809	19.767	87.026	1.832
2021	4.274	3.395	615	15.661	56.602	1.701
2022	6.805	2.136	621	12.044	26.243	1.612

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samsir

Potensi pengembangan peternakan yang paling besar dikembangkan adalah ternak besar seperti kerbau, sapi, kambing dan babi serta pengembangan ternak unggas yakni ternak ayam buras dan itik. Populasi ternak yang paling banyak dipelihara di Kabupaten Samsir adalah babi dan kambing, sapi dan kerbau sementara populasi unggas yang paling banyak dipelihara adalah ayam buras dan itik.

d. Perkebunan

Jenis komoditi unggulan yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Samosir adalah tanaman kopi. Hal ini terlihat dari besarnya luas tanaman kopi yaitu 5.710 ha dan total produksi kopi tahun 2022 sebesar 2.948 ton. Kemudian diikuti oleh tanaman kemiri dengan luas tanam sebesar 261 ha dengan total produksi 498 ton, tanaman kakao dengan luas lahan 223 ha dengan total produksi 103 ton dan tanaman aren dengan luas tanam 291 ha dan produksi 203 ton, tanaman kelapa dengan luas tanam sebesar 61 ha dengan produksi sebesar 29 ton serta tanaman vanili seluas 20 ha dengan total produksi sebesar 13 ton.

Tabel 2.14
Luas Tanam dan Produksi Perkebunan Kabupaten Samosir Tahun 2022

Tahun	Kopi		Kakao		Kemiri		Cengkeh		Aren		Vanili		Kelapa	
	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
2015	4.533	3.099	252	123	287	270	125	18	234	74	53	9	93	37
2016	4.834	3.303	250	126	285	272	129	21	348	75	16	2	94	34
2017	5.038	3.866	219	116	354	296	116	25	247	67	3	0,6	63	23
2018	5.045	4.152	222	123	267	284	112	26	233	58	7	0,6	42	20
2019	5.105	4.278	219	115	271	284	112	26	228	58	7	1	41	20
2020	5.196	3.028	221	104	276	549	129	27	277	191	20	2	54	36
2021	5.610	2.829	223	101	261	502	299	27	290	202	20	13	60	27
2022	5.710	2.948	223	103	261	498	311	29	291	203	20	13	61	29

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

Tabel 2.15
Potensi Luas Tanam Unggulan Perkebunan di Kabupaten Samosir tahun 2022

No	Kecamatan	Potensi (Ha)			
		Kopi	Kakao	Kemiri	Cengkeh
1	Sianjur Mula-mula	451	6	11	0.10
2	Harian	236	23	27	5.36
3	Sitio-tio	250	25	15	2.00
4	Onan Runggu	319	21	20	23.20
5	Nainggolan	495	27	27	195.56
6	Palipi	833	36	53	30.94
7	Ronggur Nihuta	1.644	1	0,2	6.76
8	Pangururan	775	46	55	11.35
9	Simanindo	610	38	54	33.81

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

e. Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Samosir dihasilkan dari perikanan budidaya (Kolam darat dan Jaring Apung) dan perikanan tangkap. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebesar 5.863 ton dan perikanan tangkap sebesar 3.074 ton. Produksi perikanan budidaya terbesar terdapat di Kecamatan Simanindo sebesar 586 ton diikuti Kecamatan Kecamatan Nainggolan sebesar 469 ton. Produksi perikanan tangkap terbesar terdapat di Kecamatan Palipi sebesar 584 ton, diikuti Kecamatan Nainggolan sebesar 492 ton dan Kecamatan Onan Runggu sebesar 461 ton. Produksi perikanan Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Produksi Perikanan Kabupaten Samosir tahun 2015 - 2022

Kecamatan	Produksi (Ton)	
	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap
2015	31.313	5.145
2016	34.209	7.244
2017	35.702	8.872
2018	8.915	7.591
2019	7.351	7.603
2020	7.673	7.378
2021	6.689	3.231
2022	5.863	3.074

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

Tabel 2.17
Produksi Perikanan di Kecamatan Kabupaten Samosir Tahun 2022

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya (ton)	Perikanan Tangkap (ton)
1	Sianjur Mula-mula	176	277
2	Harian	235	215
3	Sitio-tio	117	246
4	Onan Runggu	293	461
5	Nainggolan	469	492
6	Palipi	410	584
7	Ronggur Nihuta	3,5	430
8	Pangururan	59	31
9	Simanindo	586	338

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

2. Pariwisata

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan wisata diarahkan pada peruntukan kawasan wisata unggulan dan pengadaan jalur wisata air terdiri dari kawasan wisata Tomok-Tuktuk, kawasan wisata Aek Rangat, kawasan wisata budaya Sianjur Mula-mula, kawasan wisata rohani Pusuk Buhit, kawasan wisata Lagundi dan Sukkean, kawasan wisata danau Sidihoni dan Aek Natonang, Bukit Sibeabea. Sedangkan obyek wisata lain yang dapat dikembangkan adalah Tano Ponggol, pantai pasir putih Parbaba, wisata olahraga paralayang di Siulak Hosa, wisata budaya huta Sidabutar dan *old batak village* di Simanindo, wisata Piso Somalim di Hatoguan, Menara Tele, Aek Rangat Simbolon, museum budaya di Gereja Katolik Inkulturatif Pangururan, wisata budaya di Sitio-tio dan obyek-obyek wisata alam, sejarah, dan budaya lainnya yang dapat dikembangkan. Semua aspek tersebut, umumnya dikaji dalam produk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Namun dalam arahan pemanfaatan ruangnya, obyek dan kawasan wisata tersebut di atas sudah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan budidaya non pertanian.

Tabel 2.18
Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah Kabupaten Samosir

No	Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah	Keterangan
1	Makam Raja Sidabutar di Tomok	Pengembangan kawasan dengan perbaikan fasilitas pendukung, seperti ruang jual souvenir khas Tomok dan pemeliharaan kawasan agar tidak merubah nuansa makam yang telah ada
2	Makam Raja Lontung di Sitiotio	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir

No	Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah	Keterangan
3	Makam Pisosomalim di Palipi	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
4	Makam Raja Simarmata di Pangururan	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir
5	Pusuk Buhit di Sianjur Mula-mula	Pemeliharaan kawasan tanpa membangun sesuatu di bagian puncak Pusuk Buhit, serta perbaikan pada bangunan-bangunan adat tanpa merubah bagian aslinya. Untuk lebih menarik wisatawan, dapat pula ditambah dengan fasilitas penunjang, seperti ruang jual souvenir khas Sianjur Mula-mula
6	Makam Raja Simarmata di Harian	Pemeliharaan kawasan dengan tidak merubah area makam, namun dapat menambah fasilitas penunjang seperti lokasi jual souvenir

Sumber : RPJMD 2021-2026

Kegiatan konservasi budaya dan sejarah dalam pengembangannya dapat diarahkan sebagai kawasan wisata sejarah, namun arahan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan fungsi, prasarana dan sarana di Sianjur Mula-mula. Sebagai lokasi awal berkembangnya suku bangsa Batak, Sianjur Mula-mula belum cukup memberikan informasi maupun “kesan” yang kuat karena daerah itu dipercayai sebagai asal mula suku bangsa Batak **titik 0 (nol) Peradaban Batak** yang harus ditata sehingga memberi makna mendalam bagi penerus suku bangsa ini. Untuk itu, masyarakat akademik yang paham tentang suku bangsa Batak harus diajak serta untuk mengembangkannya. Penataan ruang di tempat tersebut juga harus dilengkapi dengan berbagai atribut yang mengingatkan kebesaran suku ini pada masa lalu sampai saat ini. Prinsip *Dalihan Na Tolu* sebagai tiang kehidupan menjadi unsur utama untuk menggambarkan kekuatan hubungan suku bangsa Batak.

Promosi dilakukan baik melalui internet, brosur, kantor informasi turis dan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan. Kerjasama dengan biro perjalanan dikembangkan dengan menyusun paket perjalanan ke beberapa objek wisata di tempat lain. Semua kegiatan pengembangan wisata harus melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Dengan demikian *effect tricle down* dari kegiatan ini dapat dirasakan masyarakat dan meningkatkan penghasilan mereka. Konservasi budaya, sebagai bagian dari penelusuran sejarah suku bangsa Batak, tidak hanya berguna dalam pemantapan dan pelestarian identitas bagi suku bangsa Batak sendiri, namun hal ini juga sekaligus melengkapi eksplorasi budaya dan alam Kabupaten Samosir yang dapat digunakan mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Samosir.

Kabupaten Samosir memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata terbaik dan akan berpotensi menjadi kabupaten yang memiliki objek wisata terbanyak. Kawasan peruntukan Pariwisata dikategorikan dalam 3 pengembangan wisata yaitu wisata Alam, wisata Budaya dan Sejarah serta wisata Rohani.

1. Wisata Alam

Kabupaten Samosir memiliki 47 objek wisata Alam yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan sebaran objek wisata tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.19
Objek Wisata Alam Kabupaten Samosir

No	Nama Objek Wisata	Kecamatan
1	Pantai Indah Situngkir	Pangururan
2	Pantai Tandarabun	Simanindo
3	Pantai Sibolazi	Simanindo
4	Pantai Pasir Putih Sipinggan	Pangururan
5	Menara Pandang Sinapuran,	Simanindo
6	Kawasan Agro Wisata Aek Natonang	Simanindo
7	Pantai Batu Hoda	Simanindo
8	Kawasaan Hotel dan Restoran Tuktuk	Simanindo
9	Pantai Pasir Putih Parbaba	Pangururan
10	Pemandian Air Panas	Pangururan
11	Menara Pandang Tele	Harian
12	Bukit Holbung si Pege	Harian
13	Air Terjun Sampuran Efrata Sosor Dolok	Harian
14	Air Terjun Hadabuan Nasogop	Sianjur Mula-mula
15	Air Terjun Sampuran Pangaribuan	Harian
16	Kawasan Wisata Tirta Pea Parogan di Desa Salaon	Ronggur Nihuta
17	Kawasan Wisata Tirta Danau Sidihoni	Ronggur Nihuta
18	Pea Roba	Simanindo
19	Aek Sipale Onggang	Ronggur Nihuta
20	Hariara Maranak	Pangururan
21	Pohon Besar Sukkean	Onan Runggu
22	Permandian Air Panas Simbolon	Palipi
23	Kawasan Wisata Siulakhosa Bukit Beta	Simanindo
24	Pantai Langat	Simanindo
25	Aek Liang	Ronggur Nihuta
26	Aek Si Boru Pareme	Sianjur Mula-mula
27	Batu Guru	Nainggolan
28	Batu Hitam	Ronggur Nihuta
29	Batu Holbung (TBF)	Sianjur Mula-mula
30	Batu Simalliting	Ronggur Nihuta
31	Bukit Sitalmak talmak	Harian
32	Gua Alam Sangkal	Simanindo
33	Gua Lontung	Simanindo
34	Gua Parmonangan	Harian
35	Gua Sidam-dam	Ronggur Nihuta
36	Hutan Flora Anggrek	Harian
37	Kampung Harimau Situmeang	Harian
38	Kawasan Tano Ponggol	Pangururan
39	Mata Air dan Pohon Pokki	Harian
40	Mual Si Raja Sonang di Pakpahan	Onan Runggu
41	Pantai Pasir Putih di Sukkean	Onan Runggu
42	Polhang/Parbatu Palhang Siringo-ringo	Nainggolan
43	Pulau Tulas	Sianjur Mula-mula
44	Pulo Malau	Simanindo
45	Tambun Surlau	Onan Runggu
46	Tuktuk Asu	Simanindo
47	Ulu Darat	Harian

Sumber : Rippda Kab. Samosir Tahun 2022

2. Wisata Budaya dan Sejarah

Objek wisata budaya dan sejarah memiliki 40 objek wisata yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Samosir seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Objek Wisata Sejarah dan Budaya Kabupaten Samosir

No	Nama Objek Wisata	Kecamatan
1	Ruma Hela	Sianjur Mula-mula
2	Batu Sawan	Sianjur Mula-mula
3	Rumah Parsaktian Datu Parulas Parultop	Onan Runggu
4	Museum Gereja Katholik Inkulturatif	Pangururan
5	Aek Boras	Sianjur Mula-mula
6	Batu Nanggar	Sianjur Mula-mula
7	Batu Pargasipan	Sianjur Mula-mula
8	Batu Parhusipan	Sianjur Mula-mula
9	Kawasan Wisata Gua Bunda Maria	Palipi
10	Monumen Perjuangan Liberty Malau	Pangururan
11	Pertunjukan Sigale-gale	Simanindo
12	Batu Hobon	Sianjur Mula-mula
13	Kuburan di atas Pohon	Simanindo
14	Kawasan Wisata Remaja Lagundi	Onan Runggu
15	Batu Kursi Parsidangan Siallagan	Simanindo
16	Perkampungan Si Raja Batak di Sigulatti	Sianjur Mula-mula
17	Mual Boru Saroding di Desa Sabulan	Sitiotio
18	Bulu Turak	Simanindo
19	Batu Kursi Parhapuran di Ambarita	Simanindo
20	Boru Simenak-menak	Nainggolan
21	Kawasan Pohon Boru Sinaetang	Pangururan
22	Komplek Guru Tatea Bulan	Sianjur Mula-mula
23	Martua Limang di Desa Suhut Nihuta Pardomuan Urat	Palipi
24	Mual Datu Parngongo	Sitio-tio
25	Sidabasa	Nainggolan
26	Sopo Paromasan di Desa Lumban Pinggol	Pangururan
27	Kawasan Peninggalan Sejarah Huta SiRaja Batak	Sianjur Mula-mula
28	Komunitas Tenun Ulos Batak Huta Raja Lumban Suhi-Suhi	Pangururan
29	Batu Marhosa	Simanindo
30	Makam Tua Raja Sidabutar	Simanindo
31	Museum Huta Bolon	Simanindo
32	Pemandian Aek Sipitu Dai	Sianjur Mula-mula
33	Tugu Toga Sinaga	Palipi
34	Situs Pagar Batu (Liang Marlangkup, Botean, Parit Debata, Losung Simarlagelage, Sitolu Mata Marante	Simanindo
35	Museum Gok Asi Simanindo	Simanindo
36	Museum Tomok	Simanindo
37	Patung Raja Si Lontung	Sitio-tio
38	Sipokki	Simanindo
39	Kawasan Wisata Pusuk Buhit (Batu Sawan, Tala, Tempat Doa)	Sianjur Mula-mula
40	Batu Rantai	Palipi

Sumber : RIPPDA Kab. Samosir Tahun 2022

3. Wisata Rohani

Lokasi objek wisata rohani di Kabupaten Samosir terdapat 3 objek wisata dengan wilayah lokasi tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi seperti diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.21
Objek Wisata Rohani di Kabupaten Samosir

No	Nama Objek Wisata	Kecamatan
1	Menara doa Sinatapan	Pangururan
2	Goa Maria	Palipi
3	Gereja Katholik Inkulturatif	Pangururan
4	Wisata Sibe-bea	Harian

Sumber : RIPPDA Kab. Samosir Tahun 2022

3. Industri

Kawasan peruntukan industri yang telah berkembang di Kabupaten Samosir sebagian besar berlokasi di 9 kecamatan wilayah Kabupaten Samosir. Jenis industri yang banyak berkembang adalah industri rumah tangga yang

didominasi industri kecil meliputi pertenunan, makanan (olahan keripik, kacang rondam, kopi, andaliman, dll) anyaman bambu, dan lain-lain. Hingga tahun 2022 Jumlah UMKM Kabupaten Samosir yang memiliki PIRT sebanyak 37 usaha, Produk UMKM yang memiliki label halal sebanyak 4 produk dan produk UMKM yang memiliki sertifikat merek sebanyak 3 produk.

Kawasan peruntukan industri menengah lebih diutamakan pada kawasan pariwisata untuk mendukung kegiatan pariwisata, seperti:

- a. Industri tenun ulos terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Sianjur Mula-mula;
- b. Industri diversifikasi produk hasil tenun terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Simanindo;
- c. Industri ukiran (souvenir) terutama dikembangkan di Kelurahan Tuktuk Siadong dan Desa Tomok Kecamatan Simanindo serta di Kecamatan Ronggur Nihuta;
- d. Industri pembuatan alat musik tradisional terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Harian dan Kecamatan Ronggur Nihuta;
- e. Industri gerabah terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi;
- f. Industri pembuatan batu bata dan Paving block terutama dikembangkan di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Pangururan;
- g. Industri pengolahan kayu rakyat meliputi kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan/ atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dikembangkan di seluruh kecamatan;
- h. Industri pengolahan makanan ringan dikembangkan di seluruh kecamatan;
- i. Industri anyam-anyaman dikembangkan di seluruh kecamatan;
- j. Industri sablon dan pembuatan reklame terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi.

4. Taman Bumi Kaldera Toba

Kaldera Toba yang terbentuk dari ledakan super volkano 74.000 tahun lalu memiliki dasar yang sepenuhnya air sehingga menciptakan danau terbesar di Indonesia. Keindahan Kaldera Toba dengan kekayaan budaya masyarakat tepiannya menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Indonesia yang masuk daftar 10 Bali baru.

Pada Juli 2020 Kaldera Toba ditetapkan sebagai Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO lewat sidangnya yang ke-209 di Paris. Kaldera Toba berhasil masuk daftar 16 UNESCO Global Geopark baru setelah dinilai dan diputuskan oleh UNESCO Global Geopark Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks ke-IV di Lombok, Indonesia, pada 31 Agustus - 2 September 2019. Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark melalui proses panjang dari upaya bersama berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, daerah maupun masyarakat setempat yang tinggal di kawasan Danau Toba.

Dalam konteks inilah, UNESCO mendukung Kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai warisan dunia melalui penetapan ini, Indonesia dapat mengembangkan geopark Kaldera Toba melalui jaringan *Global Geoparks Network* dan *Asia Pacific Geoparks Network* khususnya dalam kaitan

pemberdayaan masyarakat lokal. Setelah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG), Danau Toba bisa menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan jadi destinasi dengan memadukan tiga potensi utama yaitu *geodiversity*, *biodiversity*, *culture diversity*, Danau Toba memiliki peranan penting menopang sektor pariwisata.

2.2.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Samosir dapat dikategorikan sebagai gerakan tanah menengah hingga tinggi, karena pada umumnya lahan yang ada berupa lahan bergelombang hingga curam, terutama di Kecamatan Pangururan, Sianjur Mulamula, Harian, Palipi dan Kecamatan Onan Runggu, sebagian wilayah Kecamatan Nainggolan, sebagian wilayah Kecamatan Ronggur Nihuta, sebagian wilayah Kecamatan Simanindo dan sebagian wilayah Kecamatan Sitiotio.

Sebaran kawasan gelombang pasang Danau Toba tersebar di wilayah tepian danau Kecamatan Pangururan, wilayah tepian danau Kecamatan Simanindo, wilayah tepian danau Kecamatan Onan Runggu, wilayah tepian danau Kecamatan Nainggolan, dan wilayah tepian danau Kecamatan Palipi.

Tabel 2.22
Kondisi Pergerakan Tanah dan Rawan Gempa di Kabupaten Samosir (Ha)

No.	Kecamatan	Runtuhan (Ha)	Gelincir (Ha)	Longsor (Ha)	Gempa (Ha)
1.	Simanindo	3.865.060	9.667.391	2.059.222	-
2.	Pangururan	81.247	1.737.822	1.561.648	-
3.	Ronggurnihuta	1.758	2.679.360	876.247	-
4.	Palipi	-	4.878.989	3.264.973	-
5.	Harian	5.168.084	5.768.557	41.763.049	1.771.823
6.	Onan Rungu	1.262.724	-	3.712.059	-
7.	Nainggolan	-	2.845.013	2.684.654	-
8.	Sitio-tio	1.925.243	-	1.596.990	1.600.468
9.	Sianjur Mula-mula	6.405.748	-	5.101.552	-
TOTAL		21.577.132	21.577.132	61.620.394	3.372.291

Sumber : Geographic Information System Kabupaten Samosir (diolah)

Kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak bencana alam di sekitar pantai Danau Toba adalah :

1. Wilayah perairan di Kecamatan Pangururan;
2. Wilayah perairan di Kecamatan Sianjur Mulamula;
3. Wilayah perairan di Kecamatan Simanindo;
4. Wilayah perairan di Kecamatan Nainggolan;
5. Wilayah perairan di Kecamatan Onan Runggu
6. Bagian wilayah Sub DAS Binanga Aron di Kecamatan Ronggur Nihuta;
7. Bagian wilayah Sub DAS Aek Silang dan bagian wilayah Sub DAS Aek Parombahan di Kecamatan Harian;
8. Bagian wilayah Sub DAS Binanga Bolon di Kecamatan Nainggolan
9. Bagian wilayah Sub DAS Parembakan di Kecamatan Harian dan Kecamatan Sianjur Mulamula;
10. Bagian wilayah Sub DAS Aek Tulas di Kecamatan Pangururan
11. Bagian wilayah Sub DAS Binanga Aron di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta;
12. Bagian wilayah Sub DAS Binanga Guluan di Kecamatan Palipi;
13. Bagian wilayah Sub DAS Binanga Silubung di Kecamatan Palipi;

14. Bagian wilayah Sub DAS Sitiung-tiung di Kecamatan Simanindo;
15. Bagian wilayah Sub DAS Simala di Kecamatan Onan Runggu.

Tingkat kekuatan gempa di Kabupaten Samosir yang berkisar antara skala V hingga VIII MMI (*Modified Mercalli Intensity*) dimana zona tertinggi terletak pada jalur patahan regional Sumatera (Semangko). Kisaran kekuatan gempa tersebut dapat dilihat pada keterangan berikut :

1. Skala V - VI, tersebar merata di wilayah Kabupaten;
2. Skala VI - VII, hanya terisolir di daerah Dolok Nabarat - Aritonang - Siborong-borong - Aek Nauli hingga Dolok Sanggul;
3. Skala VII - VIII, tersebar pada bagian dalam zona VI - VII yang tersebar di daerah Parmiah-an-Lumban Pancur-Pagaran.

Beberapa peristiwa gempa yang terjadi di Kabupaten Samosir dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Banyaknya Gempa Bumi yang dirasakan di Kabupaten Samosir 2015 -2022

Bulan	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	-	3	5	2	-	3	-	4
Februari	-	1	1	3	1	1	8	3
Maret	-	-	2	1	1	-	22	5
April	-	1	-	-	1	1	44	4
Mei	2	1	2	2	1	1	115	4
Juni	-	1	-	1	1	1	23	3
Juli	-	1	1	-	1	2	24	4
Agustus	-	1	-	-	1	2	10	-
September	-	1	-	-	-	-	6	4
Oktober	-	1	1	-	-	2	7	5
November	-	8	3	-	3	1	2	2
Desember	-	1	1	-	1	-	7	4
Total	2	19	16	9	11	14	268	42

Sumber : BMKG

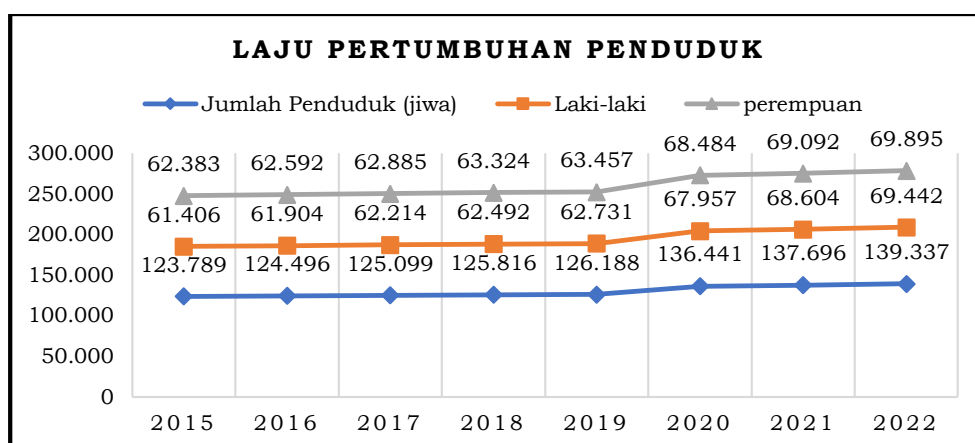
2.2.4 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Samosir terus meningkat selama 8 tahun terakhir dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,7% per tahunnya dengan rasio rata-rata jenis kelamin berada 98,43%. Data tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah pada setiap tahunnya. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai keberhasilan upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) atau juga dapat dilihat sebagai rendahnya tingkat penambahan penduduk akibat tingginya angka kematian bayi maupun balita serta faktor-faktor lainnya.

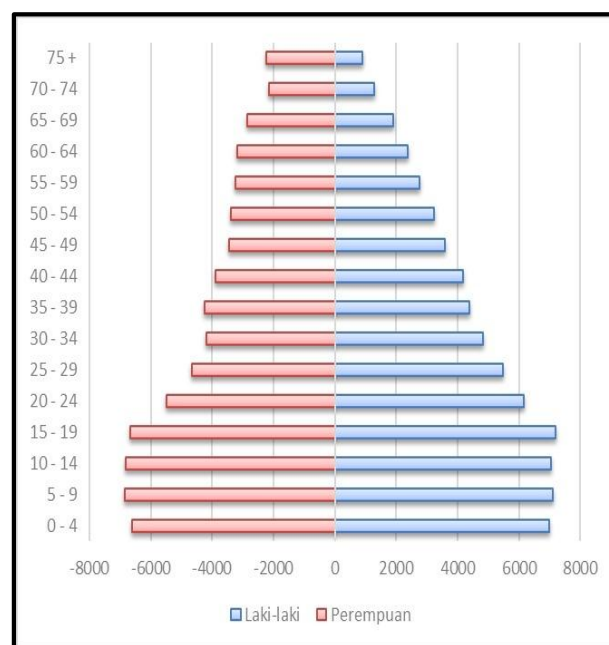
Dengan luas wilayah sebesar 1.444,25 km², rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2022 adalah sebanyak 96,46 jiwa per km² dengan jumlah penduduk 139.337 jiwa. Selama kurun waktu delapan tahun terakhir, terdapat peningkatan kepadatan penduduk sebesar 11,92%. Kecamatan Pangururan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 35.104 jiwa (25,19 persen), sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sitiotio yaitu 8.288 jiwa (5,95 persen). Dengan pertumbuhan rata-rata penduduk Kabupaten Samosir 0,98% setiap tahunnya.

Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	URAIAN	TAHUN							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laki-laki (jiwa)	61.406	61.904	62.214	62.492	62.731	67.957	68.604	69.442
2	Perempuan (jiwa)	62.383	62.592	62.885	63.324	63.457	68.484	69.092	69.895
	Jumlah (jiwa)	123.789	124.496	125.099	125.816	126.188	136.441	137.696	139.337



Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk 2015-2022



Gambar 2.5. Piramida Penduduk Kab. Samosir 2022

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir dijelaskan melalui 3 (tiga) hal yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Konsep PDRB dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). PDRB secara umum digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu daerah, terutama yang berhubungan

dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Untuk mengetahui perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Samosir dapat dideskripsikan melalui PDRB Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku.

Tabel 2.25
PDRB Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Konstan (ADHK-2000)
Tahun 2015-2022 (Jutaan Rp.)

No	Lapangan Usaha	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.319,69	1.385,21	1.458,70	1.534,88	1.606,00	1.601,57	1.641,71	1.717,13
B	Pertambangan dan Penggalian	15,34	16,42	17,67	18,81	19,91	20,39	21,00	21,64
C	Industri Pengolahan	13,91	14,28	14,66	15,04	15,55	15,72	15,99	16,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,90	1,94	2,01	2,06	2,12	2,24	2,35	2,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,23	1,30	1,38	1,43	1,49	1,54	1,57	1,64
F	Konstruksi	250,57	267,91	287,06	318,42	344,41	332,87	348,94	364,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	279,79	293,93	308,61	323,17	343,05	341,62	359,42	384,26
H	Transportasi dan Pergudangan	73,73	79,59	85,83	91,76	100,81	96,97	98,94	107,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	118,34	127,68	137,80	148,04	162,60	157,95	158,00	168,98
J	Informasi dan Komunikasi	24,74	26,62	28,65	30,75	33,52	36,38	39,21	41,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,09	24,18	25,35	26,55	27,86	28,92	30,61	31,89
L	Real Estate	51,46	54,34	57,37	59,13	61,64	64,09	64,35	65,71
MN	Jasa Perusahaan	2,90	3,05	3,22	3,35	3,50	3,59	3,70	3,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	294,775	299,79	30,68	314,00	329,39	328,41	326,91	326,74
P	Jasa Pendidikan	22,59	23,95	25,38	26,89	28,38	29,68	31,06	31,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,02	13,75	14,53	15,36	16,28	16,26	16,07	16,33
RSTU	Jasa lainnya	1,71	1,8	1,95	2,06	2,23	2,22	2,28	2,50
	PDRB	2.503,78	2.635,77	2.776,85	2.931,70	3.098,74	3.080,43	3.162,10	3.303,86

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Tabel 2.26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015-2022 (Milyar Rp.)

No	Lapangan Usaha	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.621,88	1.766,53	1.919,80	2.084,35	2.241,67	2.310,91	2.425,33	2.647,62
B	Pertambangan dan Penggalian	19,64	22,12	23,90	25,83	27,92	29,23	30,90	32,81
C	Industri Pengolahan	17,81	18,78	20,08	21,37	22,83	23,48	24,46	26,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,66	1,70	1,88	2,01	2,13	2,26	2,38	2,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,64	1,82	2,05	2,15	2,25	2,33	2,40	2,53
F	Konstruksi	326,56	357,58	395,90	455,51	506,80	505,32	549,76	608,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	335,61	372,18	406,87	441,63	482,46	492,36	542,44	593,60
H	Transportasi dan Pergudangan	108,33	122,62	131,81	141,98	158,11	155,93	162,61	184,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155,86	177,07	196,53	213,79	236,94	231,43	232,01	253,50
J	Informasi dan Komunikasi	23,84	25,87	28,17	30,67	33,67	37,14	41,00	45,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,86	31,26	34,08	37,03	39,55	41,02	45,22	46,59
L	Real Estate	65,04	72,56	80,46	87,21	97,19	103,71	107,03	112,83
MN	Jasa Perusahaan	3,50	3,90	4,34	4,63	5,01	5,25	5,59	5,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	386,24	415,42	447,82	473,74	508,57	527,77	525,03	524,97
P	Jasa Pendidikan	27,89	30,95	33,78	36,57	40,36	43,33	45,56	45,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,24	19,57	21,33	23,54	26,67	27,73	27,73	28,56
RSTU	Jasa lainnya	2,25	2,56	2,86	3,18	3,59	3,66	3,78	4,23
	PDRB	3.143,84	3.442,52	3.751,63	4.085,20	4.434,72	4.542,85	4.755,23	5.166,25

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

Dari tabel di atas nampak bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 - 2022 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 39.14 persen. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB selama tahun 2015–2022 bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh lapangan usaha dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa perusahaan, jasa lainnya, pengadaan listrik dan gas, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Dominasi kontribusi lapangan usaha tersebut disebabkan meningkatnya kebutuhan akan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan, kebutuhan sarana komunikasi, baik dari sisi jenis maupun intensitas penggunaannya dan didorong oleh tumbuhnya sektor angkutan jalan raya, sektor jasa penunjang angkutan serta meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan raya yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut secara khusus sepeda motor. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman fungsi sepeda motor tidak sekedar untuk mempercepat mobilitas pengguna, melainkan juga dijadikan alat mempelancar segala urusan dan penggunaanya juga dapat menuju tempat-tempat yang sulit dijangkau. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya peranan keuangan, jasa perusahaan dan jasa-jasa dalam menunjang perekonomian kota serta didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat, kinerja sektor industri, maraknya perdagangan ritel di masyarakat serta kedatangan wisatawan domestik dan asing. Selain itu, beberapa sektor-sektor lain di luar sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi yakni seperti : sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mengakibatkan penurunan proporsi kontribusi sektor industri pengolahan dibandingkan dengan sektor lainnya.

2. Struktur Ekonomi

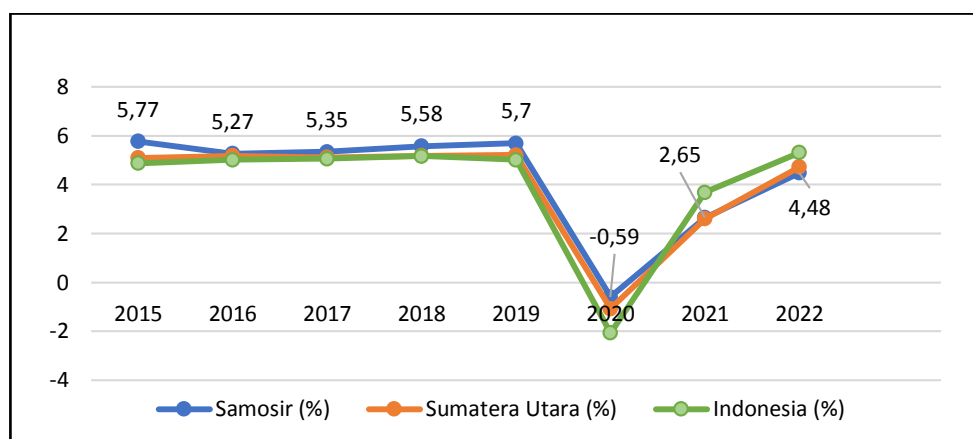
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2021 sedikit melambat dari pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 3,69% dengan besaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir sebesar 2,65% dan pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 2,61%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir ini didukung oleh pertumbuhan positif pada semua sektor ekonomi, di mana sektor informasi dan komunikasi dan sektor pertanian merupakan sektor yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,76% dibanding dengan sektor yang lain.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir dapat ditunjukkan oleh PDRB ADH Konstan. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan positif pada semua sektor ekonomi, di mana sektor bangunan merupakan sektor yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir sebesar 5,77% mengalami penurunan sebesar 2,34% dari tahun 2010 sebesar 8,11%. Kondisi paling ekstrim terjadi pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar -0,59 dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Laju pertumbuhan ekonomi secara Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2022

Wilayah	T A H U N							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Samosir (%)	5,77	5,27	5,35	5,58	5,70	-0,59	2,65	4,48
Prov. Sumatera Utara (%)	5,10	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Indonesia (%)	4,88	5,02	5,06	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

3. Laju Inflasi

Laju inflasi biasanya diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang atau jasa yang digunakan rumah tangga dalam suatu periode waktu.

Terjadinya inflasi tentu saja menurunkan daya beli masyarakat akan sebuah barang/jasa karena turunnya nilai uang yang mereka miliki. Oleh sebab itu, apabila terjadi inflasi, maka pemerintah akan segera mengambil tindakan untuk menangani hal ini. Indonesia sendiri pernah mengalami *hiperinflasi* di tahun 1960-an, di mana harga-harga naik begitu cepat dan nilai mata uang menurun secara drastis.

Pengendalian Inflasi Kabupaten Samosir dilakukan melalui kerjasama Pemerintah kabupaten Samosir dengan perwakilan Bank Indonesia Sibolga dalam rangka mewujudkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Samosir.

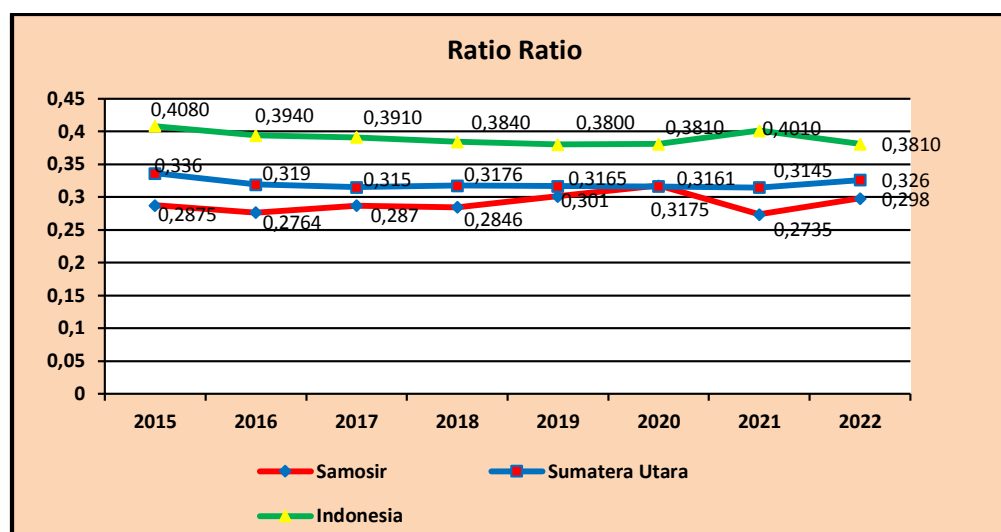
4. Indeks Gini

Peningkatan pendapatan dalam aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Tabel 2.28
Gini Ratio (Ketimpangan) Tahun 2015-2022

Wilayah	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Samosir	0,2875	0,2764	0,2870	0,2846	0,3010	0,3175	0,2735	0,2980
Prov. Sumatera Utara	0,3360	0,3190	0,3150	0,3176	0,3165	0,3161	0,3145	0,3260
Indonesia	0,4080	0,3940	0,3910	0,3840	0,3800	0,3810	0,4010	0,3810

Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 2.7. Gini Ratio (Ketimpangan) Tahun 2015-2022

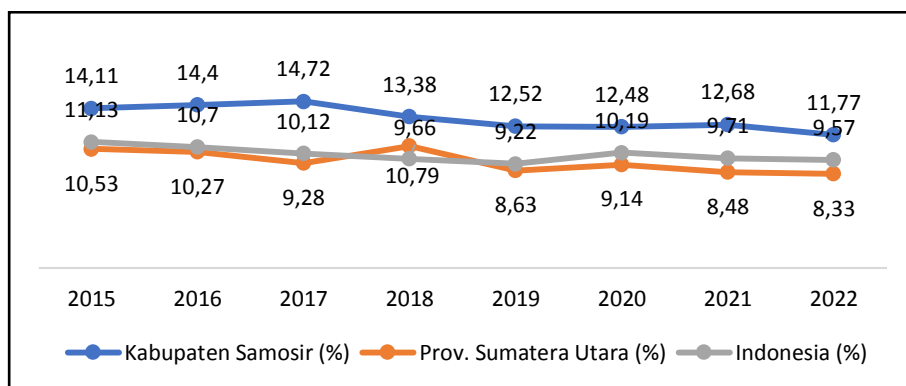
5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, yaitu dari 14,11 persen menjadi 14,72 pada tahun 2017. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir sejak tahun 2017 hingga 2022 mengalami penurunan, yaitu dari 18.430 jiwa (14,72 persen) pada tahun 2017 menjadi 14.970 jiwa (11,77 persen) pada tahun 2022 (terendah dalam 10 tahun terakhir). Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Samosir sejak tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 287.857,- perkapita per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp. 396.267,- per kapita per bulan pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Samosir dari tahun 2015 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2021

Wilayah	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Samosir (%)	14,11	14,40	14,72	13,38	12,52	12,48	12,68	11,77
Prov. Sumatera Utara (%)	10,53	10,27	9,28	10,79	8,63	9,14	8,48	8,33
Indonesia (%)	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

Sumber : BPS Kab. Samosir



Gambar 2.8. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2022

Sementara kemiskinan ekstrem di Kabupaten Samosir pada tahun 2021 sejumlah 4.800 jiwa (3,78%) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 2660 jiwa (2,09%) sesuai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kemenko PMK.

Tabel 2.30
Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021 dan 2022

Wilayah	Tahun	
	2021	2022
Kabupaten Samosir	3,78 (%) 4.800 jiwa	2,09 (%) 2.660 jiwa
Prov. Sumatera Utara	1,39 % 208.060 jiwa	1,41 % 212.810 jiwa

Sumber : P3KE

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

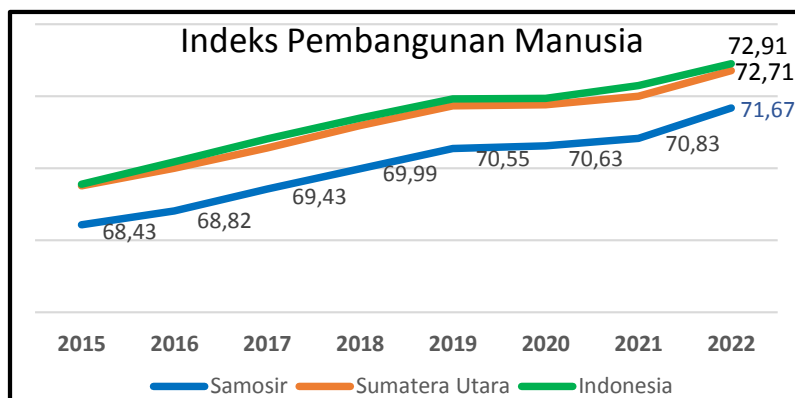
Indeks Pembangunan (IPM) digunakan untuk memperoleh dan mengakses pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup. Perhitungan IPM menggunakan metode baru yaitu disusun berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), angka Harapan Lama Sekolah (HLS) serta pengeluaran.

Angka melek huruf di Kabupaten Samosir selama tahun 2015 – 2022 menunjukkan peningkatan yakni tahun 2015 sebesar 98,21 meningkat menjadi 98,46 pada tahun 2022 walaupun pada tahun 2016 dan tahun 2019 mengalami penurunan namun pada tahun 2018 angka melek huruf tersebut meningkat lagi hingga pada tahun 2022, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2022

Wilayah	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Samosir	68,43	68,82	69,43	69,99	70,55	70,63	70,83	71,67
Sumatera Utara	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71
Indonesia	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

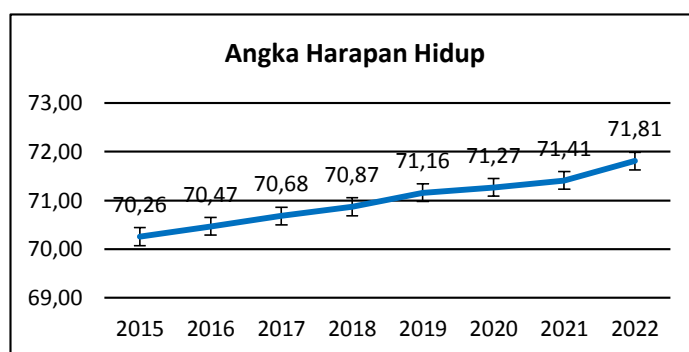
Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 2.9. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015 – 2022

1.a. Angka Harapan Hidup

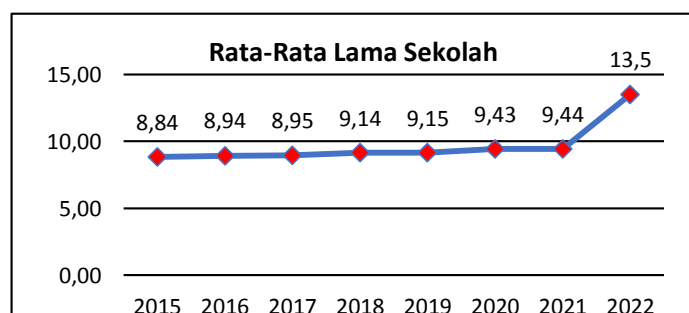
Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin tinggi nilai AHHnya maka semakin baik pula tingkat kesehatan masyarakat. Aspek kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup Kabupaten Samosir tahun 2022 adalah 71,81 dengan tren kenaikan dalam 8 tahun terakhir.



Gambar 2.10. Angka Harapan Hidup Tahun 2015-2022

1.b. Rata-Rata Lama Sekolah

Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah Kabupaten Samosir ada di angka 8,84 sedangkan pada tahun 2022 angka tersebut naik menjadi 13,5 hal ini menunjukkan perkembangan utama pendidikan di Kabupaten Samosir secara bertahap semakin naik. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Samosir mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh peningkatan infrastruktur, peningkatan rasio murid-guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik.



Gambar 2.11. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015-2022

Tabel 2.32
Rasio Murid-Guru di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Jenjang	PP 74/2008	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD	20	11	10,29	10,01	10,92	12	11	11	12
SMP	20	15	14,59	10,00	16,23	16	16	15	17
SMA	20	12	14,06	NA	15,51	15	17	17	19
SMK	15	10	10,63	NA	14,12	12	14	14	13

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Samosir

1.c. Pengeluaran Per Kapita Riil

PDRB per kapita dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Pendapatan per kapita riil mempengaruhi komponen indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir, sehingga komponen indikator IPM tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.33
Komponen IPM Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,26	70,47	70,68	70,87	71,16	71,27	71,41	71,81
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,84	8,94	8,95	9,14	9,15	9,43	9,44	13,5
3	Angka Melek Huruf	98,21	97,74	97,74	98,92	97,36	97,84	98,24	98,46
4	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (ribu rupiah)	7.698	7.813	8.163	8.348	8.654	8.422	8.504	8.991

2. Ketenagakerjaan

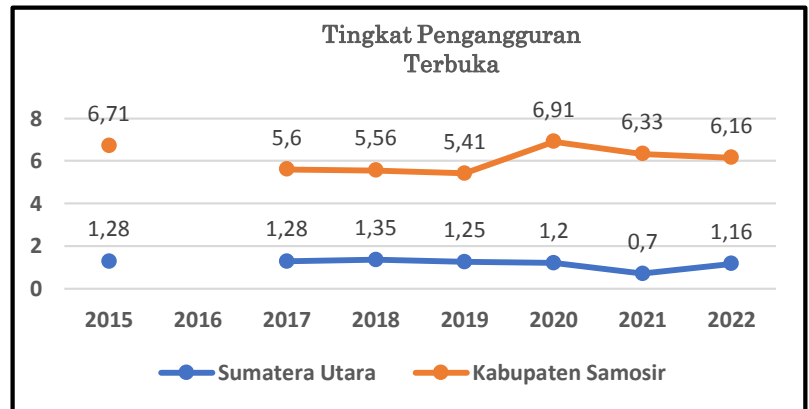
Penduduk Kabupaten Samosir yang termasuk usia produktif pada tahun 2015 sebanyak 71.150 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 86.582 jiwa. Tren kenaikan ini sebesar 21,69 %. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022, Angkatan kerja di Kabupaten Samosir adalah sebanyak 74.426 jiwa (98,84 persen). Angkatan kerja yang bekerja adalah sebanyak 73.560 jiwa dan yang menganggur adalah sebanyak 866 jiwa. Kemudian, penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja adalah sebanyak 14.634 jiwa (15,62 persen), yang terdiri dari penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Samosir tahun 2022 adalah sebesar 1,16 persen.

Tabel 2.34
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Samosir

No	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Angkatan Kerja	70.272	Na	72.182	67.897	66.999	45.588	74.458	74.426
1	Bekerja	69.373	Na	71.259	66.983	66.160	45.043	73.937	73.560
2	Penganggur	889	Na	923	914	839	545	521	866
II	Bukan Angkatan Kerja	9.237	Na	9.037	14.128	15.128	41.800	13.784	14.634

No	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Sekolah	3.391	Na	2.264	6.423	5.741	4.603	279	Na
	Mengurus Rumah Tangga	2.135	Na	4.279	5.570	6.398	32.863	3.223	Na
	Lainnya	3.711	Na	2.494	2.135	2.989	4.334	10.282	Na
	Jumlah Penduduk Usia Kerja	79.509	Na	81.219	82.025	82.127	87.388	88.242	89.060
	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	90,78	Na	88,87	88,00	82,78	52,7	84,38	83,57
	Tingkat Pengangguran terbuka	1,28	Na	1,28	1,35	1,25	1,2	0,7%	1,16

Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2022

Tabel 2.35

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Samosir

No	Status Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Berusaha sendiri tanpa Bantuan Orang lain.	6.995	-	6.175	8.903	10.011	5.741	9.859	12.187
2	Berusaha dibantu/buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.	19.729	-	24.701	21.602	20.412	14.526	23543	23.177
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.	1.622	-	1.350	805	1.176	773	906	1.184
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	9.651	-	12.279	10.934	11.678	5.531	11006	12.217
5	Pekerja Bebas di Pertanian	541	-	324	207	351	256	996	-
6	Pekerja bebas di non Pertanian	0	-	765	2.573	582	541	1136	579
7	Pekerja Keluarga tak dibayar.	30.835	-	25.665	21.959	21.950	17.675	26.491	24.216
	Jumlah	69.373	-	71.259	66.983	66.160	45.043	73.937	73.560

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Samosir dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh global. Pentingnya jati diri dan nilai-nilai daerah ini juga merupakan sebuah amanat yang tercantum baik dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun provinsi. Namun kondisi yang terjadi saat ini justru terdapat pemudaran nilai – nilai dan jati diri budaya daerah khususnya budaya Batak bagi Kabupaten Samosir. Nilai-nilai budaya Batak ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya adat istiadat dan kesenian Batak tetapi juga meliputi penggunaan Bahasa Batak sebagai bahasa daerah.

Perkembangan seni budaya dan olahraga berkorelasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tersebut. Adapun perkembangan sarana seni budaya dan olahraga di Kabupaten Samosir tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

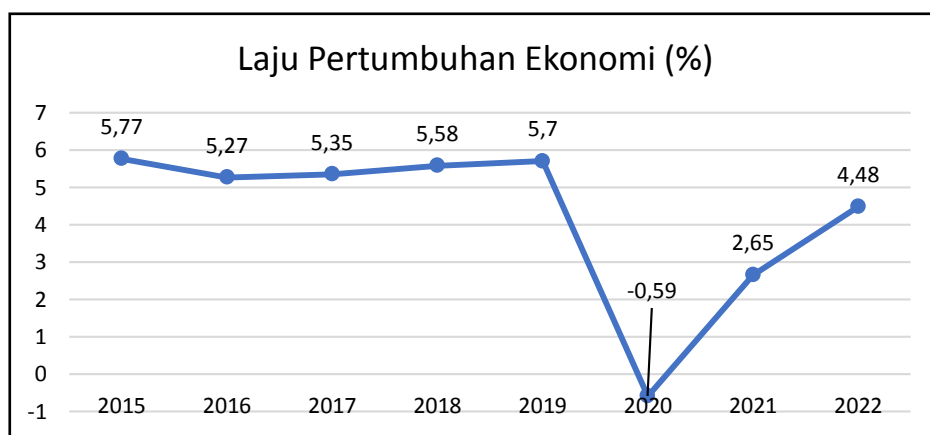
Tabel 2.36
Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah grup kesenian	33	33	33	38	48	55	61	65
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah sanggar seni	6	6	11	14	17	21	31	45
4.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	12	6	4	8	1	2	7
5.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	4	3	3	NA	3	3	3

Sumber : Dinas Budpar Kab. Samosir

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Samosir, capaian LPE Kabupaten Samosir mengalami Peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Menurunnya LPE Kabupaten Samosir ini dipengaruhi oleh Menguatnya perkembangan beberapa sektor kontributor PDRB. Apabila dilihat dari PDRB ADHB, 17 sektor PDRB memberikan kontribusi pertumbuhan yang positif dari tahun 2020-2022. Daya saing dapat berupa kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan SDM.



Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2015 -2022

2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran rata-rata konsumsi Rumah Tangga Per-Kapita Sebulan/Angka konsumsi rata-rata per kapita sebulan (Pangan dan Non Pangan)

Berdasarkan hasil survey nasional (susenas) tahun 2021-2022, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Samosir mengalami kenaikan, yaitu Rp. 1.124.111,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.243.086,- pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 10,58 %.

Penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran paling dominan pada komoditas makanan minuman sebesar 11,56 % yang disebabkan oleh naiknya harga komoditas makanan minuman yang menyebabkan tingginya pengeluaran perkapita, diikuti dengan komoditas rokok sebesar 8,97 %, komoditas padi-padian sebesar 8,06 %, komoditas ikan/udang/cumi/kerang sebesar 7,72 %, dan komoditas sayur-sayuran sebesar 5,14 %. Sementara itu pada kelompok non makanan, penduduk Kabupaten Samosir melakukan pengeluaran dominan pada komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga

sebesar 16,31 % diikuti komoditas aneka komoditas dan jasa sebesar 11,51 %, dan kooditas pajak, pungutan, dan asuransi sebesar 4,67%. Trend pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir untuk kelompok makanan dan non makanan tahun 2015-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022

Kelompok Komoditas	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan	403.900	479.816	517.579	536.260	566.094	613.178	682.177	710.636
Bukan Makanan	220.038	300.269	319.599	311.653	391.121	1.094.051	1.124.111	1.243.086

Sumber : BPS Kabupaten Samosir

2. Nilai Tukar Petani

Kabupaten Samosir belum memiliki data untuk NTP sehingga parameter yang digunakan adalah NTP di Provinsi Sumatera Utara dengan asumsi bahwa nilai NTP di Kabupaten Samosir akan memiliki tren yang mirip dengan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Nilai NTP Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebesar 121,73 yang artinya petani mengalami surplus dimana produksi naik lebih besar dibandingkan kenaikan harga konsumsinya.

Tabel 2.38
Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2022

No	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Diterima Petani	117,98	124,86	128,46	131,85	135,41	114,75	127,25	135,99
2	Indeks Dibayar Petani	119,64	124,63	129,24	134,56	138,06	104,48	106,88	111,72
3	Nilai Tukar Petani	98,60	100,19	99,39	97,98	98,80	109,82	119,05	121,73

2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja mencakup keahlian atau kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Kualitas juga mencakup pendidikan formal, bagaimana tenaga kerja bersikap serta berperilaku, dan lain sebagainya. Berikut dapat dilihat Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir dengan jenis pendidikan.

Tabel 2.39
Angkatan Kerja Kabupaten Samosir dengan jenis Pendidikan Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2022

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun			
	2010	2015	2020	2022
Tidak/belum pernah sekolah/Tidak belum Tamat SD/Sekolah Dasar	1.512	18.041	14.273	20.857
SMP	11.833	20.595	10.089	14.931
SMA	13.350	19.440	15.908	32.429
SMK	22.752	6.202		
Diploma I/II/III	23.229	1.660	5.318	6.209
Diploma IV/ Universitas	4.647	4.334		

2. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Pada tahun 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Samosir sebesar 60,93% artinya setiap 100 orang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 6 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi, beban tanggungan ini menurun sejak tahun 2015 sebesar 18%.

Tabel 2.40
Beban Rasio Tanggungan Penduduk Tahun 2015-2022

Tahun	Rasio Ketergantungan (%)
2015	73,98
2016	71,73
2017	73,02
2018	72,99
2019	72,78
2020	60,47
2021	60,81
2022	60,93

Sumber : data diolah

2.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur diperlukan untuk dapat menunjang daya saing suatu daerah. Ketersediaan fasilitas wilayah dan infrastruktur merupakan sarana penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan (*availability*) fasilitas wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat pula suatu daerah dalam menghadapi daya saing.

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan diukur untuk melihat aksesibilitas daerah di Kabupaten Samosir. Rasio ini merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Tabel 2.41
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Samosir 2016-2022

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan	Km	959,22	959,22	959,22	959,22	959,22	959,22	959,22
2	Jumlah Kendaraan								
	- Roda 4	Unit	1.725	2.066	2.539	2.801	3.006	1.974	1.793
	- Roda 2	Unit	7.586	7.852	9.162	9.450	9.630	9.751	7.859
	Jumlah	Unit	9.311	9.918	11.701	12.251	12.653	11.725	9.652
3	Rasio Panjang Jalan dan kendaraan	Unit/km	9,71	10,34	12,20	12,77	13,19	12,22	10,06

Sumber : Dinas PUTR Kab. Samosir

2. Luas wilayah banjir

Melihat dari kondisi geografis secara umum Kabupaten Samosir tidak memiliki wilayah rawan bencana banjir yang dapat menyebabkan genangan yang lebih dari 2 jam namun perlu diantisipasi terhadap bencana banjir bandang yang terjadi di kemiringan diatas 30°.

3. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Ketersediaan air bersih dilihat menggunakan indikator persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Kepmenkes Nomor 907 Tahun 2002).

4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Rasio elektrifikasi di Kabupaten Samosir tahun 2022 terdapat 973 rumah yang tidak menggunakan listrik yang bersumber dari PLN. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 33.829 KK (139.377 jiwa) masih terdapat 2,9% rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik (PLN).

2.4.4. Daya Saing Iklim Berinvestasi

Fokus iklim investasi dilakukan terhadap indikator jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan restribusi daerah, dan persentase desa status swasembada terhadap total desa.

1. Jumlah Demonstrasi

Banyaknya jumlah demonstrasi pada suatu daerah menunjukkan tingkat ketentraman dan kondusifitas daerah tersebut. Rendahnya angka demonstrasi menunjukkan stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah yang kondusif merupakan nilai tambah bagi suatu daerah untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi.

2. Lama Proses Perijinan

Untuk pengurusan perizinan di Kabupaten Samosir saat ini sudah lebih mudah dan prosesnya juga tidak terlalu lama. Untuk proses pengurusan izin tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.42
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Samosir 2015-2022

No	Uraian Jenis Peizinan	Lama Mengurus (Hari Kerja)								Jumlah Persyaratan (Dokumen)								Biaya Resmi (Rata-Rata Max rupiah)									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Izin Lokasi	3	3	10	10	5	-	-	-	9	9	13	13	2	-	-	-	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	-	-	-		
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3-12	3-12	10	10	5	5	5	35	6	6	9	9	11	11	11	10	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
3.	Izin Gangguan (HO)																										
a.	Kawasan Peruntukan Industri, Jasa, dan Perdagangan	3-12	3-12	10	-	-	-	-	-	7	7	7	-	-	-	-	-	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-		
b.	Kawasan Wisata	3-12	3-12	10	-	-	-	-	-	7	7	7	-	-	-	-	-	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-		
c.	Kawasan Pertanian	3-12	3-12	10	-	-	-	-	-	7	7	7	-	-	-	-	-	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-		
d.	Kawasan Permukiman	3-12	3-12	10	-	-	-	-	-	7	7	7	-	-	-	-	-	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-		

No	Uraian Jenis Peizinan	Lama Mengurus (Hari Kerja)								Jumlah Persyaratan (Dokumen)								Biaya Resmi (Rata-Rata Max rupiah)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3-4	3-4	10	10	5	5	5	-	7	7	7	7	3	3	3	-	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	-
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3-4	3-4	10	10	-	-	-	-	6	6	7	7	-	-	-	-	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	-	-	-	-	
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	GRATIS	GRATIS	GRATIS	-	
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	3-9	3-9	10	10	5	5	5	-	7	7	5	5	3	3	3	-	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	-
8.	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3-9	3-9	10	10	-	-	-	-	14	14	9	9	-	-	-	-	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	-	-	-	-	
10.	Izin Penyelenggaraan Reklame	3-10	3-10	10	10	5	5	5	10	8	8	9	9	9	9	9	9	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	GRATIS	Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
11.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (IPLC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Jumlah Izin (per jenis izin)																									

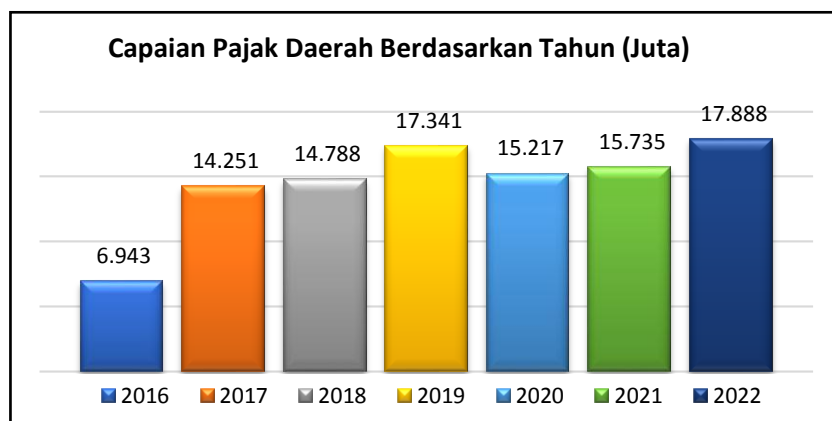
3. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Samosir selama kurun waktu 2015-2019 selalu menunjukkan tren yang positif. Selama periode tersebut pajak daerah Kabupaten Samosir tumbuh dengan rata-rata sebesar 21,43% per tahun. Adapun untuk pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 menurun hingga -11,08% yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat kala itu. Dalam situasi pandemi covid-19 di tahun 2021-2022 pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir kembali menunjukkan tren positif yang berdampak pada peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 2.43
Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Samosir Tahun 2016-2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total	9.887.311.387	17.483.831.904	19.806.722.398	21.796.861.056	19.623.030.135	20.456.024.755	24.355.868.315
I	Jumlah Pajak Daerah	6.943.224.706	14.251.800.169	14.788.292.148	17.341.320.511	15.217.530.845	15.735.327.338	17.888.266.809
1	Pajak Hotel	357.371.700	1.688.701.898	1.985.810.263	2.274.222.667	1.290.901.913	1.742.337.483	3.403.231.786
2	Pajak Restoran	675.503.830	1.232.705.884	1.263.675.867	1.528.753.335	1.080.662.397	1.183.092.554	1.366.713.622
3	Pajak Hiburan	2.500.000	222.924.250	236.379.600	321.073.500	75.770.400	360.916.500	919.482.980
4	Pajak Reklame	352.484.250	353.513.064	301.532.424	375.632.930	408.428.028	479.714.072	393.141.000
5	Pajak Penerangan Jalan	1.866.219.445	2.414.803.625	2.796.699.776	3.165.380.793	2.943.460.132	3.207.159.725	4.117.744.272
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.877.866.418	4.543.562.597	3.871.838.112	4.049.378.877	1.699.238.688	1.467.440.000	773.599.419
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	718.522.613	2.119.324.851	2.440.658.756	2.385.373.659	2.331.324.301	2.491.372.381	2.710.766.601
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.092.756.450	1.675.423.800	1.887.678.150	3.223.506.750	5.380.756.750	4.768.417.150	4.158.282.750
9	Pajak Parkir		840.200	4.019.200	17.998.000	6.196.800	18.047.000	37.252.400
10	Pajak Air Tanah					791.436	16.830.473	8.051.979
II	Jumlah Retribusi Daerah	2.944.086.681	3.232.031.735	5.018.430.250	4.455.540.545	4.405.499.290	4.720.697.417	6.467.601.506
1	Retribusi Jasa Umum	1.262.837.315	1.174.129.000	1.495.266.370	1.733.276.862	1.966.439.275	1.890.347.567	2.086.689.565
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	281.645.000	111.426.000	117.973.500	340.198.862	680.383.275	350.830.567	382.976.565
b	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	140.928.000	117.298.000	212.872.000	155.392.000	213.668.000	361.904.000	466.712.000
c	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	53.001.000	69.550.000	92.200.000	116.750.000	37.100.000	101.800.000	140.957.000
d	Retribusi Pelayanan Pasar	532.172.000	797.150.000	992.250.870	1.094.786.000	1.031.223.000	1.075.813.000	1.093.524.000
e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	36.980.000	63.825.000	79.970.000	22.760.000			
f	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	218.111.315	14.880.000					
g	Retribusi Pelayanan Tera Ulang				3.390.000	4.065.000		2.520.000
2	Retribusi Jasa Usaha	785.373.906	1.307.810.877	3.047.305.812	2.211.825.040	1.621.360.786	1.920.247.860	2.458.426.916
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	328.536.364	602.790.624	1.311.813.900	661.834.856	425.123.786	481.936.660	510.095.416
b	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	14.890.000	49.910.000	32.440.000	45.140.000	33.055.000	17.955.000	35.600.000
c	Retribusi Terminal	21.740.000	29.486.000	21.771.000	16.455.000	7.550.000	17.812.000	70.045.000
d	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.810.000	8.392.000	10.830.000	11.087.000	10.400.000	39.600.000	36.858.000
e	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.790.000	19.278.000	25.205.000	25.228.000	17.062.000	18.170.000	19.084.000
f	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	85.896.542	126.512.078	96.262.612	80.376.184	50.672.000	102.593.000	107.702.000
g	Retribusi Tempat Retribusi dan Hiburan Umum	270.888.000	365.896.000	1.460.610.000	1.197.734.000	970.128.000	1.125.760.000	1.603.959.500
h	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.823.000	105.546.175	88.373.300	173.970.000	107.370.000	116.421.200	75.083.000
3	Retribusi Perizinan Tertentu	895.875.460	750.091.858	475.858.068	510.438.643	817.699.229	910.101.990	1.922.485.025
a	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	174.610.823	173.722.758	402.985.767	505.968.643	817.699.229	910.076.990	1.921.300.025
b	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	950.000	750.000	775.000	950.000			
c	Retribusi Izin Gangguan	717.379.637	571.759.100	55.927.301				
d	Retribusi Izin Trayek	2.935.000	3.860.000	16.170.000	3.520.000		25.000	1.185.000
e	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Samosir



Gambar 2.14. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2022

Sedangkan jenis retribusi daerah yang menjadi bagian Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir meliputi : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun proporsi nilai retribusi daerah dalam realisasi PAD Kabupaten Samosir tahun 2015-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.15. Realisasi Retribusi Kabupaten Samosir Tahun 2016-2022

4. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pada tahun 2022, Kabupaten Samosir memiliki 103 desa/kelurahan swadaya. Desa/kelurahan berstatus swasembada di Kabupaten Samosir tertinggi tahun 2018 yaitu 4 Desa/Kelurahan. Dari tahun 2019-2022 terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2022 tidak ada desa yang swasembada di Kabupaten Samosir.

Tabel 2.44
 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Samosir
 Tahun 2015-2022

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya	-	-	26	57	68	74	77	103
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	-	-	16	21	16	11	24	3
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	-	-	1	4	2	1	3	0
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	-	-	43	82	86	86	104	106
5.	Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	-	-	2,30%	4,87%	2,32%	1,16%	2,88%	0,00%

Sumber : Dinsos PMD

2.5 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Aspek pelayanan umum dibagi ke dalam 2 (dua) fokus yaitu fokus layanan urusan pemerintah wajib dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

2.5.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan pendidikan yang tinggi akan menjadi modal bagi pembangunan daerah. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai. Gambaran umum yang menunjang indikator kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Samosir dalam urusan pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan data badan Pusat Statistik, peluang paling besar untuk mengakses pendidikan adalah pada jenjang SD/ sederajat dimana angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 103,5% pada tahun 2021. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, APS untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat yaitu sebesar 99,67%. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Samosir adalah 13,5 tahun atau setara dengan kelas 1 SMU. Pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat, terdapat penurunan yang cukup signifikan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun. APS pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebesar 106,94% yang artinya semua total jumlah penduduk usia 16-18 tahun berpartisipasi pada pendidikan formal tingkat SMA/ sederajat.

Angka partisipasi sekolah ini juga dipengaruhi oleh Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Dalam Pasal 6 ayat (1) aturan ini mensyaratkan calon peserta didik baru kelas 1 SD/ bentuk lain yang sederajat, berusia tujuh tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Samosir
Tahun 2015-2022

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. SD/MI										
1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	Orang	19.649	19.385	19.088	19.084	19.061	18.718	18.454	18.307
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 tahun	Orang	17.592	17.696	17.844	17.980	17.992	18.047	17.907	NA
3.	APS SD/MI	Indeks	111,69	109,54	106,97	106,14	105,94	103,72	103,05	NA
II. SMP/MTs										
1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Orang	17.592	17.696	17.844	17.980	17.992	18.047	17.907	NA
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	111,69	109,54	106,97	106,14	105,94	103,72	103,05	NA
3.	APS SMP/MTs	Indeks	17.592	17.696	17.844	17.980	17.992	18.047	17.907	NA
III. SMA/MA										
1.	Jumlah murid usia 16-18 tahun	Orang	7.507	7.713	na	7.349	7.808	8.166	8.395	8.438
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Orang	7.816	7.695	7.656	7.636	7.598	7.836	7.850	NA
3.	APS SMA/MA	Indeks	96,05	100,23	0,00	96,24	102,76	104,21	106,94	NA

Sumber : Dinas Dikpora Kab. Samosir

Pada tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Samosir dengan penduduk usia 7-12 tahun sebesar 116,05 % untuk tingkat SD, sedangkan untuk tingkat SMP dengan jenjang umur 13-15 tahun sebesar 96,03% serta untuk tingkat SMA dengan jenjang usia 16-18 tahun sebesar 97,8%.

Sedangkan APM SD mencapai 99,86 persen artinya sekitar 99,86 persen penduduk usia 7-12 tahun. APM SMP lebih kecil dari APM SD yaitu mencapai nilai 90,69 persen, artinya sekitar 90,69 persen penduduk usia 13-15 tahun bersekolah sesuai jenjangnya yaitu berumur 13-15 tahun dan duduk dibangku SMP. APM SMA mencapai 84,84 persen artinya sekitar 84,84 persen penduduk usia 16-18 tahun bersekolah di jenjang yang sesuai waktunya.

Tabel 2.46
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD	116,75	114,55	118,37	112,89	117,62	117,57	116,54	116,05
SMP	101,27	94,18	93,66	99,62	99,69	98,31	99,47	96,03
SMA	67,34	94,21	94,74	88,56	93,14	93,39	96,16	97,8
PT	9,56	12,70	9,58	4,76	15,05	16,43	13,18	Na

Sumber : BPS Kab. Samosir

Tabel 2.47
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD	92,06	100,00	97,22	99,66	99,57	99,39	99,32	99,86
SMP	80,27	90,36	79,12	90,80	91,58	90,92	91,51	90,69
SMA	76,60	78,58	67,05	82,60	81,78	81,86	86,99	84,84
PT	18,32	19,33	20,67	4,76	3,60	0,86	8,84	Na

Sumber : BPS Kab. Samosir

b. Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah

Berdasarkan SPM pendidikan dasar, minimal tersedia 1 (satu) orang guru SD/MI untuk setiap 32 peserta didik. Selama kurun waktu 2015-2022, rasio guru/murid untuk jenjang SD/MI cenderung stabil. Pada tahun 2015, ketersediaan guru SD/MI di Kabupaten Samosir yaitu sebanyak 909 guru per 10.000 siswa SD, paling tinggi dibandingkan ketersediaan guru di jenjang pendidikan lainnya. Rasio guru/murid untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA di Kabupaten Samosir dari tahun 2015-2022 tidak banyak mengalami perubahan dan cenderung stabil, hal ini dimaknai dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memenuhi hak untuk bersekolah.

Tabel 2.48
Rasio guru dan murid serta rasio sekolah dengan murid

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	SD								
1	SEKOLAH	203	203	203	203	203	194	195	195
2	GURU	1.819	1.884	1.907	1.748	1530	1720	1.705	1.565
3	MURID	19.649	19.385	19.088	19.084	19.061	18.718	18.454	18.307
4	Rasio Guru dan Murid	1 : 11	1 : 10	1 : 10	1 : 11	1 : 12	1 : 11	1 : 11	1 : 12
5	Rasio Ketersediaan Sekolah	1 : 97	1 : 95	1 : 94	1 : 94	1 : 94	1 : 96	1 : 95	1 : 94
II	SMP								
1	SEKOLAH	34	34	34	34	34	34	34	35
2	GURU	653	649	735	589	585	599	621	579
3	MURID	9.526	9.468	9.556	9.560	9.686	9.727	9.656	9.707
4	Rasio Guru dan Murid	1 : 15	1 : 15	1 : 13	1 : 16	1 : 17	1 : 16	1 : 16	1 : 17
5	Rasio Ketersediaan Sekolah	1 : 280	1 : 278	1 : 281	1 : 281	1 : 285	1 : 286	1 : 284	1 : 277
III	SMA								
1	SEKOLAH	15	15	15	14	12	14	13	13
2	GURU	414	377	320	320	357	346	357	335
3	MURID	5.033	5.300	Na	4.962	5.439	5.802	6.030	6.188
4	Rasio Guru dan Murid	1 : 12	1 : 14	Na	1 : 16	1 : 15	1 : 17	1 : 17	1 : 18
5	Rasio Ketersediaan Sekolah	1 : 336	1 : 353	Na	1 : 354	1 : 453	1 : 414	1 : 464	1 : 476
IV	SMK								
1	SEKOLAH	7	7	7	7	7	7	7	7
2	GURU	245	227	168	169	206	170	167	170
3	MURID	2.474	2.413	Na	2.387	2.369	2.364	2.365	2.250
4	Rasio Guru dan Murid	1 : 10	1 : 11	Na	1 : 14	1 : 12	1 : 14	1 : 14	1 : 13
5	Rasio Ketersediaan Sekolah	1 : 353	1 : 345	Na	1 : 341	1 : 338	1 : 338	1 : 338	1 : 321

Sumber : Disdikpora Kab. Samosir

c. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kualitas dalam pembangunan di bidang pendidikan. Di Kabupaten Samosir, angka putus sekolah terbilang cukup rendah di semua jenjang bahkan tidak mencapai 1%. Pada tahun 2022, angka putus sekolah SD/MI hanya sebesar 0,05% sementara angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs adalah sebesar 0,05%.

Tabel 2.49
Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang di
Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Angka Putus Sekolah	Tahun (%)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	Na	Na	Na
SMP/MTs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Na	Na	Na
SMA/SMK/MA	0,10	0,09	tidak menjadi kewenangan					

Sumber : Dinas Dikpora Kab. Samosir

2. Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Samosir, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi daerah Kabupaten Samosir terkait urusan kesehatan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Tahun 2015-2022 jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Samosir sejumlah 2 unit yaitu Rumah Sakit dr. Hadrianus Sinaga (RSUD) yang berada di Kecamatan Pangururan dan Rumah Sakit HKBP di Kecamatan Nainggolan, namun sejak 2021 rumah sakit tersebut tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya.

Tabel 2.50
Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Rumah Sakit Propinsi	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1	1	0	0
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2	2	2	2	2	2	1	1
	Jumlah Penduduk	123.789	124.496	125.099	125.816	126.188	136.441	137.696	139.337
	Rasio	2 : 61895	2 : 62248	2 : 62550	2 : 62908	2 : 63094	2 : 68221	1 : 137.696	1 : 139337

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Samosir

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Pada tahun 2022, Kabupaten Samosir memiliki 230 unit posyandu terdaftar yang melayani 9.490 jiwa balita. Rasio posyandu terhadap balita di Kabupaten Samosir adalah sekitar 1:41 yang berarti satu unit posyandu di Kabupaten Samosir melayani sekitar 41 balita usia 0-5 tahun. Dengan kata lain setiap posyandu yang ada di Kabupaten Samosir melayani 41 balita yang sama setiap bulan dalam setahunnya. Dari segi ketercukupan pelayanan minimal, jumlah posyandu di Kabupaten Samosir telah memenuhi standar minimal untuk kebutuhan posyandu.

Tabel 2.51
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	213	212	223	227	223	229	230	230
2	Jumlah Balita 0-5 tahun	12.016	11.863	11.765	10.774	11.000	10.222	9.870	9.490
3	Rasio Posyandu dengan jumlah balita 0-5 tahun	56,41	55,96	52,76	47,46	49,33	44,64	42,91	41,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Samosir

c. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan penduduk

Tahun 2015 jumlah sarana kesehatan sebanyak 357 unit meningkat menjadi 436 unit pada tahun 2022 hal ini diakibatkan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan sarana kesehatan tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.52
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Puskesmas	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Poskesdes	62	62	75	62	62	66	62	66
3	Pustu	34	34	31	33	33	34	34	34
4	Posyandu	212	212	223	227	229	197	229	230
5	Polindes	21	21	48	66	66	68	68	68
6	Praktek Dokter	6	7	7	18	11	11	16	17
7	Klinik Umum	3	3	3	7	7	7	7	8
8	Balai Pengobatan Swasta	5	5	5	-	-	-	-	-
TOTAL		357	358	406	426	421	396	429	436
9	Jumlah Penduduk	123.789	124.496	125.099	125.816	126.188	136.441	137.696	139.337
	Rasio Puskesmas	1 : 10316	1 : 10375	1 : 10425	1 : 10485	1 : 10516	1 : 11370	1 : 11475	1 : 11611
10	Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9	9	9	9
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	1 : 0,75	1 : 0,75	1 : 0,75	1 : 0,75	1 : 0,75	1 : 0,75	1 : 0,75	1 : 0,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Samosir

d. Rasio tenaga medis/dokter per satuan penduduk

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2025 diantaranya rasio dokter spesialis 12 per 100.000 penduduk; dokter umum 50 per 100.000 penduduk.

Kondisi 2022 Rasio tenaga dokter spesialis 19 per 139.337 penduduk sedangkan rasio dokter umum ada di angka 31,58 per 100.000. Untuk rasio dokter gigi di Kabupaten Samosir berada di angka 11,48 per 100.000. Untuk lebih detailnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.53
Rasio Tenaga Medis/Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2022

No	Uraian	dr. Spesialis	dr. Umum	dr. Gigi	Total Tenaga Medis
1	Di Puskesmas	-	33	15	48
2	Di RS	19	11	1	31
3	Jumlah Tenaga	19	44	16	79
4	Jumlah Penduduk	139.337			
5	Rasio Tenaga Medis/ Dokter	19 : 158.333	31,58/100.000	11,48/100.000	

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Hadrianus Sinaga Kab. Samosir

e. Jumlah kematian ibu dan balita

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Samosir cenderung kecil dan dapat dikendalikan dari tahun 2015 hingga 2022. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Angka kematian bayi/*Infant Mortality* yang terjadi di Kabupaten Samosir berada di angka 14 kasus sedangkan kelahiran ada di angka 1.718 kelahiran.

Tabel 2.54
Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, Jumlah Persalinan Medis dan Non Medis Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus kematian ibu	0	2	2	3	2	2	3	3
2.	Jumlah kasus kematian balita	36	34	39	28	17	22	19	14
3.	Jumlah Persalinan Medis	2.236	2.187	2.141	1.928	1.935	1.871	1786	1714
4.	Jumlah Persalinan Non Medis	4	8	15	11	0	9	12	4

Nilai normatif AKB adalah: | 1. 70 sangat tinggi, | 2. 40 – 70 tinggi, | 3. 20-39 sedang, | 4. <20 rendah.

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Samosir

f. Jumlah balita gizi baik dan Angka Stunting

Status gizi baik pada balita perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Apabila status gizi balita buruk, maka akan menghambat pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berfikir yang tentu akan berpengaruh pada penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu, balita adalah aset yang perlu dipelihara mengingat usia balita adalah usia dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.

Tabel 2.55
Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Balita Gizi Baik	10.767	10.006	10.278	9.916	9.056	7.415	8511	8490
2	Balita Gizi Buruk	8	14	6	10	19	9	7	7
3	Balita Gizi Kurang	218	229	262	220	300	310	185	259
4	Balita Gizi Lebih	100	70	60	65	78	102	150	157
5	Balita Stunting	NA	NA	NA	1.320	1.122	1.110	1.233	952
6	Balita Seluruhnya (Usia 0-5 tahun)	12.016	11.863	11.765	11.204	11.000	10.222	9.870	9.490
	a) Gizi Baik (%)	89,61	83,76	86,85	85,76	81,62	86,06	85,63	88,84
	b) Gizi Buruk (%)	0,007	0,12	0,05	0,09	0,17	0,09	0,07	0,07

Sumber : Dinkes Kab. Samosir

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan prasarana dan sarana merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyediaannya juga merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diprioritaskan adalah infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, taman-taman (Ruang Terbuka Hijau), pendidikan, kesehatan, dan perumahan permukiman. Implementasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan daerah ini relatif

berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai kualitas infrastruktur kota, walaupun demikian belum sepenuhnya diwujudkan secara optimal.

a. Panjang jaringan jalan

Ketersediaan prasarana jalan menurut kelasnya menunjukkan perlunya pengaturan penggunaan jalan agar lalu lintas dapat diperlancar dengan memperhatikan jenis angkutan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terbesar dan dimensi kendaraan bermotor. Banyaknya kategori jalan kelas III menunjukkan bahwa secara umum jalan-jalan di Kabupaten Samosir hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 1.200 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

Jaringan infrastruktur yang baik dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Samosir, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. Kondisi jalan di Kabupaten Samosir berdasarkan statusnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56
Panjang jalan kondisi baik di Kabupaten Samosir tahun 2022

No.	Status Jalan	Panjang Jalan (km)	Panjang Jalan dalam Kondisi	
			Baik (km)	Rusak (km)
1.	Negara	188	188	0
2.	Provinsi:			
	- Sp. Gonting – Janji Raja	42,58	9,1	33,48
	- Simarmata – Sp. Sinapuran	13,87	0	13,87
	- Palipi - Parmonangan	18	2	16
3.	Jalan Kabupaten	771,22	430,26	340,96

Sumber : Dinas PUTR Kab. Samosir

b. Jumlah Jembatan

Kondisi jembatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2017 perihal penetapan status ruas-ruas jalan dan jembatan sebagai jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebanyak 2 unit, rusak ringan sebanyak 91 unit, rusak sedang sebanyak 2 unit, rusak berat sebanyak 2 unit dan kondisi kritis sebanyak 8 unit dan saat ini ada jembatan yang sudah runtuh sebanyak 1 unit.

Tabel 2.57
Kondisi jembatan di Kabupaten Samosir tahun 2022

No	Kondisi	Jumlah (unit)	Persentase
1	Baik	2	1,9
2	Rusak Ringan	91	85,8
3	Rusak Sedang	2	1,9
4	Rusak Berat	2	1,9
5	Kritis	8	7,5
6	Runtuh	1	0,9
	TOTAL	106	

Sumber : Dinas PUTR Kab. Samosir (diolah)

c. Kondisi Jaringan Irigasi

Pada tahun 2022, panjang jaringan irigasi Kabupaten Samosir sepanjang 148.439 m dengan rincian panjang irigasi teknis 98.695 m dan panjang jaringan irigasi non teknis 49.744 m. Ditinjau dari persentasenya, 33,51% jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Samosir merupakan jaringan irigasi non teknis. Melihat dari kondisi DI Rianiate merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dimana hanya 10% dalam kondisi baik di ikuti oleh D.I Nainggolan Parhusip 48% dalam kondisi baik. Hal ini akan berdampak pada kinerja jaringan irigasi dan produktivitas lahan pertanian. Untuk lebih jelas, kondisi jaringan irigasi dari tahun 2015-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Kondisi jaringan irigasi Kabupaten Samosir tahun 2022

NO	Nama Daerah Irigasi	Panjang Jaringan (m)		Luas (Ha)	Kondisi	Nilai Kondisi (%)
		Teknis	Non Teknis			
1.	D.I Limbong	6509	2290	195	RS	70,55
2.	D.I Silimbat	7003	2592	50	RB	57,14
3.	D.I Siguluan	6445	3405	322	RS	64,08
4.	D.I Sitete	4666	74	107	RS	70,73
5.	D.I Silubung	1967	398	37	RS	75,96
6.	D.I Siugan-ugan	4567	352	135	RB	57,75
7.	D.I Hairi Gorat	2549	3353	130	RS	60,77
8.	D.I Lontung/Aek Natonang	5367	9952	146	RS	65,75
9.	D.I Aek Siboras	5507	874	100	RS	62,78
10.	D.I Siriaon Buhit	3744	606	165	RS	63,07
11.	D.I Nainggolan Parhusip	2333	503	96	RB	48
12.	D.I Tamba	9374	5649	72	RS	63,2
13.	D.I Rianiate	855	6345	122	RB	10
14.	D.I Sihotang	6918	3492	250	RS	60,43
15.	D.I Hairi	1959	356	100	RS	63,05
16.	D.I Sibong-bong Siriaon	1719	958	97	RB	50,24
17.	D.I Sigumbang	5505	1064	111	RB	56,43
18.	D.I Sisogot	2283	652	75	RS	61,37
19.	D.I Binanga Aron	7567	438	240	RS	71,47
20.	D.I Pangasean	11858	6391	60	RS	61,71
TOTAL		98695	49744	2.610		59,724%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Samosir

d. Persentase bangunan ber-IMB per seluruh bangunan

Bangunan di Kabupaten Samosir masih dominan belum memiliki IMB karena bangunan yang ada masih didominasi bangunan rumah adat daerah yakni “*Rumah Bolon*” dan banyaknya masyarakat yang membangun tempat tinggalnya tidak mengurus izin pembangunannya. Dari tahun 2015-2022, jumlah bangunan yang mengurus IMB paling banyak terdapat pada tahun 2019 yakni sebanyak 196 unit dan paling sedikit yang mengurus IMB terdapat pada tahun 2022 yakni sebanyak 36 unit.

Tabel 2.59
Jumlah bangunan ber-IMB Kabupaten Samosir tahun 2015 - 2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Bangunan	30.455	30.629	31.226	31.381	31.583	34.073	34.384	35.444
2	Jumlah Bangunan ber- IMB	60	70	64	103	196	175	152	36
3	Rasio bangunan ber-IMB (1/2 * 100)	0,20	0,23	0,20	0,33	0,62	0,51	0,44	0,10

Sumber : Dinas PUTR Kab. Samosir

e. Rasio permukiman layak huni dan rasio rumah layak huni

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Sebagai data dasar, terdapat 6.436 unit rumah tidak layak huni. Sejak tahun 2017 hingga 2022 ada 3.381 unit rumah tidak layak huni yang telah ditangani sehingga menyisakan 3.055 unit rumah yang belum ditangani dan akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir dalam penuntasannya dengan rincian RTLH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Jumlah RTLH yang ditangani Kabupaten Samosir tahun 2015 - 2022

Tahun	Jumlah RTLH yang Ditangani (unit)	Jumlah RTLH di Kabupaten Samosir (unit)
2015	Na	Na
2016	Na	6.436
2017	149	6.287
2018	368	5.919
2019	1.341	4.578
2020	571	4.007
2021	662	3.345
2022	290	3.055

Sumber : Dinas PUTR Kab. Samosir

f. Persentase rumah tangga berakses air bersih dan sanitasi layak

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang adalah persentase penduduk berakses air bersih dan sanitasi layak. Persentase rumah tangga berakses air bersih dan sanitasi layak tahun 2016 sebesar 36,40% dan mengalami peningkatan sebesar 16,45 poin di tahun 2022 menjadi 52,85%. Capaian tahun 2022 tersebut belum memenuhi target SPM urusan perumahan rakyat dengan jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 55% dengan rincian penggunaan air bersih dan sanitasi tersebut seperti tabel berikut:

Tabel 2.61
Persentase pengguna air bersih dan sanitasi
Kabupaten Samosir tahun 2016 - 2022

Tahun	Pengguna Air Bersih dan Sanitasi Layak (%)
2016	36,40
2017	44,49
2018	52,21
2019	49,51
2020	55,68
2021	52,39
2022	52,85

Sumber : Dinar PUTR Kab. Samosir

4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Samosir terkait urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) di Kabupaten Samosir

Berdasarkan SPM yang tertuang dalam Permendagri No 62 Tahun 2008, pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Samosir selama kurun waktu 2015-2022 baru mencapai 30%. Sementara itu, standar yang ditetapkan Permendagri No 62 Tahun 2008 adalah cakupan pelayanan minimal 75%. Kabupaten Samosir memiliki 9 (sembilan) wilayah manajemen kebakaran (WMK) berdasarkan kecamatan, dengan setiap WMK minimal mempunyai 1 Pos Damkar. Pada tahun 2015, Kabupaten Samosir baru memiliki 3 (tiga) Pos Damkar yang berada di Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Simanindo. Total jumlah mobil kebakaran yang ada di Kabupaten Samosir pada tahun 2016 adalah sebanyak 4 (empat) unit. Dari 4 unit mobil tersebut yang beroperasi dan masih laik pakai ada 3 mobil operasional pemadam kebakaran sedangkan 1 unit tidak dapat beroperasi lagi karena sudah tidak laik fungsi. Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan kebakaran belum diatur di Kabupaten Samosir Padahal, menurut standar yang ditetapkan Permendagri No 62 Tahun 2008, response time rate standar adalah 15 menit.

b. Jumlah kejadian bencana kebakaran

Kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Samosir delapan tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 52 kasus sedangkan paling sedikit kejadian kebakaran terjadi pada tahun 2015. Untuk bencana lainnya yang paling banyak terjadi pada tahun 2018 yaitu bencana banjir sebanyak 14 kasus dan bencana longsor 19 kasus, hal ini menunjukkan kondisi hulu sungai yang tidak sanggup menyerap dan menahan air akibat adanya penebangan tegakan dan alih fungsi lahan menjadi perhutani sosial.

Tabel 2.62
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Kejadian Kebakaran KARHUTLA	Jumlah Kejadian Kebakaran Permukiman/Rumah	Total Jumlah Kejadian Kebakaran	Jumlah Bencana Banjir	Jumlah bencana puting beliung	Jumlah bencana longsor
2015	0	16	16	2	7	1
2016	40	12	52	2	11	1
2017	8	14	22	0	6	1
2018	29	13	42	14	0	19
2019	5	17	22	2	2	6
2020	32	15	47	1	1	4
2021	15	25	40	0	2	4
2022	25	16	41	5	7	6

Sumber : BPBD Kab. Samosir

5. Sosial

Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatnya prasarana dan sarana kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang sosial diantaranya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan persentase PMKS yang ditangani mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 7 persen dari tahun 2021 yakni 50 persen menjadi 57 persen pada tahun 2022, persentase korban bencana yang akan dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 100 persen pada tahun 2022, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta

lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial meningkat menjadi 68 persen pada tahun 2022 dari 20 persen pada tahun 2021. Indikator kinerja terkait urusan sosial di daerah Kabupaten Samosir dapat dilihat sebagai berikut :

a. Penanganan PMKS Fakir Miskin

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa fakir miskin menjadi tanggungjawab pemerintah, sejak tahun 2015 pemerintah semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial fakir miskin. Di tahun 2021 terdapat 14.970 PMKS fakir miskin dan persentase yang telah ditangani oleh pemerintah adalah sebesar 82%. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menangani PMKS dari tahun 2015 dapat menurunkan PMKS fakir miskin dari tahun 2017 sejumlah 18.430 dan pada tahun 2022 sudah mengalami penurunan sebesar 23,11%.

Tabel 2.63
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin
di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah PMKS FM yang Tertangani	Jumlah PMKS FM yang Ada	Penanganan PMKS FM (%)
2015	9.840	17.680	56%
2016	9.848	18.010	55%
2017	15.028	18.430	82%
2018	13.638	16.810	81%
2019	12.747	15.790	81%
2020	12.609	15.800	80%
2021	12.210	16.080	76%
2022	12.308	14.970	82%

Sumber : Dinsos PMD Kab. Samosir

b. Penanganan PMKS Anak Terlantar

Selain bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memelihara anak terlantar. Sama halnya dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, pemerintah juga semakin serius dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak terlantar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah PMKS anak terlantar yang ditangani terhadap total PMKS anak terlantar yang ada di Kabupaten Samosir. Pada tahun 2022, pemerintah telah menangani 62 anak terlantar atau 82% dari total keseluruhan anak terlantar yaitu 76 anak.

Tabel 2.64
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Tertangani	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang Ada	Penanganan PMKS Anak Terlantar (%)
2015	n/a	n/a	-
2016	n/a	n/a	-
2017	6	54	11%
2018	7	54	13%
2019	21	153	14%
2020	45	216	21%
2021	78	113	69%
2022	62	76	82%

Sumber : Dinsos PMD Kab. Samosir

c. Jumlah sarana sosial

Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menyediakan sarana sosial, seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi. Untuk unit panti asuhan, terdapat 1 panti asuhan sampai dengan tahun 2022. Sementara itu panti rehabilitasi pada tahun 2015-2022 mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Samosir.

Tabel 2.65
Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Panti Asuhan	Panti Jompo	Panti Rehabilitasi
2015	1	-	3
2016	1	-	3
2017	1	-	3
2018	1	-	2
2019	1	-	2
2020	1	-	2
2021	1	-	2
2022	1	-	2

Sumber : Dinsos PMD Kab. Samosir

2.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non - Pelayanan Dasar

Kondisi daerah untuk bidang urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak termasuk ke dalam pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah serta penanaman modal.

1. Tenaga Kerja

a. Rasio daya serap tenaga kerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja, dengan demikian jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi. Oleh karena sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan suatu daerah, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2015-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022 (Jiwa)

Kegiatan Utama	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	70.272	NA	72.182	67.897	66.999	45.588	74.458	74.462
Bekerja	69.373	NA	71.259	66.983	66.160	45.043	73.937	73.560
Pengangguran	899	NA	923	914	839	545	521	866
Persentase Bekerja (%)	98,72	NA	98,72	98,65	98,75	98,80	99,30	98,79

Sumber : Diskopnakerindag Kab. Samosir

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2015 sebesar 88,38 persen menurun menjadi 52,17 persen pada tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan pada Tahun 2022 sebesar 83,57 persen akibat dampak meredanya pandemi covid-19 dan keberhasilan kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

Tabel 2.67

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2022

DAERAH	TAHUN							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	83,89	NA	84,23	75,22	77,08	65,68	77,38	69,23
Perdesaan	89,05	NA	89,66	84,25	82,52	49,45	85,82	86,78
TPAK	88,38	NA	88,87	82,87	81,68	52,17	84,38	83,57
JENIS KELAMIN								
Laki-Laki	90,62	NA	92,51	86,89	83,24	46,51	84,95	85,49
Perempuan	86,27	NA	85,43	78,96	80,19	57,67	83,82	81,69
TPAK	88,38	NA	88,87	82,87	81,68	52,17	84,38	83,57

Sumber : BPS Sakernas, diolah

Tabel 2.68

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Tahun 2015-2022

GOLONGAN UMUR	TAHUN							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15-19	72,32	NA	78,93	44,15	45,04	54,29	62,64	59,17
20-24	98,92	NA	89,27	90,46	98,43	47,66	78,38	87,74
25-29	100,00	NA	92,27	94,65	82,86	47,72	87,32	95,64
30-34	94,75	NA	95,16	87,56	91,61	42,73	95,75	94,03
35-39	100,00	NA	93,20	98,71	96,04	43,18	94,20	94,65
40-44	98,42	NA	100,00	97,26	95,74	39,83	98,18	94,47
45-49	97,47	NA	98,55	96,81	93,02	47,41	95,78	99,18
50-54	95,82	NA	95,53	94,17	95,96	54,46	98,37	93,93
55-59	92,27	NA	93,08	89,21	95,21	51,34	97,50	92,74
60-64		NA	88,40	88,91	66,99	79,15	88,95	84,41
65+		NA	62,84	66,04		61,88	59,64	56,04
TPAK		NA	88,87	82,87	81,68	52,17	84,38	83,57

Sumber : BPS Kab. Samosir

Tabel 2.69

Tingkat partisipasi Angkatan kerja menurut Pendidikan tahun 2015-2022

Pendidikan	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
≤ SD	78,79	82,51	77,47	77,12	77,12	57,66	82,61	76,40
SMTp	86,70	87,36	67,68	68,99	68,99	54,27	74,43	77,61
SMTA Umum	97,31	94,03	93,56	92,07	92,07	45,03	88,41	88,92
SMTA Kejuruan	97,75	96,45	93,21	87,04	87,04	53,41	90,66	93,26
DIPLOMA I/II/III/ AKADEMI	100,00	81,17	89,44	78,48	78,48	45,57	85,86	88,25
UNIVERSITAS	88,90	98,32	93,60	97,21	97,21	52,83	92,18	95,88
TPAK	88,38	88,87	82,87	81,68	81,68	52,17	84,38	83,57

Sumber : BPS Kab. Samosir, diolah

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Samosir pada tahun 2022 adalah sebesar 1,16% (866 Jiwa) dimana nilai tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT pada tahun 2015 yaitu 1,28%. (899 jiwa) apabila dilihat berdasarkan daerahnya, pada tahun 2022 TPT di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di perdesaan, artinya

angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran lebih besar di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Lapangan pekerjaan di perdesaan lebih banyak menyerap angkatan kerja dibandingkan lapangan pekerjaan di perkotaan. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa angkatan kerja di perdesaan lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja di perkotaan yang berarti bahwa tingkat persaingan para pencari kerja lebih rendah dibandingkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan.

Tabel 2.70
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022

DAERAH	TAHUN						
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	2,26	4,01	1,93	1,73	0,80	1,42	1,22
Perdesaan	1,14	0,84	1,29	1,16	1,30	0,57	1,15
TPT	1,28	1,28	1,38	1,25	1,20	0,70	1,16
JENIS KELAMIN							
Laki-Laki	1,90	1,62	1,70	1,17	1,68	1,01	1,74
Perempuan	0,66	0,92	1,03	1,32	0,82	0,39	0,58
TPT	1,28	1,28	1,38	1,25	1,20	0,70	1,16

Sumber : BPS Sakernas

Tabel 2.71
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Samosir Menurut Golongan Umur Tahun 2015 – 2022

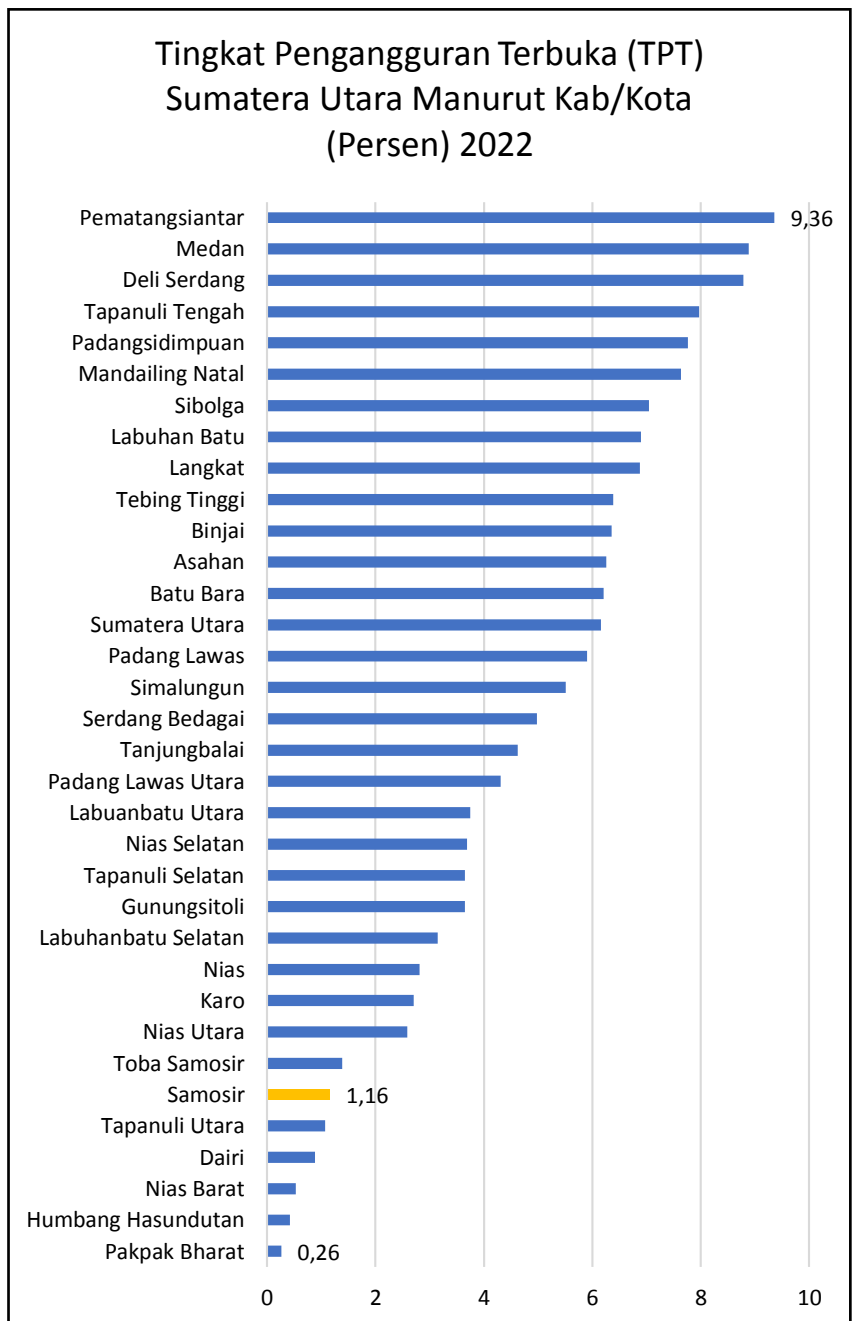
GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15-19	0,41	1,45	4,70	3,86	1,86	0,74	0,93
20-24	5,00	8,53	0,00	4,80	6,17	4,71	4,42
25-29	4,65	3,40	7,47	1,19	2,57	0,00	1,89
30-34	1,03	0,00	1,22	1,06	4,43	0,00	4,51
35-39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-44		1,80	1,54	0,91	0,00	0,89	0,00
45-49		0,00	0,00	1,48	0,00	1,33	0,84
50-54	2,48	1,43	0,00	0,79	0,00	1,03	0,64
55-59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65+		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TPT	1,28	1,28	1,38	1,25	1,20	0,70	1,16

Sumber : BPS Kab. Samosir

Tabel 2.72
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Samosir Menurut Pendidikan Tahun 2015 – 2022

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
≤ SD	0,88	0,45	1,05	0,00	0,47	0,37	0,22
SMTp	0,14	1,23	0,82	0,00	1,20	0,85	0,00
SMTA Umum	0,19	1,81	1,36	3,62	0,00	0,43	1,74
SMTA Kejuruan	10,22	0,00	4,04	0,71	1,36	0,00	2,91
DIPLOMA I/II/III/ AKADEMI		4,18	0,00	6,28	6,17	0,00	6,23
UNIVERSITAS	0,95	2,89	0,00	0,00	5,10	3,06	0,00
TPT	1,28	1,28	1,38	1,25	1,20	0,70	1,16

Sumber : BPS Kab. Samosir



Gambar 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

d. Kesempatan Kerja

Pada tahun 2022 berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) angkatan kerja di Kabupaten Samosir adalah sebanyak 74.426 jiwa (98,84 persen). Angkatan Kerja yang bekerja adalah sebanyak 73.560 jiwa (98,84 persen) dan yang menganggur adalah sebanyak 866 jiwa (1,16 persen). Angka ini semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2015 dimana Angkatan Kerja yang bekerja adalah sebanyak 69.373 jiwa (98,72%) dan yang menganggur adalah sebanyak 899 jiwa (1,28 %).

Tingkat Kesempatan kerja di Kabupaten samosir pada tahun 2022 menurun menjadi 98,84 persen dari tahun 2021 sebesar 99,30% atau mengalami penurunan sebesar 0,46% dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022

KEGIATAN	TAHUN						
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ANGKATAN KERJA	70.272	72.182	67.897	66.999	45.588	74.458	74.426
BEKERJA	69.373	71.259	66.983	66160	45.043	73.937	73.560
PENGANGGUR	899	923	914	839	545	521	866
BUKAN ANGGKATAN KERJA	9.237	9.037	14.125	15.128	41.800	13.784	14.634
SEKOLAH	3.391	2.264	6.423	5.741	4.603	3.758	4.094
MENGURUS RUMAH TANGGA	2.135	4.279	5.570	6.398	32.863	5.921	7.842
LAINNYA	3.711	2.494	2.135	2.989	4.334	4.105	2.698
PENDUDUK USIA KERJA	79.509	81.219	82.025	82127	87.388	88.242	89.060
TKK (%)	98,72	98,72	98,65	98,80	98,80	99,30	98,84

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2015-2022

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian dengan total tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 48.141 tenaga kerja (65,74 persen), diikuti sektor Jasa yang menyerap 21.574 tenaga kerja (28,48 persen). Lapangan usaha sektor manufaktur adalah lapangan usaha yang paling sedikit menyerap tenaga kerja dengan 4.222 tenaga kerja (5,70 persen). Berdasarkan perkembangannya sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah pada sektor jasa dan sektor manufaktur, dimana pada sektor jasa mengalami peningkatan serapan tenaga kerja dari tahun 2015 sampai dengan 2021 sebesar 18,54%, dan sektor manufaktur sebesar 132,62%.

Tabel 2.74
Jumlah penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	49.359	Na	45.923	39.992	41.594	32.045	48.141	Na
2	Manufaktur	1.815	Na	4.514	5.958	4.677	1.602	4.222	Na
3	Jasa	18.199	Na	20.822	21.033	19.529	11.396	21.574	Na
	Total	69.373	Na	71.259	66.983	66.160	45.043	73.937	Na

Sumber : BPD Keadaan angkatan kerja Kab. Samosir



Gambar 2.17. Serapan Tenaga Kerja 2021 Berdasarkan Lapangan Usaha

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas, partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase ARG (Anggaran *Rensponsif* Gender) pada belanja langsung APBD, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan), persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Adapun indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat sebagai berikut:

a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Peningkatan kesetaraan gender salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan hak, tanggungjawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur melalui partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.75
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta di
Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah	1.970	1.953	2.009	1.990	2.103	2.445	2.378	2.390
2	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	332	355	346	361	367	382	382	382
3	Jumlah pekerja perempuan	33.757	34.133	35.277	35.180	31.020	25.541	25.544	25.620
4	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	60,55%	61,43%	64%	64,38%	65,45%	61,17%	62,35%	62,70%
5	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	8,93%	9,07%	9,10%	9,31%	9,34%	9,56%	9,56%	9,56%

3. Pangan

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur dan ikan terhadap capaian kinerja ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan), tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

a. Ketahanan Pangan

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Terhadap capaian kinerja ketahanan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator diantaranya regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai

kebutuhan), tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan. Berbagai indikator kerja pada bidang ketahanan pangan di antaranya regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan Pemerintah Kabupaten Samsir selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Ketersediaan pangan utama yakni beras cenderung mengalami peningkatan tahun 2015 sampai tahun 2022 yakni tahun 2015 sebanyak 112,27 ton menjadi 25.421 kg pada tahun 2022, jagung cenderung mengalami peningkatan tahun 2015 sampai tahun 2022 yakni tahun 2015 sebanyak 16,50 ton menjadi 54.895 ton pada tahun 2022, ubi kayu cenderung mengalami peningkatan yakni 15,68 ton tahun 2015 menjadi 3.905,85 ton tahun 2022 dan ubi jalar cenderung mengalami peningkatan yakni 43,25 ton tahun 2015 menjadi 10.855,02 ton tahun 2022 sedangkan untuk kacang tanah sampai tahun 2022 telah mencapai 74,33 ton. Realisasi capaian indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan dihubungkan dengan analisis ketersediaan beras di Sumatera Utara terhadap kebutuhan beras Kabupaten Samsir Tahun 2015-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Pencapaian Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Samsir Tahun 2015-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Regulasi ketahanan pangan: 1. Peraturan Bupati Samsir Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. Samsir Tahun 2015-2019 2. Keputusan Bupati Samsir Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samsir; 3. Keputusan Bupati Samsir Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Samsir; 4. Keputusan Bupati Samsir Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Samsir 5. Keputusan Bupati Samsir Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan 6. Peraturan Bupati Samsir Nomor 23 Tahun 2013 tentang Strategi Pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan di Kab. Samsir	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama a. Beras b. Jagung c. Ubi d. Ubi Jalar e. Kacang	Ton dibulatkan	112,27	213,45	149,91	174,02	85,06	25.879	29.014	25.421
			16,50	49,84	50,70	121,40	5.556,98	33.851	28.431	54.895
			15,68	38,47	40,47	56,29	325,77	5069,43	5011,59	3.905,85
			43,25	24,10	31,14	43,55	667,14	11.201,55	9696,74	10.855,02
			-	-	-	-	152,3	216,6	108,24	74,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samsir

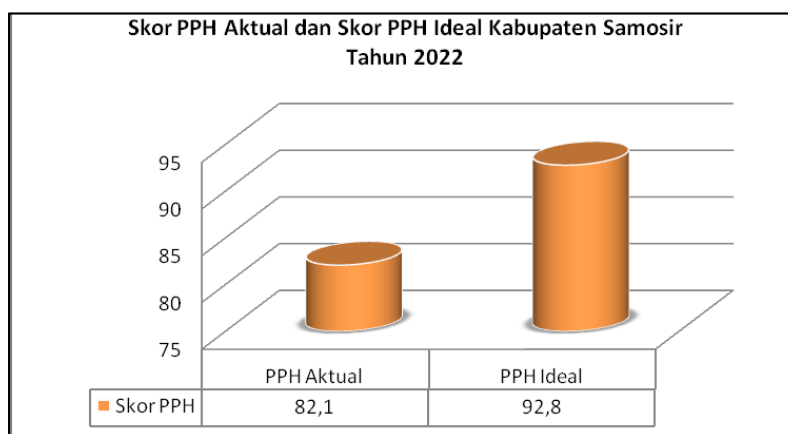
b. Penganekaragaman dan konsumsi pangan

Untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan menurut jenis pangan dinyatakan dalam skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH Kabupaten Samsir dari tahun ke tahun semakin meningkat akan tetapi mengalami penurunan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Pola Pangan Harapan Kabupaten Samosir tahun 2017 - 2022

Tahun	PPH
2017	75,47
2018	78,49
2019	79,17
2020	82,44
2021	83,90
2022	82,10

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir



Gambar 2.18. Skor PPH aktual dan Skor PPH Ideal Kabupaten Samosir Tahun 2022

4. Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong pemerintah daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat sebagai berikut :

a. Persentase penanganan sampah

Pada tahun 2017, Jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 92,84 m³ per hari. Dari total timbunan sampah tersebut, sampah yang terangkut/tertangani hanya 54,7% nya atau sebanyak 50,74 m³/hari. Dan pada tahun 2022 Jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 89,99 m³ per hari. Dari total timbunan sampah tersebut, sampah yang terangkut/tertangani hanya 50,22% nya atau sebanyak 45,21 m³/hari. Hal ini berarti masih terdapat 49,88% sampah yang belum tertangani. Adapun sisa sampah yang tidak terangkut diperkirakan ada yang ditimbun, dibuang ke sungai, dibakar dan lain-lain.

Tabel 2.78
Persentase volume sampah yang tertangani di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani (m3)	NA	NA	18.522	18.960	22.656	13.819	12.500	16.500
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)	NA	NA	33.887	40.235	42.350	32.517	32.700	32.849
3.	Persentase	NA	NA	54,70%	47,12%	53,50%	42,50%	38,22%	50,23%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir

b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per satuan penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Pada tahun 2022 Kabupaten Samosir memiliki 18 unit TPSS yang tersebar di beberapa titik di kabupaten samosir dan memiliki daya tampung TPSS tersebut adalah 72 m³ sampah dengan melakukan pengangkutan 2 kali dalam seminggu.

Tabel 2.79

Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk

No	Uraian	2022
1.	Jumlah TPSS (unit)*	18
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	81
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	139.337
4.	Jumlah sampah yang dihasilkan total penduduk (m ³)	32.849
5.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk	1 : 406

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir

c. Kualitas air dan kualitas udara

Sejak tahun 2015, pengujian kualitas air danau dan udara ambien dilakukan oleh unit laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Pengujian dilakukan pada beberapa titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil pada tahun 2017 dilakukan pengujian di 47 titik lokasi pengujian dengan durasi 3 kali dalam setahun dan berstatus mutu “cemar sedang” dan pada tahun 2022 dilakukan pengujian sampel air danau di 24 titik dengan durasi 1 kali dalam setahun dengan status mutu “cemar berat”.

Tabel 2.80

Pengujian air dan udara di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengujian Kualitas Air Sungai									
Lokasi	lokasi	47	47	47	24	25	24	20	24
Pengujian	uji	4 kali	3 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali
Status Mutu Air		-	-	cemar sedang	cemar sedang	cemar sedang	cemar ringan	cemar sedang	cemar berat
Skor Storet Terburuk	skor	-	-	24	24	20	4	20	36
Parameter Kunci dengan Kualitas Terburuk									
- BOD	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-
- COD	mg/l	-	15,365	12,8	13,46	20,6	7,51	16,4998	16,26
Pengujian Kualitas Udara Ambien Lokasi Pengujian									
Lokasi Pengujian	Titik	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Parameter Tidak Memenuhi Baku Mutu (Kebisingan dan Debu)	db	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Mg/m ²								

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Rasio penduduk yang memiliki KTP, KK, dan Akte Kelahiran terus meningkat dari tahun 2015-2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri atau administrasi kependudukan semakin meningkat. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan hingga 1,62%.

Tabel 2.81

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun Atau Telah Menikah	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
2015	70.180	98.071	71,56%
2016	74.782	97.954	76,34%
2017	79.358	97.130	81,70%
2018	87.006	95.271	91,32%
2019	89.867	92.572	97,08%
2020	92.864	94.283	98,49%
2021	94.659	96.149	98,45%
2022	97.609	100.808	96,83%

Sumber : Dinas Dukcatpil Kab. Samosir

Tabel 2.82

Rasio penduduk ber-KK per satuan penduduk di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK	Rasio Penduduk Ber-KK Per Satuan Keluarga	Ket.
2015	143.371	143.371	100%	
2016	143.971	143.971	100%	
2017	144.408	144.408	100%	
2018	142.812	142.812	100%	
2019	139.762	139.762	100%	
2020	140.539	140.539	100%	
2021	141.982	141.982	100%	
2022	143.168	143.168	100%	

Sumber : Dinas Dukcatpil Kab. Samosir

Tabel 2.83

Rasio cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Realisasi Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Rasio Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2015	14.321	100%	9,98%
2016	28.607	100%	19,87%
2017	56.709	100%	39,27%
2018	65.755	100%	46,04%
2019	72.960	100%	52,20%
2020	78.414	100%	55,80%
2021	83.390	100%	58,73%
2022	87.273	100%	60,96%

Sumber : Dinas Dukcatpil Kab. Samosir

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Samosir terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Kelompok Binaan Lembaga Pembinaan Masyarakat (LPM)

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM selaku mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah LPM di Kabupaten Samosir adalah 280 buah.

b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Dari tahun 2015 hingga 2022, persentase PKK aktif adalah 100%. Jumlah PKK di Kabupaten Samosir adalah 670 Kelompok dengan jumlah kelompok binaan PKK adalah 536 kelompok. Kelompok binaan PKK terdiri dari Posyandu, PAUD, dll. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kelompok binaan satu PKK tetap bertahan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.84
Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Samsir Tahun 2015-2022

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PKK	134	134	134	134	134	134	134	134
	Jumlah PKK Aktif	134	134	134	134	134	134	134	134
	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	670	670	670	670	670	670	670	670
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	536	536	536	536	536	536	536	536

Sumber : Dinsos PMD Kab. Samsir

c. Jumlah LSM yang aktif

Banyaknya jumlah LSM menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2022, Kabupaten Samsir memiliki 12 LSM terdaftar dengan jumlah LSM aktif sebanyak 10 LSM

Tabel 2.85
Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Samsir Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah LSM terdaftar	7	1	7	6	1	6	11	12
2	Jumlah LSM tidak aktif	0	0	0	0	0	0	7	2
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	7	1	7	6	1	6	4	10

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Samosir

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur melalui indikator laju pertumbuhan penduduk. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Samsir terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Keberhasilan program KB dapat dilihat dari terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Pemerintah telah menganjurkan jumlah anak ideal dalam sebuah keluarga yaitu 2 (dua) anak cukup. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan indeks kebahagiaan menurut banyaknya anggota rumah tangga. Berdasarkan data dari tingkat Kebahagiaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, keluarga dengan 4 anggota rumah tangga memiliki nilai indeks tertinggi yaitu sebesar 70,57.

b. Rasio akseptor KB

Selama kurun waktu 2015-2022, rasio akseptor KB di Kabupaten Samsir selalu berfluktuasi. Pada tahun 2022, rasio akseptor KB adalah sebesar 65,26 yang merupakan rasio terendah selama kurun waktu 2015-2022 dan rasio akseptor KB tertinggi pada tahun 2016 sebesar 75,05.

Tabel 2.86
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (orang)	Rasio Akseptor KB
2015	9.023	13.186	68,43
2016	9.923	13.221	75,05
2017	8.684	13.249	65,54
2018	9.842	14.008	70,26
2019	9.242	13.924	66,37
2020	9.289	13.828	67,18
2021	9.517	13.954	68,20
2022	9.338	14.308	65,26

Sumber : Dinas P3APKB Kab. Samosir

8. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dan sangat strategis dalam menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses keluar-masuk menuju Kabupaten Samosir yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang atau barang yang dapat terangkut oleh angkutan darat, laut maupun udara. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Samosir terkait urusan perhubungan dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Rasio Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Kabupaten Samosir merupakan daerah kepulauan yang dibatasi oleh perairan Danau Toba, oleh karena itu dalam rangka memberikan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Samosir, Pemerintah Kabupaten Samosir membuka sarana dan prasarana transportasi/perhubungan melalui 2 (dua) jalur yaitu transportasi darat dan transportasi danau, untuk menghubungkan antara daerah dalam kabupaten dan luar kabupaten, jasa angkutan danau dan penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Samosir tersedia berbagai trayek yang dilayani oleh perusahaan jasa transportasi.

Jumlah Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek relatif tidak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Kabupaten Samosir yang cenderung menggunakan kendaraan pribadi, dan pengunjung wisata yang datang ke kabupaten samosir masih didominasi oleh kendaraan pribadi atau dengan system paket wisat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten samosir masih tetap diangka 7 dari tahun 2015-2022.

Tabel 2.87
Rasio Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Moda Layanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek								
1	Antar Kota Antar Provinsi	2	5	5	5	5	5	5	0
2	Antar Kota Dalam Provinsi	N/A	53	49	82	82	82	82	80
3	Angkutan Perkotaan	192	168	168	167	167	168	158	105
4	Becak Bermotor	253	171	360	400	440	440	440	440
B	Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek								

No	Moda Layanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkutan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Angkutan Karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Angkutan Sewa Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Angkutan Kawasan Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Angkutan		447	397	582	654	694	695	685	625
Jumlah Penduduk		123.789	124.496	125.099	125.816	126.188	136.441	137.696	139.337
Rasio Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum		1 : 277	1 : 314	1 : 215	1 : 192	1 : 182	1 : 196	1 : 201	1 : 223

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Samosir

b. Jumlah uji KIR angkutan umum

Dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor (Uji KIR). Kendaraan yang menjadi objek pengujian antara lain mobil penumpang, mobil barang, mobil bus. Uji kir ini hanya dilaksanakan pada tahun 2016-2019 dan dapat dilihat seperti tabel berikut.

Tabel 2.88

Jumlah uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Samosir tahun 2016 – 2019

No	Jenis Kendaraan	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Truck	-	178	357	553	171	-	-	-
2	Pick-up	-	335	684	654	310	-	-	-
3	Tronton	-	15	42	34	21	-	-	-
4	Dump Truck	-	45	82	230	39	-	-	-
5	Mobil Penumpang	-	82	159	176	30	-	-	-
6	Bus	-	68	116	131	39	-	-	-
Jumlah			723	1.440	1.778	610			

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Samosir

c. Persentase jumlah angkutan darat dan danau per penumpang

Akses masuk melalui Angkutan darat dapat di akses melalui jalan tele melalui alur tano ponggol dengan jembatan dalihan natolu diatasnya dengan ketinggian ±10 diatas danau. Angkutan darat atau transportasi darat merupakan semua bentuk kendaraan yang memakai jalan yang berfungsi untuk mengangkut orang atau barang dengan angka angkutan darat yang masih bersifat fluktuatif di Kabupaten Samosir

Tabel 2.89

Jumlah angkutan darat di Kabupaten Samosir 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jlh Angkutan Darat (unit)	260	259	309	340	348	346	352	339
2.	Jlh Penumpang Angkutan Darat (orang)	854.466	863.110	915.246	461.440	593.554	303.203	482.958	573.772
3.	Pesentase Jumlah Angkutan darat per Penumpang = (1/2) (%)	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,06%	0,11%	0,07%	0,06%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Samosir

Untuk menghubungkan antara daerah dalam kabupaten dan luar kabupaten, jasa angkutan danau dan penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Samosir tersedia berbagai trayek yang dilayani oleh perusahaan jasa transportasi. Untuk mendukung hal tersebut terdapat dermaga yang sudah dibangun di Kabupaten Samosir untuk mendukung sarana angkutan danau dan penyeberangan. Jaringan trayek tetap kapal kayu untuk (Penumpang Umum) yang ada di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.90
Trayek/ Rute Kapal Kayu di Kabupaten Samosir 2023

Asal	Tujuan
Nainggolan	Ajibata, Balige, Bakkara dan Muara
Onan runggu	Ajibata dan Balige
Simanindo	Tigaras dan Haranggaol
Tomok	Ajibata dan Tigaraja
Tuk-tuk	Tigaraja
Pangurusan	Tamba, Sabulan, Sihotang, Harian, Tulas, Balige, Bonandolok, Hasinggaan, Binangara dan Ransang bosi
Mogang; urat; pandiangan	Balige, Ransang Bosi, Holbung, Dolok martahan, Sabulan dan Ajibata
Sipoltongon	Balige
Sihotang	Pintu batu
Tamba	Simbolon

Sumber : Samosirkab.go.id/Potensi-unggulan-kabupaten-samosir-perhubungan/

Tabel 2.91
Jumlah angkutan danau di Kabupaten Samosir 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kapal Ferry	4	4	4	5	5	6	8	8
2.	Kapal Kayu	142	141	141	182	190	188	194	181
3.	Jumlah orang/ barang melalui dermaga	793.066	804.550	849.646	395.400	526.474	267.083	441.526	505.812

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Samosir

Tabel 2.92
Jumlah dermaga di Kabupaten Samosir 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Dermaga	40	41	43	43	44	44	45	45
2.	Jumlah Pelabuhan	2	2	2	2	2	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Samosir

d. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pada tahun 2022, Kabupaten Samosir seharusnya menyediakan 3.350 unit rambu-rambu lalu lintas. Dan yang sudah terpasang hingga 202s sebanyak 3.640. namun jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Samosir masih lumayan tinggi. tertinggi pernah terjadi di tahun 2019 dengan total jumlah kecelakaan sebanyak 73 kali dan terendah di tahun 2017.

Tabel 2.93
Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022

Tahun	Jumlah rambu-rambu Seharusnya	Jumlah rambu-rambu terpasang	Jumlah Kecelakaan
2015	3.350	1633	
2016	3.350	741,93	38
2017	3.350	575	32
2018	3.350	244	33
2019	3.350	244	73
2020	3.350	203	55
2021	3.350	0	44
2022	3.350	0	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Samosir

9. Komunikasi dan Informatika

Semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat. Kondisi daerah Kabupaten Samosir terkait urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Ketersediaan sarana/prasarana TIK

Sarana/prasarana teknologi informasi komunikasi (TIK) yang tersedia di Kabupaten Samosir terdiri dari akses internet, jaringan komunikasi data, sistem informasi, dan titik hotspot. Sejak tahun 2015, seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Samosir telah dilengkapi dengan akses internet. Dalam rangka mendukung kelancaran transformasi data dan informasi pembangunan antar perangkat daerah, dengan sistem informasi lokal dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Samosir. Sejak 2015 sudah ada peningkatan sistem informasi setelah sebelumnya selama tahun 2010-2014 mengalami stagnansi jumlah sistem informasi yang ada. Pada tahun 2020, sistem informasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Samosir adalah sebanyak 15 unit.

Tabel 2.94
Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet & terkoneksi ke pusat jaringan komunikasi data Pemkab	35	35	38	38	38	38	32	32
2.	Jumlah sistem informasi yang ada	3	3	3	6	12	14	15	15
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda	0	0	0	0	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Samosir

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. Indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah Kabupaten Samosir dapat dilihat sebagai berikut :

a. Persentase koperasi aktif

Dalam kurun waktu 2015-2022 jumlah koperasi di Kabupaten Samosir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, terdapat 52 koperasi di Kabupaten Samosir. Akan tetapi di tahun yang sama jumlah koperasi yang aktif justru hanya 24 koperasi. Persentase koperasi aktif di tahun 2022 adalah sebesar 76,92% lebih tinggi dibandingkan persentase koperasi aktif di tahun 2015 yaitu sebesar 46,15%. Dari total koperasi yang telah terbangun, selama delapan tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 51,54% koperasi yang berstatus koperasi aktif.

Pada tahun 2017, Kabupaten Samosir memiliki 130 koperasi simpan pinjam dan jumlah ini berkurang dari tahun 2022 sebesar 60 koperasi simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam di koperasi kalah dengan kegiatan simpan pinjam di bank dimana masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bank. Melihat potensi terbangunnya koperasi, maka diperlukan sebuah upaya untuk dapat mendorong kinerja koperasi agar fungsi dan tujuan pembentukannya dapat tercapai. Salah satu yang menjadi potensi untuk dikembangkan kembali adalah koperasi produksi. Pada tahun 2022, terdapat 5 koperasi produksi atau sebesar 7,7% dari total keseluruhan koperasi. Capaian keberhasilan pemerintah di bidang koperasi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.95
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah koperasi aktif	24	21	23	27	28	28	36	50
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	28	28	29	29	34	48	14	15
3.	Jumlah koperasi	52	49	52	56	62	76	50	65
4.	Persentase koperasi aktif	46,15%	42,86%	44,23%	48,21%	45,16%	36,84%	72,00%	76,92%
5.	Jumlah koperasi produksi	2	2	2	2	2	2	2	5
6.	Jumlah koperasi simpan pinjam	50	47	50	54	60	74	48	60

Sumber : Dinas Kopnakerindag Kab. Samosir

b. Jumlah UKM

Jenis UKM yang berkembang saat ini didominasi oleh pengolahan makanan dan minuman/kuliner yang sifatnya tidak tahan lama. Adapun beberapa kendalanya yang dihadapi pelaku UKM antara lain adalah keterbatasan modal, akses terhadap pasar, serta lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam memproduksi dan mencari bahan baku. Hal-hal tersebut mempengaruhi lamanya keberlangsungan suatu UKM. Selain itu, produk-produk UKM juga masih minim yang terstandarisasi.

Tabel 2.96
Jumlah Pelaku UKM dan Koperasi di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No.	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelaku UKM	n/a	n/a	n/a	n/a	933	852		
2.	Koperasi	52	49	52	56	62	76	50	65

Sumber : Dinas Kopnakerindag Kab. Samosir

c. Jumlah BPR/LKM

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposit), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service), serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM berarti semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan guna meningkatkan usaha dan perekonomiannya.

Tabel 2.97
Jumlah BPR / LKM Kabupaten Samsir Tahun 2015 – 2022

Tahun	Jumlah BPR / LKM	Total
2015	n/a	n/a
2016	n/a	n/a
2017	2	2
2018	2	2
2019	2	2
2020	2	2
2021	2	2
2022	2	2

Sumber : Dinas Kopnakerindag Kab. Samsir

d. Jumlah omzet

Simpanan masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), termasuk juga penghimpunan dana dengan prinsip syariah baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Adapun posisi simpanan masyarakat rupiah dan valuta asing Bank umum dan BPR di Kabupaten Samsir Tahun 2015-2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Kabupaten Samsir Tahun 2015-2022 (juta rupiah)

No	Indikator	Capaian Kinerja							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank umum dan BPR (juta rupiah) : Giro, Simpanan dan Tabungan	486,81	276,150	276,97	272,09	10,87	NA	NA	NA
2	Giro		100.63	56.61	31.11	NA	NA	NA	NA
3	Simpanan		42.27	49.52	59.27	NA	NA	NA	NA
4	Tabungan		133.25	170.85	181.72	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Kopnakerindag Kab. Samsir

Tabel 2.99
Jumlah omzet simpanan masyarakat Kabupaten Samsir Tahun 2015 – 2022

No	Kegiatan	Omzet Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Omzet Koperasi	n/a	n/a	n/a	n/a	30	63	28	30
2.	Persentase Omzet UMKM	n/a	n/a	n/a	n/a	4,7	-1	3	12

Sumber : Dinas Kopnakerindag Kab. Samsir

11. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Samsir memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktivitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktivitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kondisi indikator kinerja daerah Kabupaten Samsir terkait urusan penanaman modal dapat dilihat sebagai berikut :

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Upaya pemerintah Kabupaten Samsir dalam mencari modal dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Samsir pada

tahun 2022 mencapai 898 investor yang terdiri dari 896 investor dalam negeri dan 2 investor asing. Jumlah ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 dimana hanya terdapat 83 investor PMA/PMDN di Kabupaten Samosir. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kondisi di Kabupaten Samosir sehingga mampu menarik berbagai investor untuk berinvestasi di Kabupaten Samosir.

Tabel 2.100
Jumlah investor PMA dan PMDN Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022

Investor	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PMDN	83	470	441	493	558	597	676	896
PMA		2	2	2	2	2	2	2
Total	83	472	443	495	560	599	678	898

Sumber : DPMPTSP Kab. Samosir

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Realisasi investasi di Kabupaten Samosir dalam kurun waktu 2015-2022 cenderung meningkat. Peningkatan investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Samosir dipengaruhi oleh kondusivitas kabupaten samosir yang terjaga dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya sementara penyerapan tenaga kerja asing cenderung menurun. Hal ini berdampak pada rendahnya angka pengangguran di kabupaten samosir pada tahun 2021.

Tabel 2.101
Jumlah investor PMA dan PMDN Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022

Tahun	Pertambahan realisasi Investasi				Penyerapan Tenaga Kerja	
	PMDN (Rp)	Laju PMDN	PMA (USD)	Laju PMA	Indonesia	Asing
2015	576.236.681.274		59.622.966		2.074	
2016	588.668.731.274	12.432.050.000	198.834.124	139.211.158		
2017	610.680.234.931	22.011.503.657	198.834.124	0		
2018	932.949.903.885	322.269.668.954	198.834.124	0	1.280	453
2019	1.060.609.599.530	127.659.695.645	198.834.124	0		
2020	1.136.666.249.511	76.056.649.981	198.834.124	0		
2021	1.190.502.864.137	53.836.614.626	217.014.495	18.180.371	1.651	328
2022	1.251.804.647.585	61.301.783.448				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir

12. Kepemudaan dan Olahraga

a. Jumlah organisasi pemuda

Organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Organisasi kepemudaan yang aktif dari tahun 2015-2022 hanya ada pada tahun 2016, 2018 dan 2020 sebanyak 1 organisasi serta pada tahun 2021 organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 2 organisasi.

Tabel 2.102
Jumlah organisasi kepemudaan Kabupaten Samosir Tahun 2015 – 2022

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Organisasi Kepemudaan Yang aktif	0	1	0	1	0	1	2	0
2.	Organisasi Kepemudaan Yang Tidak aktif	0	0	0	0	0	0	0	1
	Total	0	1	0	1	0	1	2	1

b. Jumlah Atlit dan Prestasi

Untuk Atlet Berprestasi yang pernah diraih oleh Kabupaten Samosir selama kurun waktu lima tahun terkahir berdasarkan cabang olahraga dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.103
Cabang olahraga yang berprestasi di Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2022

Tahun	Olahrga	Kejuaraan	Jumlah Medali
2018	Angkat besi	Pekan Olahraga Wilayah III (PORWIL)	1 Medali Perak
		Pekan Olahraga Wilayah III (PORWIL)	1 Medali Perunggu
	Pencak Silat	Pekan Olahraga Wilayah III (PORWIL)	1 Medali Emas
		Pekan Olahraga Wilayah III (PORWIL)	3 Medali Perak
		Pekan Olahraga Wilayah III (PORWIL)	7 Medali Perunggu
2021	Pencak silat	PON PAPUA 2021	1 Medali Perunggu
	Wushu	Selekda menuju Kejurnas Wushu Junior	1 orang Juara 1
		Selekda menuju Kejurnas Wushu Junior	3 orang Juara 2
		Selekda menuju Kejurnas Wushu Junior	1 orang Juara 3
	Karate	Kejuaraan ASKI	3 orang Juara 1
		Kejuaraan ASKI	2 orang Juara 2
		Kejuaraan ASKI	1 orang Juara 3
	Angkat Besi	Kejurda Angkat Besi	1 orang Juara 2
	PBVISI	Pra PorProvsu Wilayah III	1 orang Juara 3
2022	Kung-Fu Tradisional	Festival Olahraga Rekreasi Nasional	1 Medali Emas
		Festival Olahraga Rekreasi Nasional	1 Medali Perak
		Festival Olahraga Rekreasi Nasional	2 Medali Perunggu
	Judoka Kung-Fu	Kejurda	3 Medali Emas
		Kejurda	3 Medali Perunggu
2023	Wushu	SEA Games Ke-32 Kamboja	1 Medali Emas

Sumber : Dinas Dikpora Kab. Samosir

c. Jumlah Prasarana Olahraga

Pada tahun 2022, prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Samosir meliputi 3 unit lapangan sepak bola, 1 uni lapangan tenis, 4 unit lapangan futsal, 2 unit lapangan bulu tangkis. Untuk olahraga lainnya terdapat 7 sasana untuk cabang olahraga karate, pencak silat, tinju dan angkat besi yang terdapat di Kabupaten Samosir totalnya terdapat 17 sarana olahraga yang terdapat di Kabupaten Samosir. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 12 unit sarana olahraga. Akan tetapi, untuk sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten Samosir untuk mendukung kepemudaan di Kabupaten Samosir sama sekali tidak ada.

13. Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kabupaten Samosir diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan yang sekaligus berperan sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival.

a. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Salah satu upaya untuk melestarikan jati diri daerah adalah melalui pemeliharaan benda – benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Pada tahun 2015, Kabupaten Samosir teridentifikasi memiliki 75 benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Seiring banyaknya kunjungan wisata ke benda, situs, dan kawasan cagar budaya, kesadaran masyarakat akan nilai jualnya wisatanya memaksa masyarakat untuk terbuka dengan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2022 jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya bertambah menjadi 178 dengan total yang sudah dilestarikan sebanyak 42.

Tabel 2.104

Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki Daerah	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)
2015	Wisata -	75	0
2016	-	7	0
2017	-	75	0
2018	-	100	0
2019	-	NA	0
2020	-	143	0
2021	25	143	17,48%
2022	42	178	23,59%

Sumber : Disbudpar Kab. Samosir

Tabel 2.105

Benda Cagar Budaya yang dilestarikan

NO	NAMA	LOKASI
1	Batu Persidangan Raja Naiappu Siallagan	Desa Siallagan - Kecamatan Simanindo
2	Sarkofagus Op. Soribuntu Sidabutar	Desa Tomok Parsaoran -Kecamatan Simanindo
3	Sarkofagus Op. Ujung Barita Sidabutar	Desa Tomok Parsaoran -Kecamatan Simanindo
4	Paromasian Op. Solaosan Sidabalok Doli	Desa Simanindo Sakkal- Kecamatan Simanindo
5	Paromasian Op. Solaosan Sidabalok Boru	Desa Simanindo Sakkal- Kecamatan Simanindo
6	Paromasian Op. Pogu Sinaga	Desa Simanindo Sakkal- Kecamatan Simanindo
7	Pangulubalang Op. Banua Turnip	Desa Simanindo-Kecamatan Simanindo
8	Sarkofagus Op. Pialang Simarmata (Sipukka Batu)	Desa Lumban Suhisui Toruan-Kecamatan Pangururan
9	Patung Ulubalang Huta Bolon Simanindo	Desa Simanindo-Kecamatan Simanindo
10	Solu Bolon di Huta Bolon	Desa Simanindo-Kecamatan Simanindo
11	Losung Marrate Pagar Batu	Desa Pardomuan – Kecamatan Simanindo
12	Batu Panussian ni Pat Pagar Batu	Desa Pardomuan – Kecamatan Simanindo
13	Batu Pamelean Pagar Batu	Desa Pardomuan – Kecamatan Simanindo
14	Sarkofagus Huta Simarmata	Desa Hariarapohan – Kecamatan Harian
15	Losung Batu Dua Mata Huta Simarmata	Desa Hariarapohan – Kecamatan Harian

Sumber : Disbudpar Kab. Samosir

Tabel 2.106

Situs Cagar Budaya yang dilestarikan

NO	NAMA	LOKASI
1	Huta Bolon	Desa Simanindo - Kecamatan Simanindo
2	Huta Pagar Batu	Desa Pardomuan - Kecamatan Simanindo
3	Huta Simarmata	Desa Hariarapohan - Kecamatan Harian

Sumber : Disbudpar Kab. Samosir

b. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya

Penyelenggaraan seni dan budaya yang telah diselenggarakan di Kabupaten Samosir pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) kali. Jumlah ini berkurang apabila dibandingkan dengan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2015-2016 yang mencapai 11-12 kali dalam setahun. Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Samosir pada tahun 2022 yaitu sebanyak 65 buah dengan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya 3 sarana.

Tabel 2.107
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kabupaten Samosir tahun 2015-2022

No	Seni dan Kebudayaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah grup kesenian	33	33	33	38	48	55	61	65
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	12	6	4	8	1	2	7
4.	Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	3	3	NA	3	3	3

Sumber : Disbudpar Kab. Samosir

14. Perpustakaan

Adapun gambaran umum urusan perpustakaan Kabupaten Samosir dapat dilihat indikator kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah Perpustakaan

Melihat pentingnya peran perpustakaan dalam pembangunan pendidikan masyarakat, pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya untuk meningkatkan jumlah perpustakaan baik perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan masyarakat. Peningkatan jumlah perpustakaan yang cukup signifikan mulai terjadi dari tahun 2019 dan 2022. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 belum dilakukan pendataan terhadap jumlah perpustakaan. Peningkatan jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 2018-2022 terjadi karena adanya kerjasama antara instansi.

Tabel 2.108
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Jenis Perpustakaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perpustakaan Desa/kel	Belum di data	Belum di data	54	54	128	128	128	128
2	Perpustakaan SD	Belum di data	Belum di data	173	173	173	173	173	194
3	Perpustakaan SMP	Belum di data	Belum di data	27	27	27	27	27	27
4	Perpustakaan SMA/SMK	Belum di data	Belum di data	16	16	16	16	16	16
5	Perpustakaan SKPD	Belum di data	Belum di data	-	-	-	-	-	-
6	Perpustakaan Masyarakat	Belum di data	Belum di data	19	28	28	28	18	18
	JUMLAH			289	298	372	372	362	383

Sumber : Bagian Perpustakaan dan Arsip Daerah Setdakab Samosir

b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pada tahun 2017, persentase kunjungan ke perpustakaan hanya sekitar 9,00% dari cakupan jumlah populasi yang harus dilayani dan pada tahun 2022 persentase kunjungan ke perpustakaan mencapai 9,23%. Hal ini juga menandakan bahwa pelayanan perpustakaan di Kabupaten Samosir semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.109
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Samosir

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan Perpustakaan	-	-	11.256	25.886	23.842	4.288	2.211	12.862
2	Populasi yang harus dilayani	-	-	125.099	125.816	125.816	125.816	141.982	147.560
3	Persentase kunjungan ke perpustakaan	-	-	9,00%	20,57%	19,89%	3,14%	1,61%	9,23%

Sumber : Bagian Perpustakaan dan Arsip Daerah Setdakab Samosir

c. Jumlah kendaraan perpustakaan

Adanya perpustakaan keliling diharapkan dapat memudahkan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pelosok Kabupaten Samosir untuk mengakses bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Pemerintah Kabupaten Samosir menyediakan kendaraan yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling (mobil pintar). Pada tahun 2017 sampai 2022, jumlah kendaraan perpustakaan keliling hanya sebanyak 2 unit.

d. Jumlah Ketersediaan Buku

Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Kabupaten Samosir lebih dari 139 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70% nya tinggal di wilayah perdesaan, maka dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemerataan baik dalam memperoleh pendidikan maupun dalam memperoleh informasi. Menurut standar nasional, jumlah minimal buku yang tersedia harusnya 5.000 judul buku, sedangkan sampai pada tahun 2022 ketersediaan judul buku sebanyak 4.013 judul buku. Untuk memenuhi target standar dimaksud, Kabupaten Samosir masih terdapat kekurangan 987 judul buku.

15. Penunjang Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Perbaikan dan perubahan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan. Indikator kinerja terkait urusan penunjang Pemerintahan Umum dapat dilihat sebagai berikut :

a. Persentase penyelesaian penegakan PERDA

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Berkaitan dengan tugasnya untuk menegakan peraturan daerah, Satpol PP telah menyelesaikan seluruh penegakan perda dan penegakan K3. Tingginya pelanggaran perda dan K3 dikarenakan belum optimalnya sistem pengawasan perijinan. Hal ini terjadi karena belum memadainya sarana prasarana untuk patroli, belum optimalnya integrasi perijinan antar lembaga serta kurangnya jumlah linmas untuk pengawasan dan PPNS untuk pengendalian.

Tabel 2.110
 Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Penegakan Perda								
1	Jumlah Pelanggaran Perda (pengaduan)	147	315	356	283	182	616	502	458
2	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda (pengaduan)	140	313	350	283	182	616	502	458
3	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	95,2	99,3	98,3	100	100	100	100	100
II	Penegakan K3								
4	Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (Kasus)	25	25	25	21	29	22	77	110
5	Jumlah Penyelesaian Penegakan Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (Kasus)	25	25	25	21	29	22	77	100

Sumber : Satpol PP Kab. Samosir

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2022, nilai IKM Kabupaten Samosir adalah sebesar 85,93 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 82,00.

Tabel 2.111
 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Samosir Tahun 2019-2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Pelayanan 2019			Pelayanan 2020			Pelayanan 2021			Pelayanan 2022		
		Mutu	Kinerja	IKM Unit	Mutu	Kinerja	IKM Unit	Mutu	Kinerja	IKM Unit	Mutu	Kinerja	IKM Unit
1	Dinas Kesehatan	A	Sangat Baik	94	A	Sangat Baik	94	A	Sangat Baik	94,55	B	Baik	85,5
2	Kecamatan Siotio	B	Baik	80	B	Baik	88,18	B	Baik	84,1			
3	Kecamatan Ronggumihuta	B	Baik	80	B	Baik	87,41	B	Baik	87			
4	Dinas Kependudukan Catatan Sipil	B	Baik	87,72	B	Baik	83,04	A	Sangat Baik	91	A	Sangat Baik	91
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	B	Baik	83,02	B	Baik	83,02	B	Baik	83,05	B	Baik	83,61
6	Kecamatan Onanrungu	B	Baik	85	B	Baik	82	B	Baik	87			
7	Kecamatan Palipi	B	Baik	77,61	B	Baik	81,29	B	Baik	84,1			
8	Kecamatan Simanindo	B	Baik	85	B	Baik	80,26	B	Baik	79,02			
9	Kecamatan Nainggolan	B	Baik	80	B	Baik	80,26	B	Baik	86,03			
10	Kecamatan Sianjurmulamula	B	Baik	82,57	B	Baik	80,24	B	Baik	80,23			
11	Kecamatan Harian	B	Baik	80	B	Baik	80,23	B	Baik	80,35			
12	Kecamatan Pangururan	B	Baik	75	B	Baik	80,2	B	Baik	80,27			
13	Rumah Sakit Umum Daerah	B	Baik	79,15	B	Baik	78,73	B	Baik	79,75	B	Baik	84,02
14	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										A	Sangat Baik	91
15	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga										B	Baik	80,47
Rata-rata IKM Kabupaten		82			83			83,34			85,93		

Sumber : Setdakab Samosir

2.5.3 Fokus Layanan Pemerintahan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Kabupaten Samosir terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Samosir dari sektor Pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir mengalami jumlah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2007 sebanyak 33.897 orang, pada tahun 2010 sebanyak 118.215 orang, pada tahun 2015 sebanyak 175.945 orang, pada tahun 2020 sebanyak 405.203 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 860.892 orang. Kondisi daerah Kabupaten Samosir terkait urusan pariwisata dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Jumlah Objek wisata

Kondisi sampai tahun 2015, meningkatnya kualitas objek wisata di Kabupaten Samosir ditandai dengan destinasi wisata telah mengalami trend positif jumlah retribusi, jumlah kunjungan wisatawan, perkembangan usaha kecil masyarakat di kawasan objek wisata, pertumbuhan fasilitas wisata dan aktivitas wisata, terdapat 8 objek wisata unggulan yakni Pasir Putih Parbaba, Tuktuk dan Batu Persidangan, Pusat Souvenir dan Makam Raja Sidabutar serta Sigale Gale, Huta Bolon, Hotspring, Batu Sawan, Sipitundai dan Menara Pandang Tele. Secara umum Objek Wisata di Kabupaten Samosir dibagi dalam 3 kelompok yaitu :

1. Wisata Alam yang terdiri dari 47 objek wisata (tabel 2.19)
2. Wisata Budaya dan Sejarah terdiri dari 40 objek wisata (tabel 2.20)
3. Wisata Rohani terdiri dari 3 objek wisata (tabel 2.21)

b. Jumlah Kunjungan wisata

Kabupaten Samosir memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dibagi ke dalam wisata alam, budaya dan sejarah, dan wisata Rohani. Sebagian besar pariwisata tersebut didominasi oleh wisata alam dan budaya/sejarah yang banyak menarik minat wisatawan. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun semakin bertambah, bahkan selama 8 tahun terakhir (2015–2022) telah terjadi penambahan mencapai 389 persen. Pada tahun 2022 jumlah wisatawan ke Kabupaten Samosir sebanyak 860.892 orang yang terdiri dari 22.207 orang wisatawan asing (Mancanegara) dan 87.257 orang wisatawan dalam negeri. Hal ini menunjukkan besarnya potensi dan daya saing yang dimiliki oleh sektor pariwisata Kabupaten Samosir. Jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Samosir selama 8 tahun terakhir (2015–2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112
Indikator Capaian Pariwisata di Kabupaten Samosir tahun 2015-2022

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	175.945	190.728	278.059	378.649	418.271	405.203	663.848	860.892
2.	Jumlah daya tarik wisata (lokasi)	44	44	44	43	43	43	43	74
3.	Jumlah mitra kerja pariwisata (orang)	37	40	334	110	43	234	92	278

Sumber : Disbudpar Kab. Samosir

Tabel 2.113
Banyaknya Kunjungan Wisatawan Asing (Wisman) dan Nusantara (Wisnus)
ke Kabupaten Samosir menurut bulan (kali)

BULAN	TAHUN							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	13.086	12.095	38.321	46.734	51.750	101.390	-	146.812
Pebruari	7.320	7.642	10.936	24.969	21.555	26.658	-	114.910
Maret	8.742	7.147	13.362	30.717	19.489	18.813	-	62.868
April	10.589	6.941	26.621	36.414	22.065	1.090	-	70.539
Mei	15.904	9.494	16.230	27.716	33.872	2.172	-	204.052
Juni	12.765	10.030	51.964	73.986	52.235	2.104	-	47.535
Juli	30.369	23.748	20.958	23.680	33.142	3.924	-	55.526
Agustus	13.548	9.032	13.072	22.997	34.880	46.262	-	31.098
September	7.970	13.360	17.193	15.508	24.477	23.267	-	20.977
Oktober	6.734	13.352	16.243	10.645	23.162	29.052	-	26.496
Nopember	12.867	20.633	13.134	20.333	26.272	29.586	-	19.119
Desember	35.569	57.254	40.025	44.950	75.372	120.885	-	60.960
Jumlah Total	175.463	190.728	278.059	378.649	418.271	405.203	-	860.892

Sumber : BPS dan Disbudpar Kab. Samosir

Tabel 2.114
Jenis Sarana dan Prasaran Pariwisata Kabupaten Samosir Tahun 2022

No	BIDANG	JENIS	SUB JENIS	JUMLAH
1.	Usaha Daya Tarik Wisata	1. Pemandian Air Panas		19
		2. Pengelolaan Museum		3
		3. Objek Wisata Ziarah		10
		4. Pengelolaan Wisata sungai, Danau dan Waduk		12
		SUB TOTAL		44
2.	Usaha Kawasan Pariwisata	1. Kawasan Pariwisata		-
		2. Pengelolaan Pos Pendakian Pusuk Buhit		4
		SUB TOTAL		4
3.	Usaha Jasa Transportasi Wisata	1. Angkutan Jalan wisata mobil bus wisata		3
		2. Angkutan Wisata sungai/ Danau/ Kapal Wisata		2
		3. Angkutan Wisata Sepeda Motor/ Rental		70
		4. Angkutan Usaha dengan Sepeda/ Rental		35
		SUB TOTAL		110
4.	Usaha Perjalanan Wisata	1. Biro Perjalanan		-
		2. Travel Agent		7
		SUB TOTAL		7
5.	Usaha Jasa Makanan & Minuman	1. Restoran/ Rumah Makan		431
		2. Bar		3
		3. Kafe		10
		4. Katering/ Jasa Boga		4
		5. Pedagang Makanan dan Minuman di objek wisata		232
		6. Usaha oleh-oleh/Souvenir		190
		SUB TOTAL		870
6.	Usaha Penyediaan Akomodasi	1. Hotel/penginapan/villa		110
		2. Homestay		77
		3. Bumi Perkemahan		1
		SUB TOTAL		188
7.	Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1. Usaha Gelanggang Rekreasi Olah Raga	1. Rumah Biliar	2
			2. Gelanggang Futsal	1
			3. Fitness Centre	1
		2. Usaha Gelanggang Seni	1. Sanggar seni	33
			2. Galeri Seni	1
			3. Gedung Pertunjukan Seni	1

No	BIDANG	JENIS	SUB JENIS	JUMLAH
			4. Salon, Rumah Pangkas	40
		3. Usaha Hiburan Malam	1. Diskotik	1
			2. Kelab Malam	9
		4. Usaha Karaoke	1. Karaoke Keluarga	3
			2. Karaoke Dewasa	2
		SUB TOTAL		94
8.	Usaha Jasa Pramuwisata			1
		SUB TOTAL		1
9.	Usaha Wisata Tirta	1. Kolam Pemancingan		-
		2. Sepeda Air, Banana Boat, Sky air dll		12
		SUB TOTAL		12
		TOTAL		1.330

Sumber : Dinas Budpar Kab. Samosir

2. Pertanian dan Peternakan

a. Indikator Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura

Produktivitas komoditi di Kabupaten Samosir sejak tahun 2015 - 2022 terus mengalami peningkatan dan dilihat dari kualitas kelompok, terdapat peningkatan yang dinilai dari semakin banyaknya jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluh. Di tahun 2022 terdapat 4.445 kelompok yang terbina melalui penyuluh. Indikator pertanian, perkebunan, dan hortikultura Kabupaten Samosir selama kurun waktu 2015-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.115

Indikator Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022

No	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Jumlah pencapaian produktivitas komoditas (kw/ha)									
1	Padi	50,38	47,28	52,06	51,34	53,05	47,94	47,94	53,83
II. Luas areal pengembangan tanaman Pangan, Hortikultura, Biofarmaka, Perkebunan Unggulan (ha)									
1	Komoditi Tanaman Pangan (ha)								
	1. Padi	8495	4766,6	9627,6	10584	8663	8745	9499	9525,2
	2. Jagung	1.476	2.156	3.215,5	5.176,4	6.731	6.472	6.329	7.539,4
	3. Kacang Tanah	160	133	57,5	56,2	68,7	195	80	68,3
	4. Ubi Kayu	194	169	112	105	101,8	171	137	125,8
	5. Ubi Jalar	194	297	298	407	434	393	367	528,8
2	Komoditi Hortikultura (ha)								
	1. Bawang Merah	215	200	238	244	220	302	320	258,8
	2. Cabe Merah	149	220	214	166	141	148	160	169,9
	3. Kentang	539	589	618	485	448	651	718	689
3	Komoditi Perkebunan (ha)								
	1. Kopi	4.533,3	4.834,8	5.038,7	5.045,6	5.105,6	5.196,1	5.610,9	5.710,9
	2. Kakao	251,7	249,7	219	221,7	218,9	221,3	223	223
	3. Kemiri	287,3	285,4	354,4	267,3	271,4	276,2	261	261
	4. Cengkeh	124,9	129	116,4	112,1	112,1	128,9	298,5	311,22
	5. Aren	234	348,4	247	233	227,6	276,6	290,3	291
	6. Vanili	52,5	16,3	3,3	6,8	7	20	20	19,91
	7. Kelapa	92,7	94,2	62,9	41,9	41,3	54	59,5	60,73

No	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
III.	Jumlah pencapaian Indeks Pertanaman (IP)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
IV.	Jumlah rata-rata pencapaian produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Biofarmaka, Perkebunan								
1	Komoditi Tanaman Pangan (kw/ha)								
	1. Padi	50,38	47,28	52,06	51,34	53,05	47,94	47,94	53,83
	2. Jagung	54,43	53,33	73,13	53,79	55,1	54	54	58,4
	3. Kacang Tanah	12,88	14,71	17,76	12,8	11,96	12	12	11,97
	4. Ubi Kayu	300,24	315,05	284,41	313,99	254,36	256	256	340,23
	5. Ubi Jalar	199,69	210,57	230,15	193,01	200,56	206	206	281,8
2	Komoditi Hortikultura (kw/ha)								
	1. Bawang Merah	64,41	66,63	71,12	72,12	69,55	69,55	150,96	155,46
	2. Cabe Merah	73,71	66,01	57,1	57,1	71,55	46	88,18	59,88
	3. Kentang	250	250	210,64	210,64	201,6	228	228	226,18
3	Komoditi Perkebunan (kw/ha)								
	1. Kopi	6,84	6,83	8,43	8,23	8,4	5,8	05,04	7,43
	2. Kakao	4,88	05,03	5,28	5,54	5,3	4,7	4,54	4,54
	3. Kemiri	9,38	9,53	8,36	10,63	10,5	19,9	19,22	19,22
	4. Cengkeh	1,46	1,63	2,16	2,28	2,3	2,1	0,89	2,3
	5. Aren	3,18	2,16	2,7	2,47	2,5	6,9	7	17,2
	6. Vanili	1,7	1,1	1,82	0,88	0,8	1	1	3
	7. Kelapa	04,03	3,65	23,12	4,79	4,9	6,6	4,42	9,9
V.	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Biofarmaka, Perkebunan								
1	Komoditi Tanaman Pangan (ton)								
	1. Padi	43.336	38.916	39.888	42.066	47.619	42.788	48.835	50.900
	2. Jagung	6.542	7.306	19.513	17.414	47.848	31.056	28.424	54.619
	3. Kacang Tanah	3.098	193	115	84	73	216	108	74,3
	4. Ubi Kayu	6.695	5.639	8.089	3.956	2.671	3.810	5.012	3.837,81
	5. Ubi Jalar	4.773	5.833	6.375,16	7.623,9	9.326,04	8.201	9.697	10.855
2	Komoditi Hortikultura (ton)								
	1. Bawang Merah	1.353	1.259	1.680	1.839	1.565	2.095	3.323	5.178,33
	2. Cabe Merah	1.474	1.155	1.410	1.485	959	617	1048	1.105,45
	3. Kentang	12.950	13.050	13.050	16.472	9.314	11.851	16.147	17.355,1
3	Komoditi Perkebunan (ton)								
	1. Kopi	3.099,45	3.303	3.866,35	4.151,96	4.277,7	3.027,9	2.829,22	2.948,7
	2. Kakao	122,89	125,66	115,55	122,73	115	103,5	101,35	102,79
	3. Kemiri	269,54	271,99	296,39	284,22	284,2	549,1	501,75	497,96
	4. Cengkeh	18,3	21,07	25,2	25,58	25,6	27	27,36	28,84
	5. Aren	74,31	75,07	66,63	57,48	57,5	191,2	202,4	202,53
	6. Vanili	8,9	1,79	0,6	0,6	1	2	12,65	
	7. Kelapa	37,31	34,4	23,12	20,07	20,1	35,5	26,87	29,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

b. Indikator Peternakan

Selama kurun waktu delapan tahun terakhir, terdapat peningkatan dalam persentase penanggulangan ternak prioritas. Pada tahun 2022 tercatat persentase jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi sebesar 75%. Hal ini diikuti dengan peningkatan pencapaian status kesehatan hewan menjadi sebesar 65% di tahun 2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,5% per tahun. Akan tetapi, belum ada pemanfaatan teknologi peternakan

serta pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan persentase capaian indikator peternakan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas peternakan di Kabupaten Samosir.

Tabel 2.116
Indikator Peternakan Kabupaten Samosir Tahun 2015 - 2022

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi (%)	50	50	55	55	60	60	70	75
2	Meningkatnya status kesehatan hewan (%)	45	50	55	55	55	60	60	65
3	Peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (unit Usaha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH (%)	40	40	40	45	45	45	50	60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

c. Indikator Perikanan

Rencana pengembangan kawasan perikanan diarahkan untuk peningkatan teknologi penangkapan perikanan umum dan peningkatan serta pengelolaan produksi yang baik terhadap jenis budidaya perikanan darat. Sementara Kawasan Danau Toba yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang menjadi salah satu dari sepuluh destinasi wisata nasional untuk dikembangkan pemerintah pusat, telah disepakati bersama 7 (tujuh) kabupaten kota sekitar Danau Toba untuk zero KJA di perairan Danau Toba. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Samosir telah menetapkan keputusan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Rencana Aksi Penataan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir yang disertai rencana-rencana aksi penataan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Energi

Pencapaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral dalam pemanfaatan panas bumi dengan kategori pelanggan yang memanfaatkan JTM (KMS) tahun 2022 sebanyak 621.294 KK, pengguna JTR (KMS) tahun 2022 sebanyak 813.838 KK, Kapasitas Trafo Distribusi (KVA) pada tahun 2015 sebanyak 16.784 KK bertambah menjadi 21.952 KK pada tahun 2022.

Tabel 2.117
Panjang jaringan listrik PT.PLN (Persero) menurut jenis jaringan di Kabupaten Samosir

Kategori Pelanggan	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
JTM (KMS)	506.419	524.809	NA	524.855	618.811	620.948	621.294
JTR (KMS)	718.843	718.843	NA	719.945	812.051	813.838	813.838
Trafo (unit)	424	437	NA	440	466	483	484
Kapasitas Trafo Distribusi (KVA)	16.784	17.958	NA	17.962	21.303	22.203	21.952

4. Perdagangan

Pencapaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2015-2022 antara lain kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni pada tahun 2015 sebesar 10,83 persen dan kemudian pada tahun 2022 menjadi 11,49 persen. Ekspor Bersih Perdagangan US\$ sampai tahun 2022 yakni belum ada. Capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan) sebesar 100 persen persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 47,41 persen, persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 39,97 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2019 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,68	10,81	10,89	10,88	10,87	10,84	11,03	11,49
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan) (%)	-	-	87	93	100	-	-	-
3	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	-	36,69	39,45	45,67	47,41	-	-	-
4	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatera yang berlaku (%)	-	23,78	28,45	30,12	39,97	-	-	-

Sumber : Bappedalitbang Kab. Samosir

5. Perindustrian

a. Pertumbuhan Industri

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Samosir. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Samosir cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Samosir cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yakni tahun 2015 sebesar 0,57 persen dan kemudian menjadi 0,51 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan industri juga cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2015-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persen	0,57	0,55	0,54	0,52	0,51	0,52	0,51	0,51

Sumber : BPS Kab. Samosir

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB relatif kecil jika dibandingkan dengan berbagai sektor lainnya. Kabupaten Samosir memiliki potensi sektor industri pengolahan yang tidak cukup berkembang. Industri terbesar justru dari sektor pariwisata. Berikut adalah data mengenai pelaku industri rumah tangga dari dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir :

Tabel 2.120
Pelaku Industri Rumah Tangga Kabupaten Samosir Tahun 2020

No	Nama Pelaku Industri Rumah Tangga	L/P	Alamat		Jlh	Jenis Usaha/Produk
			Kec	Lokasi/Desa		
1	2	3	4	5	6	7
I	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN KAYU		Simanindo	Desa Siallagan - Kel. Ambarita	7	Ukiran Kayu
				Kel. Tuktuk Siadong	9	Ukiran Kayu
				Tomok	1	Ukiran Kayu
				Kel. Tuktuk Siadong	5	Ukiran Kayu
II	INDUSTRI KERAJINAN TENUN		Sianjur Mula-mula	Desa Hasinggaan	17	Tenun/Ulos (gedokan)
			Pangururan	Desa Sitolu Huta	1	Tenun/Ulos (gedokan)
				Desa Lumban Suhi-suhi	22	Tenun/Ulos (gedokan)
				Desa Siopat Sosor	16	Tenun/Ulos (gedokan)
				Desa Sitolu Huta	14	Tenun/Songket
				Desa Sitolu Huta	3	Tenun/Ulos (ATBM)
			Palipi	Desa Mogang	20	Tenun/Ulos (ATBM)
III	KACANG RONDAM		Pangururan	Desa Huta Godang	1	Kacang Rondam
				Desa Pardomuan I	2	Kacang Rondam
IV	INDUSTRI KERAJINAN ANYAMAN ECENG GONDOK		Pangururan	Desa Hutanamora	6	Kerajinan E. Gondok
				Kelurahan Pasar Lama	10	Kerajinan E. Gondok
V	INDUSTRI KERAJINAN ANYAMAN PANDAN		Pangururan	Desa Hutanamora	6	Tikar, Tandok, Tas
VI	INDUSTRI KERAJINAN BAMBU		Onan Runggu	Onan Runggu	7	Kerajinan Bambu
				Harian	2	Kerajinan Bambu
				Sitinjak	2	Kerajinan Bambu
				Huta Hotang	2	Kerajinan Bambu
				Pakpahan	4	Kerajinan Bambu
				Garoga	2	Kerajinan Bambu
				Onan Baru	1	Kerajinan Bambu
VII	INDUSTRI KERAJINAN PENGOLAHAN BUBUK KOPI		Pangururan		3	Bubuk Kopi
VIII	INDUSTRI KERAJINAN SABLON		Pangururan	Desa Parsaoran I	6	Sablon
				Kelurahan Siogung-ogung	2	Sablon
				Kel. Pintusona	3	Sablon
				Kel. Pasar Lama	10	Sablon
IX	INDUSTRI BAKERY		Pangururan	Desa Buhit	2	Bakery/Keripik
				Desa Pardomuan I	2	Bakery/Keripik

Sumber : Dinas Koprakerindag Kab. Samosir

2.6 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 merupakan agenda Internasional yang melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals (MDGs)*. TPB terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang dijadikan tuntunan bagi berbagai pemangku kepentingan. Konsep TPB memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup serta hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB ini

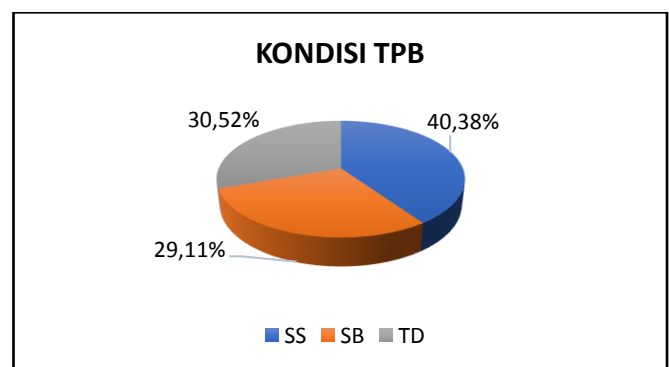
diharapkan mampu mendorong pembangunan yang didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi serta lingkungan hidup. Adapun motto yang melekat dalam TPB adalah “*No one left behind*” yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

2.6.1 Kondisi Umum Capaian TPB (KLHS RPJPD)

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan ini. Seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki target – target yang berhubungan dengan pekerjaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana dari agenda pembangunan akan tetapi juga sebagai pembuat kebijakan, katalis perubahan dan tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan komitmen pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu mengetahui sejauh mana capaian tujuan pembangunan yang ada di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap target – target pembangunan berkelanjutan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pembagiannya, jumlah indikator yang merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah sebanyak 220 indikator. Akan tetapi, keseluruhan indikator TPB tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masing – masing kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 194 indikator TPB yang disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Samosir.

Evaluasi terhadap capaian indikator TPB dilakukan dengan mem ingkan realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap indikatornya. Indikator dengan selisih/gap yang signifikan antara capaian dan targetnya dikelompokkan sebagai isu prioritas dalam pengkajian pengaruh arah kebijakan KLHS. Setiap indikator dalam tujuan dan target TPB memiliki capaian yang berbeda-beda berdasarkan data maupun proyeksi target hingga tahun 2030.



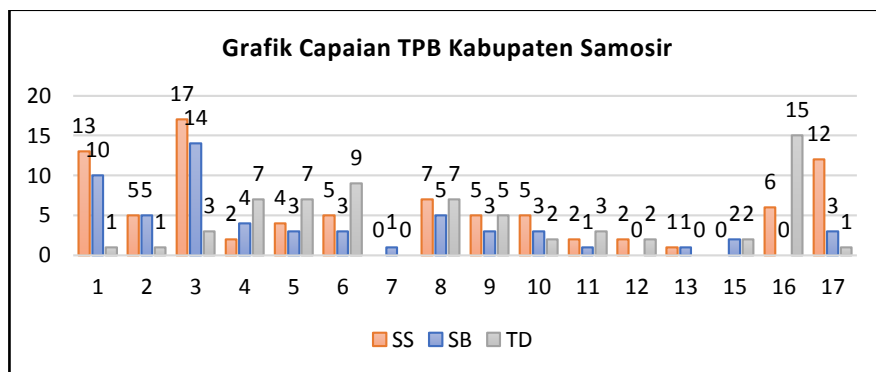
Gambar 2.19. Persentase Capaian TPB Kabupaten Samosir

Terdapat 194 indikator dan 40,38% indikator TPB sudah mencapai target yang ditetapkan nasional sementara 29,11% indikator belum mencapai target. Dan terdapat 30,52% indikator yang saat ini tidak ada datanya sehingga diperlukan pendataan di kemudian hari. evaluasi terhadap capaian TPB di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121
Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Samosir

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Data n/a dan Perlu pendataan
1	Tanpa kemiskinan	24	13	10	1
2	Tanpa Kelaparan	11	5	5	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	17	14	3
4	Pendidikan Berkualitas	13	2	4	7
5	Kesetaraan Gender	14	4	3	7
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	5	3	9
7	Menjamin Akses Energi	1	0	1	0
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	19	7	5	7
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	13	5	3	5
10	Mengurangi Kesenjangan	10	5	3	2
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	6	2	1	3
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	2	0	2
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	1	0
14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera, dan Maritim	4	0	2	2
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	21	6	0	15
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	16	12	3	1
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	24	13	10	1

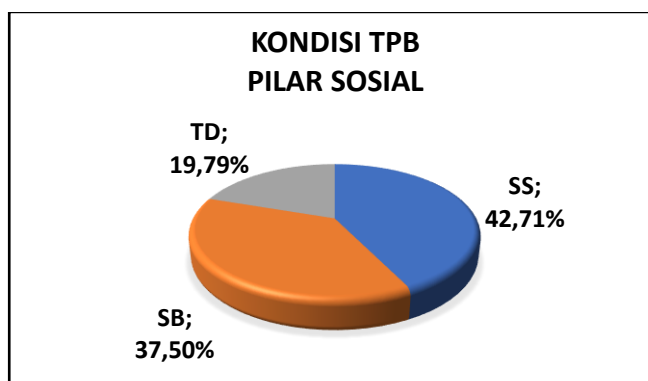
Sumber: KLHS Kab. Samosir



Gambar 2.20. Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Samosir

2.6.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

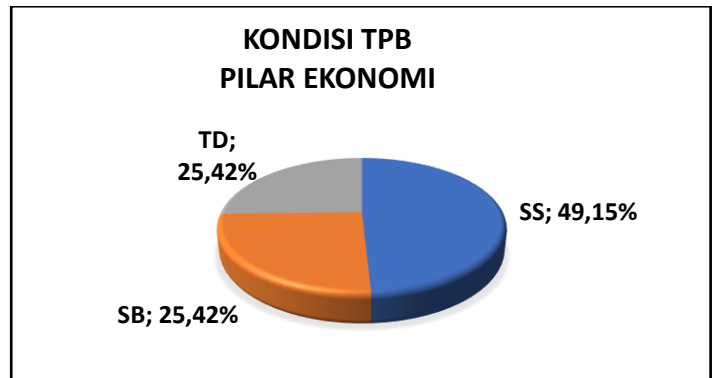
Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, dan TPB 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 96 indikator. Indikator yang telah mencapai target sebanyak 41 indikator. Terdapat 36 indikator yang belum mencapai target, 16 indikator yang datanya tidak tersedia. Persentase capaian target indikator pilar sosial dapat dilihat pada grafik di bawah.



Gambar 2.21. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

2.6.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

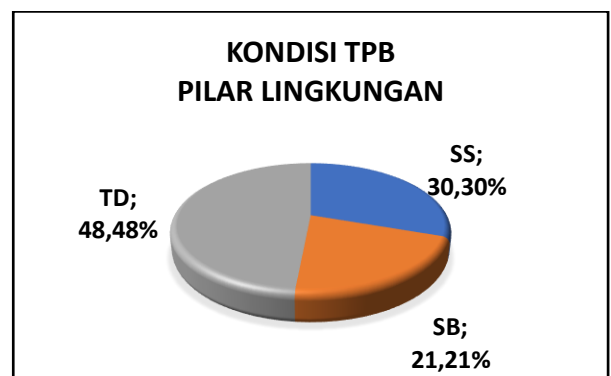
Pilar ekonomi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 07, TPB 08, TPB 09, TPB 10, dan TPB 17. Total indikator yang termasuk ke dalam pilar ekonomi adalah sebanyak 59 indikator. Indikator yang telah mencapai target sebanyak 29 indikator. Terdapat 15 indikator yang belum mencapai target, dan 15 indikator yang datanya tidak tersedia. Persentase capaian target indikator pilar ekonomi dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.22. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

2.6.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan hidup dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15. Total indikator untuk pilar lingkungan hidup adalah sebanyak 33 indikator. Indikator yang telah mencapai target sebanyak 10 indikator. Sementara itu, hanya terdapat 7 indikator yang belum mencapai target dan 16 indikator yang datanya tidak tersedia. Persentase capaian target indikator pilar lingkungan hidup dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

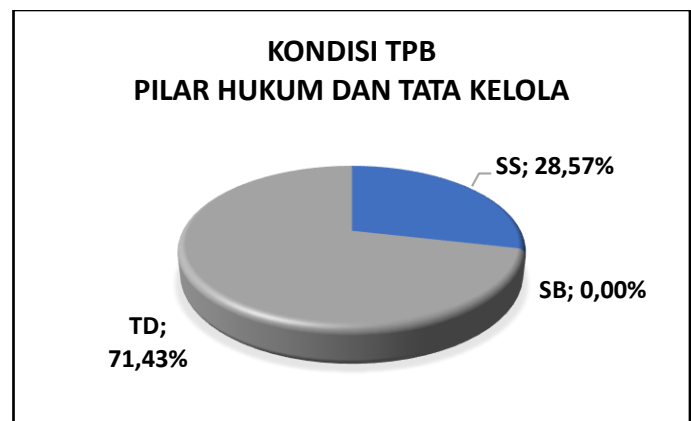


Gambar 2.23. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

2.6.5 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan hanya mencakup satu tujuan yaitu TPB 16. Total indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini adalah sebanyak 21 indikator dengan 6 indikator telah mencapai target. Terdapat 0 indikator yang belum mencapai target, 15

indikator yang perlu pendataan. Persentase capaian target indikator pilar hukum dan tata kelola kelembagaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.24. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

2.7 Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 memperhatikan perencanaan-perencanaan lainnya. Berikut adalah hasil penelaahan dokumen – dokumen perencanaan lainnya:

2.7.1. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** yang berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda transformasi, 17 arah pembangunan dan 45 indikator. Delapan misi tersebut terdiri dari :

- a. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
- b. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, *blue economy*, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan berkelanjutan.
- c. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi yang adaptif dan birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat.

- d. **Memantapkan stabilitas dan ketangguhan diplomasi** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.
- e. **Memantapkan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** dengan memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
- f. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi, stabilitas, dan ketahanan.
- g. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
- h. **Kesinambungan pembangunan** diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, komunikasi publik yang handal, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

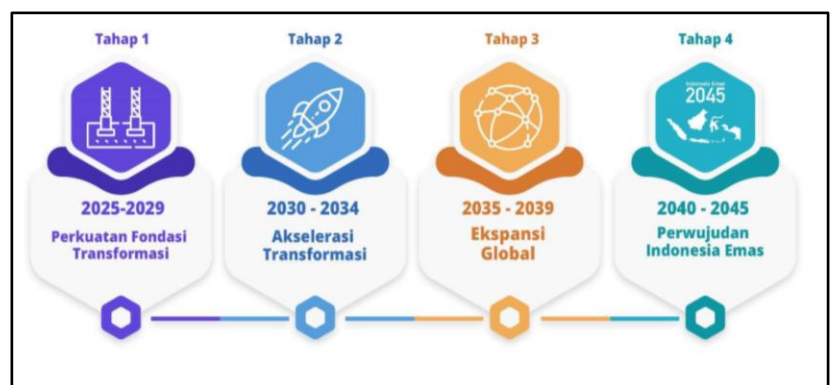
Dokumen RPJPN ditetapkan sebanyak tujuh belas arah pembangunan yakni :

1. Kesehatan Untuk Semua
2. Pendidikan kualitas yang merata
3. Perlindungan Sosial Yang adaptif
4. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang agile dan kolaboratif
10. Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045
11. Stabilitas Ekonomi Makro
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan berdaya Gentar Kawasan
13. Beragama Maslahat dan berbudaya maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, Air dan Kemandirian Pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Menetapkan sebanyak 45 indikator yang terdiri dari :

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
2. Kesehatan ibu dan anak
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
5. Hasil Pembelajaran Berkualitas
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
8. Tingkat Kemiskinan (%)

9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
11. Rasio PDB Industri Pengolahan (persen)
12. Rasio PDB Pariwisata (persen)
13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (persen)
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
17. Tingkat penguasaan Iptek
18. Indeks Ekonomi Hijau
19. ndeks daya saing digital tingkat global (peringkat
20. Biaya Logistik (% PDB)
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)
22. Ekspor Barang dan Jasa (persen PDB)
23. Kota maju inklusif dan berkelanjutan
24. Indeks materi hukum
25. Indeks SPBE
26. Indeks Pelayanan Publik
27. Indeks Akti korupsi
28. Indeks Pembangunan hukum
29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
30. Indeks Demokrasi Indonesia
31. Rasio Pajak terhadap PDB (persen)
32. Tingkat Inflasi
33. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan
34. Inklusi keuangan (%)
35. Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)
36. Asia Power Indeks (*military Capability*)
37. Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)
38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (UKUB)
39. Indeks pembangunan kualitas keluarga
40. Indeks Ketimpangan Gender
41. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
42. Kulit lingkungan hidup
43. Ketahanan Energi, air dan Pangan
44. Proporsi Kerugian Ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%)
45. Persentase penurunan Emisi GRK (%)



Gambar 2.25. Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dijelaskan pertahap.

1. Tahap Pertama (2025-2029)

- a. **Transformasi sosial** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- b. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa.
- c. **Transformasi tata kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan dan regulasi yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat sipil.
- d. **Stabilitas dan ketangguhan diplomasi** difokuskan pada penguatan stabilitas hukum, politik, dan keamanan yang mencakup penegakan hukum dan anti korupsi, penguatan regulasi terkait demokrasi dan sistem politik, penguatan ketahanan dan keamanan luar negeri; sedangkan, stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
- e. **Pengembangan diplomasi yang tangguh** difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, serta mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.
- f. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.
- g. **Pembangunan wilayah** pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (*Smart Grid*).
- h. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

2. Tahap Kedua (2030-2034) (dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Indonesia melakukan akselerasi transformasi.

- a. **Transformasi sosial** dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas.
- b. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di luar Jawa termasuk melanjutkan pembangunan IKN dan daerah mitranya, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan blue economy, green economy, dan bio economy.

- c. **Transformasi tata kelola** difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera dan berkompeten, deregulasi secara masif dan penguatan naskah urgensi regulasi, partai politik yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipatif.
 - d. **Stabilitas dan ketangguhan diplomasi** difokuskan pada semakin rendahnya tingkat kriminalitas dan mulai menguatnya diplomasi proaktif, semakin menurunnya tingkat korupsi dan mulai tertanamnya budaya hukum, terlaksananya digitalisasi pemilu secara lebih baik, adaptifnya pengelolaan fiskal dan moneter terhadap guncangan, serta dalam pengembangan diplomasi yang tangguh, konsolidasi kebijakan sinergis, infrastruktur dan kelembagaan diplomasi telah bekerja secara efektif.
 - e. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah; meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; dan terwujudnya generasi muda yang sadar akan peran keluarga dalam meningkatkan ketangguhan sosial dan budaya.
 - f. **Pembangunan wilayah** difokuskan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan superhub ekonomi IKN yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital.
- 3. Tahap Ketiga (2035-2039)**, Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pada kisaran 7,0 - 8,0 persen per tahun.
- a. **Transformasi social** dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada penguatan transformasi yang menghasilkan *economic powerhouse* melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara internasional dan berkelanjutan dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran dalam Global Value Chain, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi hub maritim Asia.
 - c. **Transformasi tata kelola ditekankan** pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, lembaga tunggal pengelola regulasi, penyusunan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik yang transparan dan akuntabel, kemitraan pemerintah – non pemerintah, efektivitas pengendalian pembangunan, serta pelayanan publik yang inovatif, dan masyarakat sipil yang kuat dan mandiri.
 - d. **Stabilitas dan ketangguhan diplomasi**, pada tahap ini difokuskan pada pemantapan Indonesia sebagai kekuatan di kawasan dan penguatan ketertiban masyarakat, pelaksanaan budaya hukum dan penghapusan korupsi, menciptakan platform ruang publik non komersil berbasis digital yang aman dan sehat, peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja negara, serta penguatan diplomasi yang sinergis didukung oleh infrastruktur dan kelembagaan diplomasi yang handal telah mengantarkan Indonesia menjadi Global Player.

- e. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada terwujudnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, generasi muda yang sadar akan peran keluarga dalam meningkatkan ketangguhan sosial dan budaya, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif, penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan.
 - f. **Pembangunan wilayah** pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.
- 4. Tahap Keempat (2040-2045)**, Indonesia berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi meskipun menurun tetap terjaga cukup tinggi pada kisaran rata-rata 5,8 – 7,1 persen per tahun.
- a. **Transformasi sosial** dititikberatkan pada perwujudan manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui semakin besarnya SDM dan inovasi Indonesia yang berdaya saing global.
 - b. **Transformasi tata kelola** difokuskan pada perwujudan tata kelola kolaboratif yang dicirikan dengan kelembagaan yang adaptif, ASN yang profesional, ekosistem regulasi yang tangguh, partai politik yang modern dan berintegritas, serta masyarakat sipil yang kuat, mandiri, dan partisipatif.
 - c. **Stabilitas dan ketangguhan diplomasi** difokuskan untuk menguatnya kepemimpinan Indonesia di Asia-Pasifik serta terciptanya rasa aman dan nyaman di masyarakat, hapusnya korupsi dan terwujudnya budaya hukum yang baik, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya pengelolaan fiskal dan moneter untuk menghadapi berbagai ancaman VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta berlanjutnya penguatan diplomasi Indonesia yang tangguh telah memantapkan peran dan pengaruh Indonesia sebagai Global Player.
 - d. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada terwujudnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, generasi muda yang sadar akan peran keluarga dalam meningkatkan ketangguhan sosial dan budaya, Indonesia menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup yang berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, produk pangan termasuk produk olahan Indonesia mendunia, sumber daya hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan farmakologi, dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian Net Zero Emission.
 - e. **Pembangunan wilayah** pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dengan dukungan tata kelola

kelembagaan yang handal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.

2.7.2. Penelaahan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

2.7.3. Penelaahan RPJPD dengan Kabupaten Tetangga

Penelaahan RPJPD daerah lainnya dilakukan dalam menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Samosir. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang dengan daerah-daerah lain yang terkait. Beberapa daerah yang terkait dengan Kabupaten Samosir antara lain Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Alasan penelaahan RPJPD daerah-daerah tersebut antara lain:

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/ kawasan pembangunan.

Tabel 2.122

Identifikasi RPJP Kabupaten se-Kawasan Danau Toba

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait
1.	Kabupaten Simalungun	Visi : Misi : Kebijakan yang memiliki kaitan dengan RPJPD kab. Samosir 1. 2.
2.	Kabupaten Toba	Visi : Misi : Kebijakan yang memiliki kaitan dengan RPJPD kab. Samosir 1.
3.	Kab. Tanah Karo	Visi : Misi : Kebijakan yang memiliki kaitan dengan RPJPD kab. Samosir 1.
4.	Kabupaten Tapanuli Utara	Visi : Misi : Kebijakan yang memiliki kaitan dengan RPJPD kab. Samosir 1.
5.	Kabupaten Humbang	Visi : Misi : Kebijakan yang memiliki kaitan dengan RPJPD kab. Samosir 1.
6.	Kabupaten Dairi	Visi : Kabupaten Dairi Menjadi Kawasan Agroindustri Terkemuka di Sumatera Bagian Utara, Berdaya Saing, Inklusif, Sejahtera, dan Lestari. Misi : 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera dan SDM yang berdaya saing; 2. Mewujudkan daya saing daerah berbasis agroindustri; 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif berbasis digital; 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Arah kebijakan : 1. Penguatan fondasi kesejahteraan masyarakat; 2. Akselerasi kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing;

		3. Memperkokoh kesejahteraan dan daya saing daerah yang berkelanjutan; 4. Kesejahteraan dan daya saing yang berkelanjutan. Kebijakan yang memiliki kaitan dengan RPJPD Kabupaten Samosir 1.
7.	Kabupaten Pakpak Bharat	Visi : Misi : Kebijakan yang memiliki kaitan dengan RPJPD kab. Samosir 1.

2.7.4 Penelaahan RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 2 Tahun 2017 sesuai dengan pola dan struktur ruang kabupaten samosir ditempatkan sebagai:

1. Pengembangan Sentra Produksi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi yang terletak di Kecamatan Harian
2. Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan hewan besar dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan besar.
3. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan. Untuk Kabupaten Samosir terdiri dari:
 - a. Tambang panas bumi;
 - b. Tambang belerang;
 - c. Tambang air tanah.
4. Kawasan Operasi dan Latihan Pertahanan Udara yang terletak di obyek-obyek vital nasional di seluruh wilayah tanggung jawab Kosek Hanudnas III yaitu PT Inalum Kabupaten Asahan dan Bendungan Sigura-gura Kabupaten Samosir

4.6.6 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir tahun 2018-2038

BAB III

TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Analisis kependudukan dapat merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Demografi merupakan studi tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik.

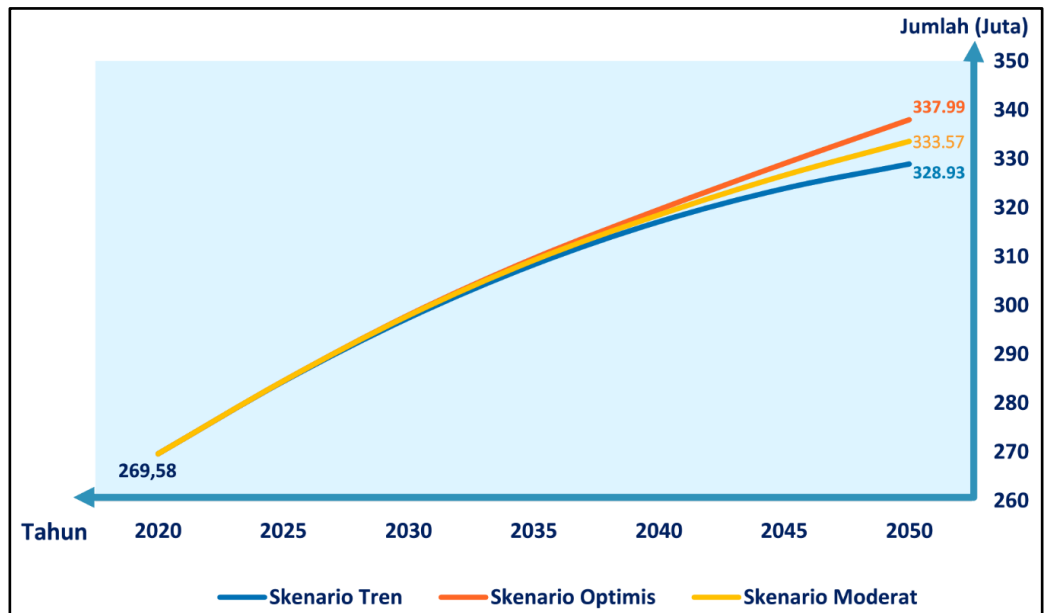
3.1. Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk

Penduduk dalam satu wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Penduduk suatu wilayah didefinisikan sebagai orang yang biasa (sehari-hari) tinggal di wilayah itu. Cara ini disebut juga menggunakan konsep *usual residence*.

Persebaran penduduk, konsentrasi penduduk di seluruh daerah di Indonesia tidaklah sama, bahkan di setiap negara. Setelah dipetakan tampak bahwa tempat tinggal penduduk tersebar secara tidak merata. Tugas geografi kemudian adalah melakukan analisis mengapa persebaran itu tidak merata, membandingkan karakteristik geografis wilayah yang padat dan yang jarang penduduknya, serta menggali faktor-faktor geografis manakah yang mempengaruhi persebaran penduduk tak merata.

3.1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan sensus penduduk terdahulu maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 270,20 juta jiwa. Bertambah 32,56 juta jiwa dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010.



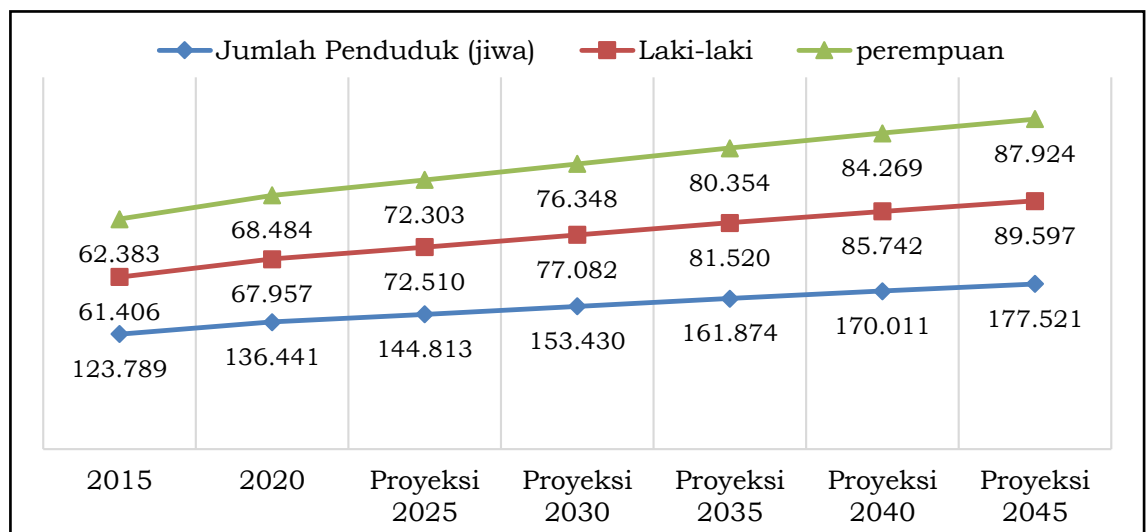
Gambar 3.1 Proyeksi Penduduk Indonesia

Penduduk Kabupaten Samosir terus meningkat selama 8 tahun terakhir dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,93% per tahunnya dengan rasio rata-rata jenis kelamin sebesar 98,43%. Data tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah pada setiap tahunnya. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai keberhasilan upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) atau juga dapat dilihat sebagai rendahnya tingkat penambahan penduduk akibat tingginya angka kematian bayi maupun balita serta faktor-faktor lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2022 sebanyak 139.337 jiwa. Jika diproyeksikan hingga tahun 2035 ke depan, berada di angka 161.874 jiwa sesuai dengan proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara 2020 – 2035.

Tabel 3.1
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
141.330	144.813	153.430	161.874	170.011	177.521

Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir 2015, 2020, dan Proyeksi 2025 – 2045

Tabel 3.2
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki (jiwa)	70.650	72.510	77.082	81.520	85.742	89.597
Perempuan (jiwa)	70.690	72.303	76.348	80.354	84.269	87.924
Rasio (%)	99,94	100,29	100,96	101,454	101,75	101,90

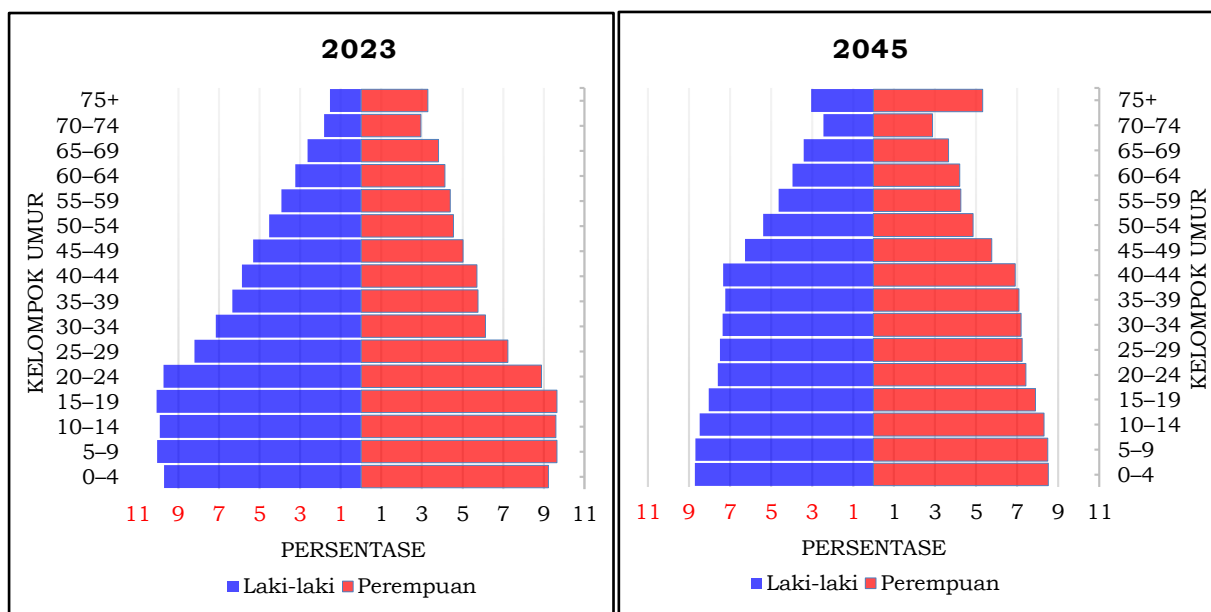
Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) terhadap total populasi pada tahun 2023 sebesar 62,91% dan persentase penduduk usia nonproduktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 37,09%, dengan rasio ketimpangan sebesar 58,95%. Sedangkan proyeksi pada tahun 2045, persentase penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) terhadap total populasi sebesar 64,04% dan persentase penduduk usia nonproduktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 35,96%, dengan rasio ketimpangan sebesar 56,14%.

Tabel 3.3
 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
0 – 14 Tahun (jiwa)	41.080	41.060	41.528	42.848	44.537	45.434
15 – 64 Tahun (jiwa)	88.930	91.639	98.125	103.721	108.829	113.693
> 65 Tahun (jiwa)	11.340	12.114	13.777	15.305	16.645	18.394
Angka Ketergantungan (%)	58,95	58,03	56,36	56,07	56,22	56,14

Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 3.3. Piramida Penduduk Kabupaten Samosir 2023 dan 2045

3.1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

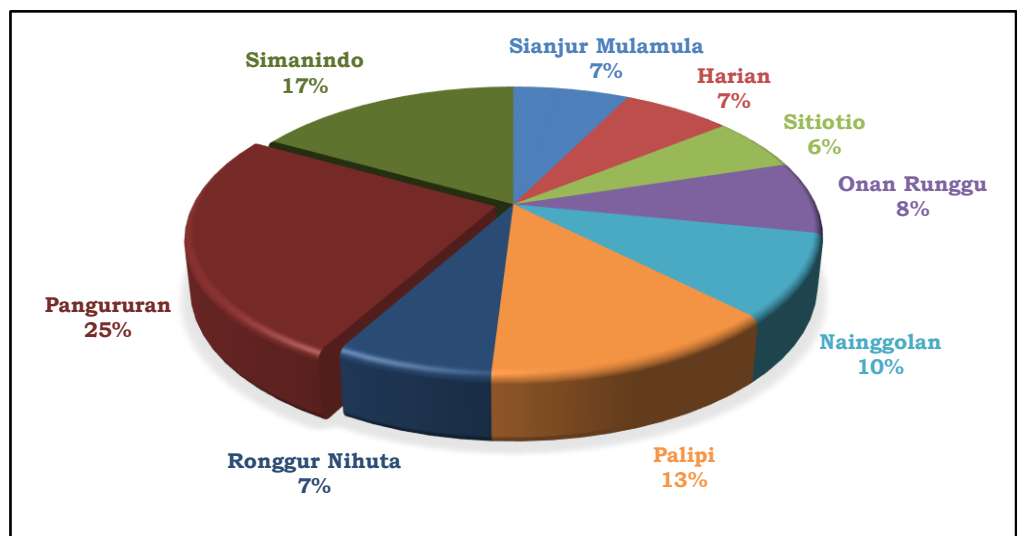
Konsentrasi penduduk di suatu wilayah atau kepadatan penduduk kasar atau *crude population density (CPD)* adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Kepadatan penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan “Kabupaten Samosir dalam Angka 2023” adalah sebesar 96,48 jiwa/km². Dibandingkan tahun 2015, angka kepadatan penduduk Kabupaten Samosir adalah 85,71 jiwa/km². Hasil ini menunjukkan, dengan luas daratan Kabupaten Samosir 1.444,25 km² maka

kepadatan penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2045 diperkirakan sebanyak 122,92 jiwa/km².

Kepadatan penduduk Kabupaten Samosir antara kecamatan yang satu dan yang lain masih didominasi oleh Kecamatan Pangururan sebagai pusat ekonomi dan ibukota kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Simanindo sebagai pusat wisata dan perhotelan, kemudian Kecamatan Palipi.

Selama kurun waktu delapan tahun terakhir, terdapat peningkatan kepadatan penduduk sebesar 11,92%. Berdasarkan “Kabupaten Samosir dalam Angka 2023”, Kecamatan Pangururan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 35.104 jiwa (25,19%), sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Sitiotio yaitu 8.288 jiwa (5,95%).

Pertumbuhan rata-rata penduduk Kabupaten Samosir 0,98% setiap tahunnya. Persebaran penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2022 dapat digambarkan sesuai Gambar 3.4 berikut



Gambar 3.4. Persebaran Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2022

3.2. Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Penduduk

3.2.1. Rumah/Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain pakaian dan makanan. Setiap manusia membutuhkan rumah untuk tempat berlindung dan sebagai tempat berkumpul dan berlangsungnya aktivitas keluarga. Fungsi rumah juga telah berubah, dari yang semula hanya sekedar sebagai tempat berlindung, namun juga dituntut untuk mengakomodir kebutuhan dan keinginan pemiliknya.

Kondisi adat dan budaya Kabupaten Samosir yang tidak mau menumpang hidup dengan orang tuanya memicu kemandirian masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya termasuk rumah, sehingga tidak terdapat *backlog* perumahan di Kabupaten Samosir. Justru saat ini masih terdapat rumah yang tidak berpenghuni, namun masih terdapat rumah tidak layak huni berdasarkan struktur bangunan. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Samosir diiringi juga dengan kebutuhan rumah, dapat diproyeksikan dalam berikut :

Tabel 3.4
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Samosir

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	141.330	144.813	153.430	161.874	170.011	177.521
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	28.266	28.963	30.686	32.375	34.002	35.504

Catatan: Berdasarkan SNI 03-1733-2004, diasumsikan jumlah penghuni rumah rata-rata 5 jiwa per rumah.
Sumber: Olahan data Bappedalitbang Kabupaten Samosir

3.2.2. Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi eksisting penyediaan air bersih dan sanitasi Kabupaten Samosir tahun 2022 berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir masih di angka 52,85%. Dengan adanya pertumbuhan demografi 2045 sebesar 27,89% maka kebutuhan akan air bersih juga semakin tinggi. Dengan kondisi ibukota Kabupaten Samosir yaitu Kecamatan Pangururan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan air di Kecamatan Pangururan juga akan semakin tinggi. Semakin tingginya kebutuhan air bersih ini, kebutuhan akan air baku yang layak juga akan semakin tinggi.

Tabel 3.5
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Samosir

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	141.330	144.813	153.430	161.874	170.011	177.521
Idle Capacity	Danau Toba					
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	8.830.545	9.283.335	10.403.545	11.501.265	12.559.075	13.535.375

Catatan: Berdasarkan SNI 67281-2015, diasumsikan kebutuhan air 100 liter/orang/hari.
Sumber: Olahan data Bappedalitbang Kabupaten Samosir

3.2.3. Energi/Listrik

Kondisi Kabupaten Samosir tahun 2022 masih terdapat 684 rumah yang belum teraliri aliran listrik. Sesuai dengan proyeksi kebutuhan listrik tahun 2045 maka kebutuhan akan listrik juga akan semakin tinggi. Di samping pertumbuhan penduduk, faktor yang mempengaruhi sektor jasa, pertanian, dan manufaktur.

Tabel 3.6
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Samosir

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	141.330	144.813	153.430	161.874	170.011	177.521
Jumlah Rumah (unit)	28.266	28.963	30.686	32.375	34.002	35.504
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kVA)	32.498.834	33.299.749	35.281.229	37.222.926	39.094.029	40.820.954

Catatan: Berdasarkan SNI 03-1733-2004, setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

Sumber: Olahan data Bappedalitbang Kabupaten Samosir

3.2.4. Persampahan

Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang, perlu didukung oleh lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat adalah seberapa baiknya pengolahan sampah dilakukan. Pertumbuhan penduduk dan semakin baiknya potensi wisata di Kabupaten Samosir maka pengolahan sampah perlu menjadi fokus utama dalam penyelamatan lingkungan. Semakin banyak penduduk maka sampah juga akan semakin banyak.

Tabel 3.7
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Samosir

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	141.330	144.813	153.430	161.874	170.011	177.521
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	38.689	39.643	42.001	44.313	46.668	48.596

Catatan: Berdasarkan SNI 3242-2008, diasumsikan timbulan sampah 0,75 kg/orang/hari.

Sumber: Olahan data Bappedalitbang Kabupaten Samosir

3.2.5. Sarana Kesehatan

a. Rumah Sakit

Rasio antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk sebesar 1:1000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Kondisi saat ini Kabupaten Samosir hanya memiliki 1 (satu) unit rumah sakit yaitu RSUD dr. Hadrianus Sinaga yang hanya menyediakan 126 tempat tidur, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2022 sebanyak 139.337 jiwa sudah sewajarnya rumah sakit melakukan pembenahan dengan menambahkan ruang rawat inap. Merujuk pada pertumbuhan penduduk seperti pada Tabel 3.1 Pemerintah Kabupaten Samosir perlu konsentrasi dalam penambahan ruangan tersebut.

b. Puskesmas

Kondisi saat ini 12 puskesmas masih sangat ideal untuk melayani penduduk sejumlah 139.337 jiwa. Namun perlu melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan, seperti Kecamatan Pangururan dengan jumlah penduduk sejumlah 36.243 jiwa pada tahun 2022, sudah sewajarnya Pangururan memiliki sedikitnya 2 puskesmas untuk dapat melayani seluruh penduduk yang ada di Kecamatan Pangururan pada tahun 2045.

c. Tenaga Medis

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2025 di antaranya rasio dokter spesialis 12 per 100.000 penduduk, dokter umum 50 per 100.000 penduduk, dokter gigi 14 per 100.000 penduduk.

Sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk maka jumlah tenaga kesehatan (dokter) perlu ditambah untuk memaksimalkan layanan kesehatan di Kabupaten Samosir.

Tabel 3.8
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Samosir

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	141.330	144.813	153.430	161.874	170.011	177.521
Proyeksi Fasilitas Kesehatan:						
- Rumah Sakit (unit)	1	1	1	1	2	2
- Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) (unit)	12	13	13	13	14	14
- Pustu (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu) (unit)	34	34	34	34	34	34
- Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) (unit)	230	230	230	230	230	230
- Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) (unit)	66	66	66	66	66	66
- Polindes (Pondok Bersalin Desa) (unit)	68	68	68	68	68	68
- Dokter Umum (orang)	44	45	50	55	60	65
- Dokter Spesialis (orang)	19	20	20	20	25	25
- Dokter Gigi (orang)	16	17	17	18	20	20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir

3.2.6. Sarana Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan sarana pendidikan untuk dapat menampung semua penduduk dalam usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2022, rasio ketersediaan sekolah di jenjang SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan SMA/MA (Madrasah Aliyah) serta SMK setiap tahunnya tidak banyak mengalami perubahan dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah cenderung cukup.

Untuk kebutuhan gedung sekolah berdasarkan proyeksi penduduk hingga 2035 dengan asumsi usia 5 – 14 tahun adalah angka usia sekolah dengan jumlah 27.270, jumlah Sekolah Dasar yang ada saat ini (pada saat penyusunan RPJPD) masih dapat digunakan secara keseluruhan dan dapat dilakukan peningkatan kualitas gedung sekolah. Dengan perbandingan jumlah murid antara SD dan SMP pada tahun 2020, maka rasio SMP akan mencapai 1:570 pada tahun 2035. Dengan asumsi satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak berjumlah 28 peserta didik, maka jumlah sekolah sebanyak 35 unit sekolah SMP belum cukup untuk menampung semua siswa SMP yang ada di Kabupaten Samosir. Begitu juga dengan SMU/SMK.

Tabel 3.9
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Samosir

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	141.330	144.813	153.430	161.874	170.011	177.521
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (unit):						
Jumlah Penduduk Kelompok Umur 5 – 6 Tahun	5.494	5.452	5.460	5.804	6.068	6.126
Proyeksi TK	11	45	46	48	51	51
Jumlah Penduduk Kelompok Umur 7 – 12 Tahun	16.529	16.443	16.231	16.581	17.510	18.131
Proyeksi SD/MI	196	69	68	69	73	76
Jumlah Penduduk Kelompok Umur 13 – 15 Tahun	8.370	8.257	8.196	8.057	8.302	8.778

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi SMP/MTs	35	23	23	22	23	24
Jumlah Penduduk Kelompok Umur 16 – 18 Tahun	8.407	8.240	8.243	8.135	8.048	8.487
Proyeksi SMA/MA/SMK	21	23	23	23	22	24

Catatan: Berdasarkan SNI 03-1733-2004, diasumsikan setiap TK berjumlah 120 peserta didik (dalam 2 rombongan belajar), setiap SD/MI berjumlah 240 peserta didik (dalam 6 rombongan belajar), setiap SMP/MTs berjumlah 360 peserta didik (dalam 9 rombongan belajar), setiap SMA/MA/SMK berjumlah 360 peserta didik (dalam 9 rombongan belajar).

Sumber: Olahan data Bappedalitbang Kabupaten Samosir

BAB IV

PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

4.1 Rencana Struktur Ruang

Penataan ruang Kabupaten Samosir dititik beratkan pada upaya untuk mengembangkannya sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis ekologi. Semua kegiatan yang ditata di atas ruang Kabupaten, baik yang berada di daratan Sumatera maupun di Pulau Samosir, harus mempertimbangkan sistem lingkungannya. Tidak ada satu kegiatanpun yang ditata dengan mengubah bentang alam asli yang sudah ada. Bentang alam (*landscape*) alami Kabupaten Samosir harus dipertahankan agar visi Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis pada kekayaan alam, dapat tercapai.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat kegiatan kabupaten dan sistem jaringan prasarana.

4.1.1 Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Samosir

4.1.1.1 Sistem Perkotaan

A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL berada di Perkotaan Pangururan Kecamatan Pangururan dan direncanakan akan berkembang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pada pusat ini, fungsi-fungsi yang terlayani adalah sebagai pusat pelayanan administrasi/pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

B. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKLp di Kabupaten Samosir ditetapkan di 7 (tujuh) lokasi yaitu Simanindo, Ambarita dan Tomok Kecamatan Simanindo, Dataran Tinggi Tele Kecamatan Harian, Nainggolan Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu dan Kawasan Sigulatti/Sagala Kecamatan Sianjurnmulamula. Pada pusat ini, fungsi-fungsi yang terlayani adalah sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK ditetapkan di ibukota Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Siotio, Kecamatan Palipi dan Kecamatan Onan Runggu. Pada pusat ini, fungsi-fungsi yang terlayani adalah sebagai pusat perdagangan, pertanian, transportasi atau perhubungan.

4.1.1.2 Sistem Perdesaan

Kawasan perdesaan yang terdapat di Kabupaten Samosir yaitu berupa **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)** sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL yang terdapat di Kabupaten Samosir yaitu Desa Urat II Kecamatan Palipi, Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu, Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta, Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo, Desa Cinta Maju Kecamatan Siotio, Desa Sampur Toba Kecamatan Harian dan Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mulamula.

4.1.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang melintasi hutan lindung, kawasan sempadan sungai dan Danau, kawasan rawan bencana masih diperkenankan dibangun dengan ketentuan:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

4.1.2.1 Rencana Sistem Prasarana Utama

Rencana sistem prasarana utama terdiri dari sistem transportasi darat dan sistem transportasi udara. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Rencana sistem jaringan transportasi darat di Kabupaten Samosir terdiri atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan penyeberangan.

1. Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan dan jembatan serta jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

- 1) Jaringan jalan dan jembatan. Jaringan jalan bertujuan untuk melayani distribusi barang dan jasa, mengembangkan aksesibilitas pariwisata yang handal, adaptif terhadap bencana dan ramah lingkungan. Jaringan jalan di Kabupaten Samosir terdiri dari:

a. Jaringan jalan kolektor meliputi:

- Jaringan jalan kolektor K1 meliputi ruas Batas Dairi – Dolok Sanggul, Tomok – Ambarita, Ambarita – Simanindo, Simanindo – Pangururan, Tele – Pangururan, Pangururan – Nainggolan, Nainggolan – Onan Runggu, Onan Runggu – Tomok; dan
- Jaringan jalan kolektor K3 meliputi ruas Gonting – Janji Raja, Simarmata - Simpang Sinapuran dan Palipi-Parmonangan;

b. Jaringan jalan strategis meliputi:

- Pangururan – Hasinggahan – Binangara, Tomok – Dermaga Tomok, Simanindo – Dermaga Simanindo, Onan Runggu – Dermaga Onan Runggu, Nainggolan – Dermaga Nainggolan; dan
- Batas Kabupaten Dairi – Binangara – Hasinggahan – Bonan Dolok – Simpang Tulas – Simpang Limbong – Simpang Gonting – Harian – Sihotang – Tamba – Sabulan – Holbung – Janji Raja dan terhubung sampai ke Tipang – Bakkara (Kabupaten Humbang Hasundutan), Tamba Dolok – Parsingguran (Kabupaten Humbang Hasundutan).

- c. Jaringan jalan kabupaten meliputi jaringan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, yang menghubungkan antar ibukota kecamatan, yang menghubungkan desa dengan ibukota kecamatan, yang menghubungkan antar desa dan jalan lainnya.
- d. Pembangunan jalan baru untuk pengembangan kawasan perkotaan Pangururan mulai dari Desa Siopat Sosor (Parbaba) menuju Desa Rianiate (*bypass* Pangururan), kawasan perkotaan Tomok di Kecamatan Simanindo (*bypass* Tomok);
- e. Rencana pembangunan jembatan meliputi: jembatan Rianiate, jembatan Sampean, dan jembatan Lottung – Sigapiton.

2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:

- a. Terminal tipe C di Kawasan Kota Pangururan yang direncanakan akan ditingkatkan menjadi terminal tipe B;
- b. Pengembangan terminal tipe C yang terpadu dengan dermaga danau/penyeberangan di Simanindo, Tomok, Nainggolan, Mogang; dan
- c. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Samosir meliputi relokasi terminal eksisting di Onan Baru ke lokasi terminal baru di Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan; dan
- d. Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 - Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani perkotaan Kabupaten dengan kota-kota lain di dalam Provinsi Sumatera Utara; dan
 - Angkutan perdesaan melayani ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten.

2. Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan

Sistem jaringan transportasi penyeberangan terdiri atas lintas penyeberangan danau, pelabuhan penyeberangan danau, dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.

- 1) Lintas penyeberangan danau terdiri atas lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - A. PPK Ajibata – PKLp Tomok;
 - a. PKLp Simanindo – PKL Tiga Ras;
 - b. PKWp Balige – PKLp Onan Runggu;
 - c. PKL Muara – PKLp Nainggolan; dan
 - d. PKL Bakkara – PKLp Nainggolan.
- 2) Sistem jaringan transportasi danau terdiri atas:
 - a. Dermaga Sihotang, Dermaga Onan Rihit, Dermaga Sijukjuk di Kecamatan Harian dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan dengan skala pelayanan angkutan penumpang dan barang di wilayah pantai barat dan wilayah pulau kabupaten;
 - b. Dermaga Tulas dan Dermaga Bonan Dolok di Kecamatan Sianjur Mula-mula dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan untuk melayani angkutan penumpang dan barang di wilayah pantai barat bagian utara dan wilayah pulau kabupaten;

- c. Dermaga Tomok, Simanindo, Lottung, dan Ambarita di Kecamatan Simanindo dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan untuk melayani angkutan barang;
 - d. Dermaga Mogang, Dermaga Parseoan Desa Simbolon Purba di Kecamatan Palipi;
 - e. Dermaga Sippingan Nainggolan dan Dermaga Nainggolan di Kecamatan Nainggolan dikembangkan sebagai pelabuhan lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang;
 - f. Dermaga Tamba, Dermaga Sabulan, Holbung dan Cinta Maju di Kecamatan Sitio-tio dikembangkan sebagai pelabuhan lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang;
 - g. Dermaga Onan Baru, Onan Runggu, Sukkean dan Lagundi di Kecamatan Onan Runggu dikembangkan sebagai pelabuhan lokal dengan skala pelayanan angkutan penumpang dan barang;
 - h. Dermaga Pintu Batu, Onan Baru, Rianiate, Sitanggang Bau, Parbaba di Kecamatan Pangururan dikembangkan sebagai dermaga penyeberangan dengan skala pelayanan angkutan penumpang dan barang; dan
 - i. Dermaga Binangara, Dermaga Hasinggahan, Dermaga Lagundi, Dermaga Bahal-bahal, Dermaga Pinal di Kecamatan Sianjur Mulamula dikembangkan sebagai dermaga lokal untuk melayani angkutan penumpang dan barang.
- 3) Pemantapan dan pengembangan alur pelayaran regional danau dan penyeberangan (*ferry*) dari:
- a. Tomok - Ajibata;
 - b. Nainggolan - Muara;
 - c. Nainggolan - Bakkara;
 - d. Simanindo - Tigaras;
 - e. Simanindo - Haranggaol;
 - f. Onan Runggu - Balige;
 - g. Parbaba - Tongging; dan
 - h. Ambarita - Ajibata.
- 4) Pengembangan *jetty* wisata yang menghubungkan antar obyek wisata melalui jalur pelayaran wisata dengan rute Pulau Malau - Pulau Tulas - Aek Rangat - Pasir Putih Parbaba - Mata Air Panas Simbolon - Turpuk Limbong - Hatoguan - Mogang - Sabulan - Sirait/Nainggolan - Lagundi - Lottung - Tuk-tuk Siadong dan dihubungkan dengan obyek-obyek wisata lain yang berada di kabupaten-kabupaten lain di perairan Danau Toba.
- 5) Pelabuhan transit pariwisata Aek Rangat di Kecamatan Pangururan.

B. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Rencana sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

1. Tatanan kebandarudaraan berupa rencana pembangunan bandara di Sampe Tua Kecamatan Palipi atau di Sianitak Kecamatan Nainggolan;
2. Rencana penetapan pendaratan pesawat terbang air (*amphibi*) di perairan Danau Toba (*water plane strip*);

3. Ruang udara untuk penerbangan adalah kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) yang meliputi:
 - 1) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - 2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3) kawasan dibawah permukiman transisi;
 - 4) kawasan dibawah permukaan horisontal dalam;
 - 5) kawasan dibawah permukaan kerucut; dan
 - 6) kawasan dibawah horizontal luar.
4. Pengembangan dan pembangunan bandar udara sebagai bagian sistem jaringan transportasi udara dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.1.2.2 Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Rencana sistem prasarana lainnya terdiri dari rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

A. Rencana Sistem Jaringan Energi, terdiri atas:

1. Prasarana Minyak dan Gas berupa rencana pengembangan prasarana energi bahan bakar minyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan energi bahan bakar gas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di 9 (sembilan) Kecamatan.
2. Peningkatan Jaringan Tenaga Listrik berupa peningkatan kapasitas distribusi listrik secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kabupaten terdiri atas:
 - 1) Jaringan SUTT yang melayani Pangururan – Tele;
 - 2) Jaringan SUTT yang melayani Pulau Samosir meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Tomok dan sekitarnya;
 - 3) Gardu Induk (GI) Tele di Kecamatan Harian;
 - 4) Gardu Induk (GI) Parbaba di Kecamatan Pangururan; dan
 - 5) Gardu Induk (GI) Tomok di Kecamatan Simanindo.
 - 6) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan tenaga listrik pada kawasan perdesaan yang terisolasi dihubungkan jaringan prasarana listrik kawasan perkotaan terdekat, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana jaringan sumber energi alternatif terdiri atas:
 - 1) Pengembangan sumber-sumber pembangkit energi listrik alternatif yang mempertimbangkan potensi sumber daya angin, matahari di setiap kecamatan;
 - 2) Pengembangan pembangkit listrik skala kecil dengan menggunakan diesel dan potensi sumber energi listrik setempat (energi surya) untuk wilayah terpencil dan terisolir;
 - 3) Pengembangan potensi energi panas bumi (Geothermal) antara lain : PLTP Pusuk Buhit, PLTP Palipi, dan PLTP Simbolon Samosir; dan
 - 4) Mengembangkan sumber-sumber pembangkit listrik tenaga air yang potensial meliputi:

- a. PLTMH Boho di Desa Boho, PLTMH Sitapigagan di Desa Bonan Dolok, PLTMH Bolon di Desa Hasinggahan, PLTMH Tulas di Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mula-mula;
- b. PLTMH Sampuran di Desa Sosor Dolok dan PLTMH Ordi di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian; dan
- c. Pemanfaatan air Danau Toba menjadi energi listrik (*Upper Samosir*).

B. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1. Penyediaan kapasitas jaringan telekomunikasi untuk kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan dengan prioritas pembangunan sarana umum di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
2. Pembangunan menara-menara *Base Transceiver Station* (BTS) pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu keindahan bentang alam dan permukiman penduduk;
3. Pengembangan jaringan komunikasi tanpa kabel dan internet pada kawasan pusat kota, kawasan perkantoran dan kawasan pariwisata potensial; dan
4. Pengembangan sentral komunikasi di Kecamatan Pangururan dan Onan Runggu.

C. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

1) Sumber daya air terdiri dari :

- 1) Air permukaan sungai meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju Danau Toba yang meliputi:
 - a. Sub DAS Aek Silang di Kecamatan Harian, Sub DAS Aek Bodang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sitiotio dan Kecamatan Harian,
 - b. Sub DAS Aek Parombahan di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan,
 - c. Sub DAS Aek Tulas di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan,
 - d. Sub DAS Aek Ringgo meliputi Kecamatan Sianjur Mula-mula,
 - e. Sub DAS Binanga Simartuang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Pangururan,
 - f. Sub DAS Binanga Aron di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Ronggur Nihuta,
 - g. Sub DAS Binanga Guluan di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Palipi,
 - h. Sub DAS Binanga Silubung di 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Simanindo,
 - i. Sub DAS Binanga Bolon di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu,

- j. Sub DAS Sigumbang di 2 (dua) kecamatan meliputi Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu,
 - k. Sub DAS Aek Simala di Kecamatan Onan Runggu, dan
 - l. Sub DAS Sitiung-tiung di 3 (tiga) kecamatan meliputi Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu dan Kecamatan Ronggur Nihuta.
- 2) Badan air danau meliputi air permukaan pada Danau Toba, Danau Sidihoni di Kecamatan Ronggur Nihuta dan Danau Aek Natonang di Kecamatan Simanindo.
 - 3) Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang yang meliputi: Kecamatan Pangururan, Kecamatan Siotio, Kecamatan Sianjur Mulamula, dan Kecamatan Harian; dan
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT) Samosir yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, dan Kecamatan Palipi.
 - 4) Sumber mata air lainnya
- 2) Prasarana sumber daya air terdiri dari:
 - 1) Sistem Jaringan Irigasi dilaksanakan dalam rangka mendukung pertanian termasuk pertanian pangan berkelanjutan. Sistem Jaringan Irigasi ini terdiri atas: DI Lontung; DI Tele Harian Boho; DI Limbong, DI Sibong-bong Siriaon; DI Siriaon Buhit; DI Binanga Aron, DI Sigumbang; DI Sitete; DI Siguluan, DI Silubung, DI Siugan-ugan, DI Hairi, DI Sihotang, DI Tamba, DI Nainggolan Parhusip; DI Pangasean; DI Hairi Gorat; DI Aek Siboras; DI Rianiate; DI Silimbat; DI Sisogot; DI Huta Urat Huta Balian; DI Batu Bolon; DI Bondar Paraek Langit; DI Sabulan;
 - 2) Sistem Pengendalian Banjir dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap terhadap luapan air sungai berupa penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai dan reboisasi sepanjang badan sungai. Sistem ini dilakukan di sungai: Aek Silang, Aek Bodang, Aek Parombahan, Aek Tulas, Aek Ringgo, Binanga Simartuang, Binanga Aron, Binanga Guluan, Binanga Silubung, Binanga Bolon, Sigumbang, Aek Simala, dan Sitiung-tiung;
 - 3) Sistem Pengamanan Pantai Danau dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai danau melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai danau, dan/atau penguatan tebing pantai danau. Sistem ini dilakukan pada seluruh pantai danau rawan abrasi di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Siotio-tio;
 - 4) Sistem Pemantauan Perairan Danau dilaksanakan dalam rangka pencegahan pencemaran air danau melalui pengawasan secara ketat dan berkala. Sistem pemantauan ini dilakukan pada tepi pantai

danau di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio;

- 5) Pembangunan embung Binanga Bolon dan Sinapi.

D. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

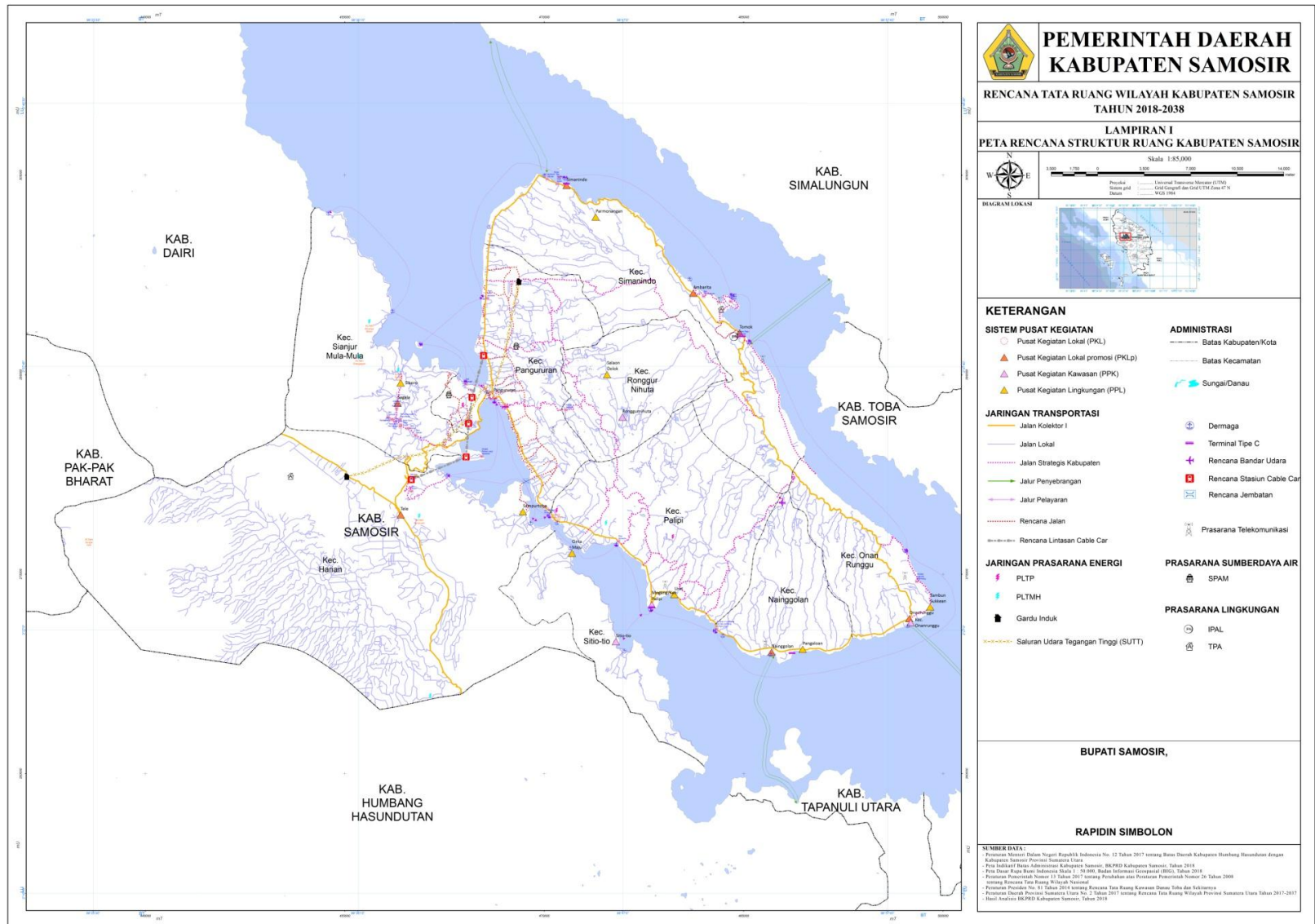
Rencana sistem jaringan prasarana lainnya secara garis besar meliputi sistem pengolahan persampahan, sistem drainase, sistem pengelolaan limbah, rencana pengembangan air minum dan rencana jalur dan ruang evakuasi bencana. Arahana pengembangan masing-masing sistem jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengolahan persampahan terdiri atas:
 - 1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Lokasi TPS ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan;
 - 2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Lokasi TPST dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu dan Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - 3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Lokasi TPA direncanakan di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian dengan sistem *Sanitary Landfill*.
2. Sistem drainase dilakukan dengan cara:
 - 1) pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil;
 - 2) pengembangan sistem tercampur (yaitu menyatukan air limbah dan air hujan dalam satu saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air;
 - 3) pengembangan saluran drainase primer melalui saluran pembuangan utama pada Bah Joring di Kecamatan Pangururan; dan
 - 4) penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi di kawasan perkotaan.
3. Sistem pengelolaan limbah terdiri atas:
 - 1) Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan permukiman perdesaan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat. Sistem pembuangan air limbah setempat berada di kawasan permukiman

- perdesaan di setiap kecamatan dan dikelola dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- 2) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat dan kawasan pariwisata. Sistem pembuangan air limbah terpusat mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah. Sistem pembuangan air limbah terpusat dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta dan Kecamatan Simanindo;
 - 3) Sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau limbah B3.
4. Rencana pengembangan air minum dilakukan dengan cara:
- 1) membangun sistem penyediaan air minum di wilayah pesisir pantai maupun dataran tinggi sesuai dengan karakteristik geografis dan ketersediaan sumber air baku, melalui sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan;
 - 2) memperluas jaringan perpipaan air minum di kawasan perkotaan;
 - 3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum di bagian tepian Danau Toba di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simanindo;
 - 4) SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air di kawasan permukiman perdesaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Unit Pelayanan Teknis dan atau bekerja sama dengan PDAM dalam mengelola air minum di kawasan perkotaan;
 - 6) membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola air minum di kawasan perdesaan; dan
 - 7) unit distribusi dan unit pelayanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri atas:
- 1) Rencana Jalur Evakuasi Bencana disesuaikan dengan kondisi wilayah dan diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana, yang meliputi :
 - a. Jalan kolektor primer (jalan nasional) meliputi: Batas Kabupaten Dairi (Parbuluan) – Tele – Batas Kabupaten Humbang Hasundutan (Dolok Sanggul), dan jaringan jalan yang menghubungkan daratan Pulau Samosir yang merupakan jaringan Jalan Strategis Nasional, yakni: Tele – Pangururan – Simanindo – Ambarita – Tomok – Onan Runggu – Nainggolan – Pangururan;
 - b. Jalan lokal meliputi seluruh kecamatan;
 - c. Jalan lingkungan meliputi seluruh kecamatan; dan
 - d. Wilayah perairan Danau Toba.

- 2) Rencana Ruang evakuasi bencana terdiri atas:
 - a. berada pada ruang terbuka atau bangunan gedung yang aman dan terdekat dengan kawasan yang berpotensi terjadi bencana berada di seluruh kecamatan di daerah rawan bencana yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana; dan
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana alam akan dilengkapi dengan ruang hunian, dapur umum, rehabilitasi, kantor, utilitas dan lapangan terbuka.
- 3) Ketentuan lebih lanjut rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana alam diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk lebih jelasnya, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Samosir pada Gambar 4.1 (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038).



Gambar 4.1. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Samosir

4.2 Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

4.2.1 Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

4.2.1.1 Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 50.654 Ha (lima puluh ribu enam ratus lima puluh empat hektar) meliputi:

1. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
2. Kecamatan Harian;
3. Kecamatan Sitio-tio;
4. Kecamatan Simanindo;
5. Kecamatan Pangurusan;
6. Kecamatan Ronggur Nihuta;
7. Kecamatan Palipi;
8. Kecamatan Nainggolan; dan
9. Kecamatan Onan Runggu.

Pada kawasan hutan lindung terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 388,23 Ha (tiga ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tiga hektar) di Kecamatan Harian.

4.2.1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air seluas kurang lebih 533,95 ha (lima ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima hektar) yang meliputi 6 (enam) kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Harian;
2. Kecamatan Simanindo;
3. Kecamatan Ronggur Nihuta;
4. Kecamatan Palipi;
5. Kecamatan Nainggolan; dan
6. Kecamatan Sianjur Mulamula.

4.2.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

A. Kawasan sempadan sungai terdiri atas:

1. Sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Sungai besar tidak bertanggung meliputi Aek Bodang, Aek Parombahan, Binanga Aron, Aek Simala, Sitiung-tiung, Aek Tulas, Aek Ringgo, Binanga Simartuang, Binanga Silubung;
2. Sungai besar bertanggung meliputi Binanga Guluan, Binanga Bolon, Aek Silang, Sigumbang;

3. Sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Sungai kecil tidak bertanggung tersebar di bagian hulu di semua wilayah Sub DAS yang ada di dalam cakupan Kawasan Danau Toba;
 4. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 5. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- B. Kawasan sempadan Danau meliputi:
1. Sempadan Danau Toba;
 2. Sempadan Danau Sidihoni;
 3. Sempadan Danau Porohan; dan
 4. Sempadan Danau Aek Natonang.

Kawasan sempadan danau ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Kawasan sempadan danau ditetapkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio. Kawasan sempadan Danau Sidihoni, sempadan Danau Porohan dan Danau Aek Natonang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah perkotaan, di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten.
- D. Kawasan sempadan mata air yakni Kawasan Sampuran Pangaribuan di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Palipi, Kawasan Sampuran Efrata, Sampuran Bala di Kecamatan Harian, Kawasan Sampuran Nai Sogop, Sungai Sitapigagan, Sitiris-tiris di Kecamatan Sianjur Mula-mula.
- E. Kawasan lindung spritual dan kearifan lokal meliputi Kawasan Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kawasan Ulu Darat di Kecamatan Sitio-tio dan Sampuran Pangaribuan di Kecamatan Palipi.
- F. Penetapan garis sempadan sungai dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.2.1.4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas:

- A. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi :
1. Kebun Raya Samosir yang terletak di Pealilit Desa Tomok dan/atau Aek Natonang Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo;
 2. Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas kurang lebih 105 ha (seratus lima hektar) di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo;
 3. Lokasi Taman Remaja dan Perkemahan Lagundi Desa Sitamiang di Kecamatan Onan Runggu; dan
 4. *Ecotourism* Hoeta Gindjang di Kecamatan Sianjur Mulamura.
- B. Cagar budaya ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, struktur dan situs. Cagar budaya meliputi:

- a. Kecamatan Pangururan: pasanggarahan, monumen Tugu Liberty Malau, Huta Raja, Komunitas Tenun Ulos Batak Lumban Suhi-suhi dan Paromasan;
- b. Kecamatan Simanindo: Makam Tua Raja Sidabutar, wisata budaya pertunjukan Sigale-gale, Huta Bolon, Batu Kursi Persidangan Huta Siallagan, Situs Pagar Batu;
- c. Kecamatan Sianjur Mula-mula: Situs Siraja Batak di Kawasan Pusuk Buhit, lokasi yang dipercaya sebagai asal muasal Suku Bangsa Batak, pemandian Aek Sipitu Dai, perkampungan asli Huta Siraja Batak Desa Sianjur Mula-mula, taman bumi di perkampungan Sigulatti, Aek Siboru Pareme, Batu Hobon, Batu Pargasipan, Batu Parhusipan, Batu Nanggar, Batu Sawan, dan juga seluruh Kawasan yang ditetapkan sebagai *Geosite* yang merupakan bagian dari Kawasan *Geo-Area* Taman Bumi (*Geopark*).

4.2.1.5 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam yaitu kawasan rawan bencana gerakan tanah dan kawasan rawan gelombang pasang danau. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tersebar di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Sitio-tio, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onan Runggu. Kawasan rawan gelombang pasang danau meliputi wilayah tepian Danau Toba di Kecamatan Pangururan, Simanindo, Onan Runggu, Nainggolan dan Palipi.

4.2.1.6 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah atau imbuhan air tanah.

A. Kawasan Cagar Alam Geologi terdiri atas: kawasan keunikan batuan dan kawasan keunikan bentang alam.

1. Kawasan keunikan batuan ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
- b. Memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fossil);
- c. Memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
- d. Memiliki tipe geologi unik; atau
- e. Memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

Kawasan keunikan batuan ditetapkan di:

- a. Taman bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk, geo-arkelogi Tomok dan Sabak Bahorok Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
- b. Taman bumi Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
- c. Taman bumi di perkampungan Siraja Batak, Kawasan air terjun Sitapigagan di Desa Bonan Dolok, taman bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup simpang Batu Hobon dan Dolok Pusuk Buhit, lembah Sagala, Kalsilutit Sibaganding Samosir yang mencakup bukit Sinutaktik

- Sibagiat dan Pulau Tulas, Sabak Hasanggahan, Andesit Haranggaol yang mencakup Gawir Andesit Binangara di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
- d. Sesar tebing kaldera Danau Toba yang mencakup kawasan Panatapan Tele, tufa toba yang mencakup kelokan Tele, kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian; dan
 - e. *Alluvial fan*, metadesimen permokarbon yang mencakup Sabak Simpang Limbong di Desa Tanjung Bunga dan taman bumi Aek Rangat di Kecamatan Pangururan.
2. Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria memiliki bentang alam berupa kaldera dan ditetapkan di:
 - a. Sumbat lava Tuktuk di Kecamatan Simanindo, pengangkatan baru Pulau Samosir (*recent uplift*) mencakup mata air panas Pintu Batu di Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi, dan intrusi hypabyssal Bukit Pege di lembah Sihotang Kecamatan Harian;
 - b. Tufa Samosir yang mencakup Liquefaction Huta Tinggi, *Shallow Lacustrine* Samosir di Kecamatan Pangururan, *Diatomea Lacustrine* Simanindo dan *Braided Stream* Samosir di Kecamatan Simanindo;
 - c. Sesar Pulau Samosir yang mencakup Bukit Dolok di Kecamatan Simanindo dan air terjun Namartua Pangaribuan di Kecamatan Palipi; dan
 - d. Danau Sidihoni di Kecamatan Ronggur Nihuta.
- B. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas kawasan rawan gerakan tanah, kawasan yang terletak di zona patahan aktif dan rawan letusan gunung berapi. Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah yang tinggi, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Palipi, sebagian wilayah Kecamatan Onan Runggu, sebagian wilayah Kecamatan Pangururan, sebagian wilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula dan sebagian wilayah Kecamatan Harian. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria lebar sempadan paling sedikit 250 meter dari tepi jalur patahan aktif, ditetapkan di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitio-tio. Kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi Gunung Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mulamura, dan daerah yang terkena dampak sebaran abu vulkanik dari letusan Gunung Sinabung dan Helatoba yang mengarah ke wilayah Kabupaten Samosir. Kawasan rawan gempa bumi adalah pada skala V - VI MMI dan tersebar merata di wilayah Kabupaten.
- C. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah atau imbuhan air tanah meliputi Cekungan Air Tanah (CAT) Samosir dengan luas Cekungan Air Tanah (CAT) kurang lebih 648 (enam ratus empat puluh delapan) kilometer persegi yang meliputi seluruh wilayah kabupaten.

4.2.2 Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

4.2.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdapat di Kecamatan Harian dengan luas kurang lebih 17.608,07 (tujuh belas ribu enam ratus delapan koma nol tujuh) hektar, tersebar di Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Harian.

4.2.2.2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 3.543,40 ha (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar) di wilayah Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, dan Kecamatan Harian. Penetapan kawasan peruntukan hutan rakyat selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.2.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

- A. Kawasan pertanian lahan basah, seluas kurang lebih 7.887,85 ha (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima hektar) yang tersebar di seluruh kecamatan.
- B. Kawasan pertanian lahan kering, seluas kurang lebih 15.283,25 ha (lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua puluh lima hektar) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- C. Kawasan budidaya perkebunan, seluas kurang lebih 16.706,59 ha (enam belas ribu tujuh ratus enam koma lima puluh sembilan hektar) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- D. Kawasan budidaya peternakan, dikembangkan di semua kecamatan, khusus ternak besar dicadangkan.
- E. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan antara lain melalui pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan sentra di Kecamatan Harian.

4.2.2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan danau dan budidaya perikanan darat. Kawasan perikanan tangkap meliputi wilayah perairan Danau Toba Kabupaten Samosir sesuai penetapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan perikanan meliputi Tempat Pengolahan Ikan, Tempat Pendaratan Ikan, Tempat pengolahan Ikan yang lokasinya akan ditetapkan kemudian melalui Peraturan Bupati. Budidaya Perikanan dengan pola Keramba Jaring Apung (KJA) skala besar maupun kecil meliputi zona perairan pantai danau pada garis horizontal dengan kedalaman lebih dari 100 (seratus) meter.

4.2.2.5 Kawasan Peruntukan Peternakan

XXX

4.2.2.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi potensi panas bumi sebagai energi alternatif; potensi bahan tambang mineral logam; dan potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif terdapat di Desa Sigaol Simbolon dan Desa Palipi Kecamatan Palipi dengan sumber daya sebesar 150 Mw dan Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan. Potensi bahan tambang mineral logam yaitu Bismuth yang terdapat di Pulau Samosir.

Potensi bahan tambang mineral bukan logam dan batuan meliputi zeolit, diatomea, gamping, andesit, feldspar, lempung, pasir kuarsa, belerang dan pasir yang tersebar di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sianjur Mula-mula. Pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi di seluruh kecamatan. Pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan memperhatikan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.2.2.7 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi :

- A. Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah, yang dikembangkan adalah jenis industri yang tidak menimbulkan polusi, seperti industri pembuatan perahu dan kapal motor.
- B. Kawasan industri kecil atau rumah tangga, tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, namun fokus pengembangannya lebih diutamakan pada kawasan pariwisata untuk mendukung kegiatan pariwisata seperti:
 1. Industri tenun ulos terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Sianjur mulamura;
 2. Industri diversifikasi produk hasil tenun terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Simanindo;
 3. Industri ukiran (*souvenir*) terutama dikembangkan di Kelurahan Tuktuk Siadong dan Desa Tomok Kecamatan Simanindo serta di Kecamatan Ronggur Nihuta;
 4. Industri pembuatan alat musik tradisional terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Harian dan Kecamatan Ronggur Nihuta.
 5. Industri gerabah terutama dikembangkan di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi.
 6. Industri pembuatan batu bata dan *paving block* terutama dikembangkan di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan Kecamatan Pangururan;
 7. Industri pengolahan kayu rakyat meliputi kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan/ atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dikembangkan di seluruh kecamatan;
 8. Industri pengolahan makanan ringan dikembangkan di seluruh kecamatan;
 9. Industri anyam-anyaman dikembangkan di seluruh kecamatan;

10. Industri sablon dan pembuatan reklame terutama dikembangkan di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi; dan
11. Industri kecil/rumah tangga lainnya yang tersebar di wilayah kabupaten.

4.2.2.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- A. Pengembangan pariwisata budaya, terdiri dari Batu Hobon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Siallagan Ambarita, Rumah Tradisional Simanindo, Museum Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak di Harian Boho.
- B. Pengembangan pariwisata alam, terdiri dari:
 1. Kawasan wisata pantai Parbaba, Pantai Lumban Manik, taman bumi Aek Rangat di Kecamatan Pangururan;
 2. Pantai Cinta Dame, Pulo Tao, Gua Lottung, Sipokki, Goa Alam Sangkal, Kawasan Bukit Kite Internasional, Wisata Budaya Samosir (Pertunjukan Sigale-gale), Batu Marhosa, Tuktuk dan Tomok, Taman Bumi Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Kecamatan Simanindo;
 3. Taman Wisata Sigulatti, Taman Bumi di Perkampungan Siraja Batak, Taman Bumi Gunung Pusuk Buhit yang mencakup simpang Batu Hobon dan Dolok Pusuk Buhit di Kecamatan Sianjur Mulamula;
 4. Pantai Lagundi, Pantai Pasir Putih Sukkean, Hariara Nabolon/Pohon Besar Sukkean, Pananggangan, Tambun Surlau, Kawasan Mual Siraja Sonang dan Taman Bumi di Kecamatan Onan Runggu;
 5. Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
 6. Kawasan Aek Liang, Kawasan Jea ni tano, Kawasan Aek Sipale Onggang dan Kawasan Pea Porohan di Kecamatan Ronggur Nihuta;
 7. Kawasan Batu Rantai dan Kawasan Hariara Maranak di Kecamatan Palipi;
 8. Janji Martahan, Mata Air dan Pohon Pokki, Goa Parmonangan, Ulu Darat dan Janji Matogu di Kecamatan Harian; dan
 9. Mata Air – Gua Datu Parngongo, Parmandian Boru Saronding di Kecamatan Siotio.
- C. Pengembangan pariwisata buatan dan minat khusus, terdiri dari olahraga Paralayang di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Sianjur Mula-mula dan Kecamatan Pangururan, wisata panorama (*cable car*) ruas Tele – Sijukjuk dan Sijambur – Pardugul, wisata rohani di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian.
- D. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

4.2.2.9 Kawasan Peruntukan Permukiman

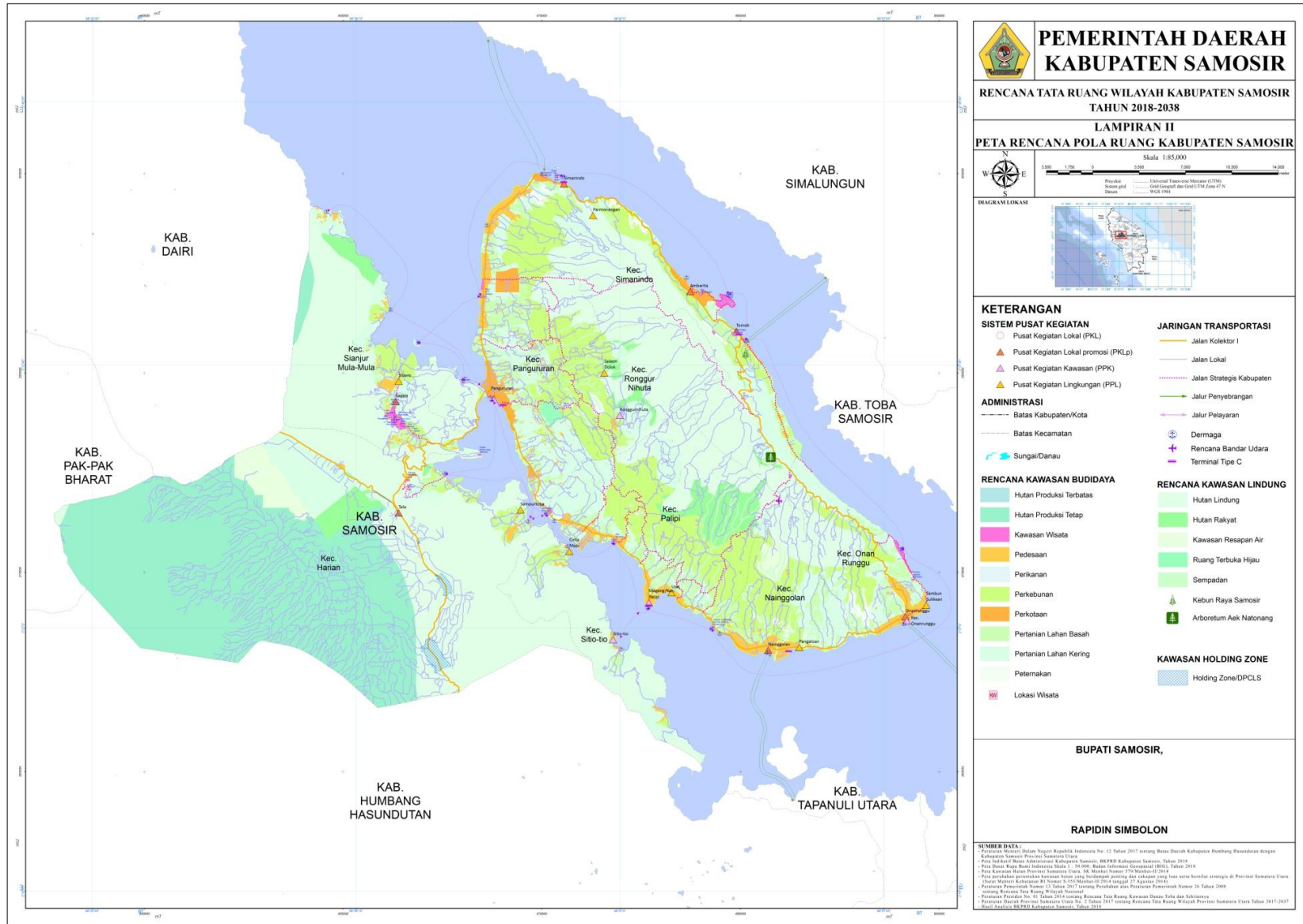
Kawasan peruntukan permukiman meliputi:

- A. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi kawasan PKL/PKWp, PKLp dan PPK;
- B. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan PPL;
- C. Kawasan permukiman dan/atau non permukiman yang berada pada kawasan hutan, ditindaklanjuti untuk dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2.10 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan keamanan dan Taman Pemakaman Umum (TPU). Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas Kodim, Koramil, Yonif dan Rindam yang berada di kawasan Danau Toba.

Untuk lebih jelasnya, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Gambar 4.2 (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038).



Gambar 4.2. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Samsir

4.3 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten adalah Kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sumatera Utara yang terdapat di wilayah Kabupaten Samosir terdiri atas:

1. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan sentra produksi di Kecamatan Harian; dan
2. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit.

Kawasan Strategis Kabupaten Samosir yang dikembangkan meliputi:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang dikembangkan di kabupaten meliputi:

- a. Wilayah Perkotaan Pangururan adalah pusat pelayanan yang melayani kebutuhan seluruh wilayah Kabupaten, baik ke dalam maupun ke luar Kabupaten; dan
- b. Kawasan Minapolitan sektor budidaya perikanan darat terutama dikembangkan pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitiotio serta didukung oleh kecamatan-kecamatan lainnya.

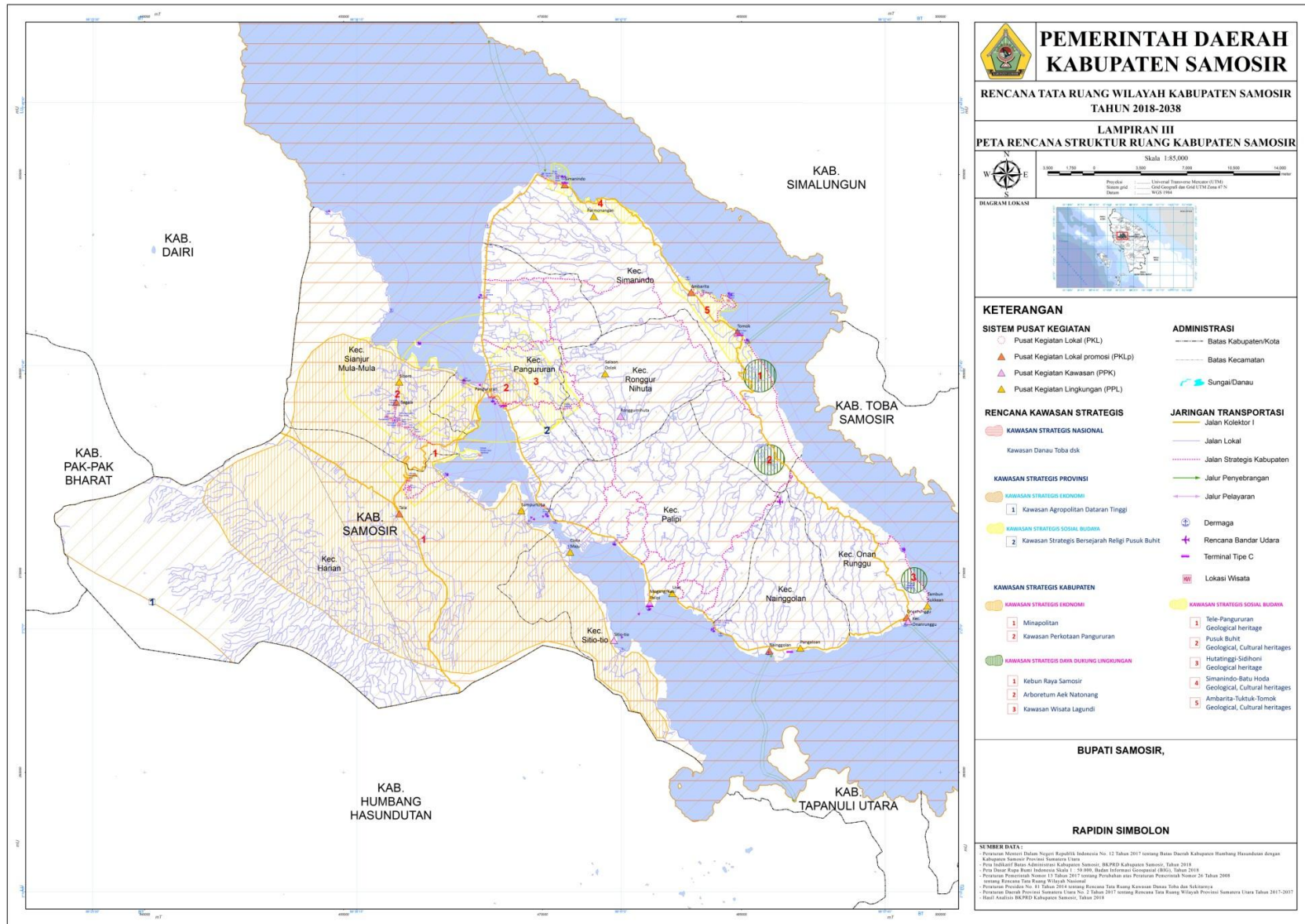
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Geologi, Sosial dan Budaya dan Warisan Dunia meliputi lokasi yang ditunjuk sebagai *Geosite* yang merupakan bagian dari Kawasan Geo-Area Taman Bumi (*Geopark*) di Kabupaten Samosir, diantaranya :

- a. *Geosite* Ryolite Dome dan Dasite Dome (Pardepur) di Tuktuk pada Kecamatan Simanindo;
- b. *Geosite* Batu Guru di Kecamatan Nainggolan;
- c. *Geosite* di Perkampungan Si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mula-mula;
- d. *Geosite* Sesar Tebing Kaldera Danau Toba yang mencakup kawasan Panatapan Tele di Kecamatan Harian;
- e. *Geosite* Tufa Toba yang mencakup sepanjang kelokan Tele di Kecamatan Harian;
- f. *Geosite* Kawasan Air Terjun Sampuran Efrata di Kecamatan Harian;
- g. *Geosite* Gunung Pusuk Buhit yang mencakup Simpang Batu Hobon dan Perkampungan Sigulatti di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
- h. *Geosite* Lembah Sagala di Kecamatan Sianjur Mula -mula;
- i. *Geosite* Geo Arkeologi Tomok dan Tuktuk di Kecamatan Simanindo;
- j. *Geosite* Metadesimen permokarbon yang mencakup Sabak Simpang Limbong di Desa Tanjung Bunga di Kecamatan Pangururan;
- k. *Geosite* Kawasan Aek Rangat di Kecamatan Pangururan;

3. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi :

- Kebun Raya Samosir yang terletak di Palilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo seluas kurang lebih 100 (seratus) Ha;
- Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas kurang lebih 105 (seratus lima) Ha di Desa Tanjung Kecamatan Simanindo.;
- Kawasan wisata pondok remaja Lagundi di Kecamatan Onan Runggu.

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran Kawasan Strategis Kabupaten Samosir dapat dilihat pada gambar berikut : (sesuai Perda Kab. Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038).



Gambar 4.3. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Samsir

4.4 Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program dan kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan tahapan. Pelaksanaan RTRW Kabupaten Samosir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 terbagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Tahap I yaitu tahun 2017-2022;
- b. Tahap II yaitu tahun 2022-2027;
- c. Tahap III yaitu tahun 2027-2032; dan
- d. Tahap IV yaitu tahun 2032-2037.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang, dan perwujudan kawasan strategis kabupaten. Adapun tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

4.5 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045

Kawasan Danau Toba merupakan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana Kabupaten Samosir terletak ditengah dari kawasan tersebut. Hal ini memungkinkan pariwisata dan ekonomi kreatif berpusat di kabupaten Samosir yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan pengungkit ekonomi baru dan menjadi peluang besar untuk pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti kawasan strategis industri pertanian, agroindustri, pariwisata dan kawasan konservasi strategis termasuk optimalisasi berupa kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada seperti Destinasi Pariwisata Prioritas. Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah pertumbuhan ini adalah untuk mendorong upaya hiderisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.

Oleh karena itu dalam kurun waktu 20 tahun ke depan pengembangan wilayah Sumatera yang dapat diadopsi di Kawasan Danau Toba dan diarahkan ke dalam 5 prioritas yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal akan menjadi modal dasar pembangunan serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik serta amenitas, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik.
3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau sirkuler dan berkelanjutan serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan
4. Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan serta meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Penuntasan RDTR kabupaten dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana, terutama mitigasi resiko pada wilayah perkotaan perdesaan dengan mempertimbangkan kondisi topografi Kabupaten Samosir.

4.5.1 Transformasi Sosial diarahkan melalui kebijakan:

- a. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- b. Percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah dengan beban tinggi;
- c. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP;
- d. Peningkatan imunisasi rutin lengkap dengan pendekatan budaya;
- e. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis;
- f. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
- g. Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan;
- h. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

- i. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri;
- j. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.

4.5.2 Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi Wilayah Sumatera diarahkan sebagai koridor ekonomi "Industri Berbasis SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia" diarahkan melalui kebijakan:

- a. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri;
- b. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- c. Peningkatan produksi padi melalui pertanian regeneratif;
- d. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
- e. peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi balai latihan kerja bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri
- f. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara melalui integrasi ragam destinasi wisata lintas wilayah di Wilayah Sumatera;
- g. Pengembangan multi-infrastructure feeder, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis;
- h. Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK antara lain melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah (minimal 4G), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui di upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis serta peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber, serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, kepemimpinan digital).

4.5.3 Transformasi tata Kelola diarahkan melalui kebijakan:

- a. Optimasi regulasi, termasuk proses pra- regulasi yang memadai;
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- c. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;

- d. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- e. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- f. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan penganggaran dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
- g. Pengawasan proses pengembangan karir promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi

4.5.4 Arah kebijakan landasan transformasi

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia perlu ditingkatkan melalui peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi.

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi antara lain:

- a. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- b. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.
- c. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
- d. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
- e. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya orang utan, gajah, dan harimau Sumatra;
- f. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatra;
- g. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan di antara WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan;
- h. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
- i. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
- j. Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Sumatra;
- l. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- m. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, pengasuhan pembentukan dan lansia melalui perawatan, dan dan

- resiliensi, perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- n. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan pengambilan keputusan, dalam serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; serta
 - o. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Sumatera.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:

- a. Pembangunan irigasi baru terutama pada bendungan yang sudah dibangun serta sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya;
- b. Pembangunan bendungan baru yang terintegrasi pengembangan kawasan untuk menambah luas layanan irigasi premium;
- c. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian (iv) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir;
- d. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin; serta
- e. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya mitigasi risiko bencana:
- f. Pengembangan *Flood Forecasting Early Warning System* (FFEWS).

4.5.5 Kerangka Implementasi Transformasi

Agenda Prasarana Arah Kewilayahan dan Sarana kebijakan untuk mendukung pengembangan kewilayahan, yaitu penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatera; penuntasan RDTR kab/kota; peningkatan pelaksanaan reforma agraria; pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan; modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.

Arah kebijakan sarana dan prasarana dasar yaitu penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah, eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman, penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah serta Peremajaan kota.

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan di Wilayah Sumatera yaitu: Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah; Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi; Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko; sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

Tabel 4.1

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan RTRW Kabupaten Samosir

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG							
1.1.	Perwujudan Pusat Kegiatan							
1.1.1.	Perwujudan PKWp Pangururan	Kecamatan Pangururan						
	1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pangururan		APBD	Dinas PUTR				
	2 Pengembangan dan penataan detil Kota Pangururan		APBD	Dinas PUTR				
	3 Pengembangan perkantoran pemerintahan		APBD	Dinas PUTR				
	4 Peningkatan Pasar Pangururan		APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	5 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa		APBD, APBD Provsu	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	6 Pembangunan Energi Alternatif		APBD Provsu, APBN	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	7 Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi)		APBN	Dinas PUTR, Dinas DIKPORA				
	8 Pengembangan RSUD		APBD	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan				
	9 Pembangunan Gedung OR dan kesenian (Stadion)		APBD	Dinas PUTR, Dinas DIKPORA				
	10 Peningkatan terminal (tipe B)		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	11 Peningkatan kapasitas PAM		APBD	Dinas PUTR				
	12 Pembangunan jalan lingkar utara kota		APBD					
	13 Pembangunan Terminal Pendukung		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	14 Pembangunan Terminal Agribisnis		APBN					
1.1.2.	Perwujudan PKLp Simanindo	Simanindo						
	1 Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tomok		APBD	Dinas PUTR				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	2 Peningkatan Dermaga		APBD	Dinas PUTR				
	3 Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)		APBD	Dinas PUTR				
	4 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa		APBD	Dinas PUTR				
	5 Perbaiki Daerah Irigasi		APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	6 Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	7 Pembangunan Lumbung Pangan		APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	1.1.3 Perwujudan PKLp Onan Runggu							
	1 Peningkatan Dermaga	Onan Runggu	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	2 Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Onan Runggu	APBD	Dinas KPP, Dinas PUTR				
	3 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Onan Runggu	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	4 Perbaiki Daerah Irigasi	Onan Runggu	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	5 Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Onan Runggu	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	6 Pembangunan Lumbung Pangan	Onan Runggu	APBD	Dinas KPP				
	7 Peningkatan Pasar Tradisional	Onan Runggu	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	8 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Onan Runggu	APBD	Dinas KPP				
1.1.4 Perwujudan PKLp Harian								
	1 Peningkatan Dermaga	Harian	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	2 Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Harian	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	3 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Harian	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	4 Perbaiki Daerah Irigasi	Harian	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	5 Pembangunan Lumbung Pangan	Harian	APBD	Dinas KPP				
	6 Peningkatan Pasar Tradisional	Harian	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	7 Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Harian	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	8 Pembangunan Jalan Produksi Pertanian/Perkebunan	Harian	APBD	Dinas KPP				
	9 Pengembangan Balai Benih Perikanan dan Penelitian	Harian	APBD	Dinas KPP				
1.1.5	Perwujudan PPK Palipi							
	1 Peningkatan Dermaga	Palipi	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	2 Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Palipi	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	3 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Palipi	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	4 Perbaiki Daerah Irigasi	Palipi	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	5 Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Palipi	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	6 Pembangunan Lumbung Pangan	Palipi	APBD	Dinas KPP				
	7 Peningkatan Pasar Tradisional	Palipi	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	8 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Palipi	APBD	Dinas KPP				
1.1.6	Perwujudan PPK Nainggolan							

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	1 Peningkatan Dermaga	Nainggolan	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	2 Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Nainggolan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	3 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Nainggolan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	4 Perbaiki Daerah Irigasi	Nainggolan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	5 Pembangunan Lumbung Pangan	Nainggolan	APBD	Dinas KPP				
	6 Peningkatan Pasar Tradisional	Nainggolan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	7 Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau	Nainggolan	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	8 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Nainggolan	APBD	Dinas KPP				
1.1.7	Perwujudan PPL Ronggur Nihuta							
	1 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Ronggur Nihuta	APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	2 Pembangunan Lumbung Pangan	Ronggur Nihuta	APBD	Dinas KPP				
	3 Pembangunan Pabrik Pengolahan Kopi Terpadu	Ronggur Nihuta	APBD	Dinas KPP, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG, Dinas PUTR				
	4 Pembangunan Gudang Pengumpul dan Lahan jemur kopi	Ronggur Nihuta	APBD	Dinas KPP				
	5 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Ronggur Nihuta	APBD	Dinas KPP				
1.1.8	Perwujudan PPL Sitio-Tio							
	1 Peningkatan Dermaga		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	2 Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)		APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	3 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa		APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	4 Perbaiki Daerah Irigasi		APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	5 Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	6 Pembangunan Lambung Pangan		APBD	Dinas KPP				
	7 Peningkatan Pasar Tradisional		APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
1.1.9	Perwujudan Sianjur Mula-mula							
	1 Peningkatan Dermaga		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	2 Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)		APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	3 Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa		APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	4 Perbaiki Daerah Irigasi		APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	5 Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan dini Kecelakaan Danau		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	6 Pembangunan Lambung Pangan		APBD	Dinas KPP				
	7 Peningkatan Pasar Tradisional		APBD	Dinas PUTR, Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
1.2.	Perwujudan Sistem Prasarana							
1.2.1.	Transportasi Darat							
	A. Peningkatan jaringan jalan Nasional							
	- Peningkatan Jalan kolektor primer (jalan nasional) meliputi : Batas Kabupaten Dairi (Parbuluan) – Tele – Batas Kabupaten Humbang Hasundutan (Dolok Sanggul)	Kabupaten Samosir	APBN	Kementerian PUPR				
	B. Peningkatan jaringan jalan Strategis Nasional							

NO.	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
							TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		- Jaringan Jalan yang menghubungkan daratan yang merupakan jaringan Jalan Strategis Nasional, yakni : Pulau Samosir : Tele – Pangururan – Simanindo - Ambarita – Tomok – Onan Runggu – Nainggolan – Pangururan		Kabupaten Samosir	APBN	Kementerian PUPR				
	C.	Peningkatan jaringan jalan Provinsi								
		- Jalan Kabupaten yang merupakan outer ring road Kawasan Danau Toba yakni : Batas Kabupaten Dairi - Binangara – Hasinggahan – Bonan Dolok – Simpang Tulas – Simpang Limbong - Simpang Gonting – Harian – Sihotang – Tamba – Sabulan – Holbung - Janji Raja dan terhubung sampai ke Tipang – Bakkara (Kabupaten Humbang Hasundutan)		Kabupaten Samosir	APBD Provsu	Dinas PUPR Provsu				
	D.	Peningkatan jaringan jalan Kabupaten								
		- Pangururan (perbaikan) – Desa Ginolat (Lingkar Pusuk Buhit)		Pangururan	APBD	Dinas PUPR				
		- Pangururan (perbaikan) – Desa Trupuk Sihotang		Pangururan	APBD	Dinas PUPR				
		- Desa Tomok – Desa Silimalombu		Simanindo – Onan Rung	APBD	Dinas PUPR				
		- Pangururan (perbaikan) – Desa Ronggur Nihuta		Pangururan	APBD	Dinas PUPR				
		- Desa Sakal (perbaikan & penyediaan jalur pejalan kaki) - Desa Parbaba		Simanindo	APBD	Dinas PUPR				
		- Desa Sakal (perbaikan & penyediaan jalur pejalan kaki) - Desa Parbaba Dolok		Simanindo	APBD	Dinas PUPR				
		- Desa Nainggolan (perbaikan & penyediaan jalur pejalan kaki) - Desa Sibonar Ompu Ratus		Nainggolan	APBD	Dinas PUPR				

NO.	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
							TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		-	Pembangunan jalan baru untuk pengembangan kawasan perkotaan Pangururuan mulai dari Desa Siopat Sosor (parbaba) menuju Desa Rianiate, dan kawasan perkotaan Tomok di Kecamatan Simanindo	Pangururuan dan Simani	APBN dan APBD	Dinas PUPR				
	E.	Peningkatan jaringan jalan Lingkungan								
		-	Kecamatan Sianjur Mula-mula (pelebaran & perbaikan) -> Desa Ginolat	Sianjur Mulamula	APBD	Dinas PUPR				
		-	Kecamatan Harian (pelebaran & perbaikan) -> Desa Trupuk Sihotang	Harian	APBD	Dinas PeraKPP				
		-	Kecamatan Sitio-Tio (pelebaran & perbaikan) -> Desa Sabulan	Sitiotio	APBD	Dinas PUPR				
		-	Kecamatan Palipi (pelebaran & perbaikan) -> Desa Mogang	Palipi	APBD	Dinas PeraKPP				
		-	Kecamatan Ronggurnihuta (pelebaran & perbaikan) -> Desa Ronggur Nihuta	Ronggur Nihuta	APBD	Dinas PUPR				
	F.	Peningkatan dan Pengembangan Terminal								
		-	Pengembangan Terminal di Kabupaten Samosir antara lain meliputi relokasi terminal eksisting di Onan Baru ke lokasi terminal baru di Kecamatan Pangururuan	Pangururuan	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
1.2.2	Transportasi Danau dan Penyeberangan									
	A.	Dermaga Pengumpan Regional								
		-	Dermaga Sihotang	Harian	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
		-	Dermaga Tulas	Sianjur Mulamula	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
		-	Dermaga Lopo Parindo	Simanindo	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
		-	Dermaga Sabulan	Sitiotio	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
		-	Dermaga Onan Baru	Onan Runggu	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				

NO.	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
							TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1.2.3		-	Dermaga Sitanggang Bau	Pangururan	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	B.	Dermaga Lokal								
		-	Dermaga Binangara, Dermaga Hasinggaan, Dermaga Lagundi, Dermaga Bahal-bahal, Dermaga Pinggal	Sianjur Mulamula	APBD	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan				
	Program transportasi udara									
	a.	Pembangunan Bandara Sianitak		Nainggolan	APBN	Kementerian Perhubungan				
	b.	Pembangunan pendaratan pesawat terbang air (amphibi) di perairan Danau Toba (<i>air stripe</i>)		Simanindo	APBN	Kementerian Perhubungan				
	1.2.4 Sumber daya air									
	a.	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan Irigasi		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	b.	Peningkatan pemanfaatan air permukaan sebagai air baku pertanian		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	c.	Rehabilitasi jaringan irigasi yang ada		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	d.	Pembangunan dan perluasan jaringan irigasi yang baru		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR, Dinas KPP				
	e.	Pembangunan kantung-kantung air (embung air) di daratan Pulau Samosir untuk kepentingan Pertanian		Pulau Samosir	APBD, APBN	Dinas PUTR, Dinas KPP				
f.	Pembangunan sarana air bersih perkotaan		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR					
g.	Peningkatan sumber air baku bagi seluruh Kecamatan		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR					
h.	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air bersih bagi seluruh kecamatan		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR					
i.	Pengendalian banjir		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR					
j.	Pengamanan sempadan sungai dan Danau		Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR					
1.2.5	Energi									

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	a.	Pembangunan Gardu Induk Listrik	Pangururan dan Simani	Swasta	PT. PLN (Persero)				
	b.	Penambahan daya dan jaringan energi listrik	Seluruh kecamatan	APBN, Swasta	PT. PLN (Persero)				
	c.	Penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan	Seluruh kecamatan	APBN, Swasta	PT. PLN (Persero)				
	d.	Pembangunan PLTHM Sitapigagan di Desa Hasinggaan	Sianjur Mula-mula	APBN, Swasta	PT. PLN (Persero)				
	e.	Pembangunan PLTHM Bolon di Desa Hasinggaan	Sianjur Mula-mula	APBN, Swasta	PT. PLN (Persero)				
	f.	Pembangunan PLTHM Sampuran di Desa Sosor Dolok	Harian	APBN, Swasta	PT. PLN (Persero)				
	g.	Pembangunan PLTHM Sungai Ordi di Desa Hariara Pintu	Harian	APBN, Swasta	PT. PLN (Persero)				
	h.	Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi	Pangururan dan Palipi	APBN, Swasta	PT. PLN (Persero)				
	1.2.6	Telekomunikasi							
	a.	Penambahan jaringan telepon rumah di kawasan perkotaan	Seluruh kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Swasta				
	b.	Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan nir kabel bagi seluruh wilayah Kabupaten Samosir	Seluruh kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Swasta				
	c.	Pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di Wilayah yang memiliki area <i>blank spot</i>	Seluruh kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Swasta				
	d.	Pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel secara terpadu	Seluruh kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Swasta				
	e.	Pembangunan jaringan komunikasi bersifat fiber optik	Seluruh kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Swasta				
	1.2.7	Prasarana lainnya							
	a.	Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sekaligus pengembangannya dengan pembangunan TPST	Kecamatan Harian	APBD	DLH, PUPR				

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	b.	Pembangunan dan atau penambahan TPS di seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten Samosir	Seluruh IKK	APBD	DLH, PUPR				
	c.	Pembangunan sarana IPAL pada pusat-pusat permukiman secara terpadu	Seluruh kecamatan	APBD	DLH, PUPR				
	d.	Penambahan Gerobak/truk Sampah	Seluruh IKK	APBD	DLH				
	e.	Pengembangan Sistem Daur Ulang Sampah yang berlokasi di TPA	Pangurusan	APBD	DLH				
	f.	Pengembangan Pengelolaan Limbah Bergerak	Seluruh IKK	APBD	DLH				
II.	PERWUJUDAN POLA RUANG								
2.1.	Perwujudan Kawasan Lindung								
	2.1.1.	Hutan Lindung							
	a.	Mempertegas batas-batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung	Kecamatan yang berpotensi	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	b.	Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung	Kecamatan yang berpotensi	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	c.	Identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukan sebagai Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan yang berpotensi	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	d.	Pelaksanaan penyepakatan (Pengantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan sebagai hutan lindung	Kecamatan yang berpotensi	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	e.	Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung	Kecamatan yang berpotensi	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	f.	Pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung	Kecamatan yang berpotensi	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	g.	Sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung	Kecamatan yang berpotensi	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	2.1.2.	Kawasan perlindungan setempat							
	a.	Memberikan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai	Seluruh kecamatan	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	b.	Mempertegas batas-batas dan Memberikan batasan fisik pada kawasan sempadan sungai	Seluruh kecamatan	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	c.	Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian	Seluruh kecamatan	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	d.	Identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai)	Seluruh kecamatan	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	e.	Rehabilitasi dan Pengerukan DAS	Seluruh kecamatan	APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	2.1.3.	Suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya							
	a.	Mempertegas batas-batas kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	Simanindo, Sianjur Mulamula	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	b.	Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan kawasan pelestarian dan cagar budaya	Simanindo, Sianjur Mulamula	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	c.	Identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	Simanindo, Sianjur Mulamula	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	d.	Pelaksanaan penyepakatan (pergantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan kawasan pelestarian alam dan	Simanindo, Sianjur Mulamula	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	e.	Pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	Simanindo, Sianjur Mulamula	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	f.	Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	Simanindo, Sianjur Mulamula	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
	g.	Sosialisasi perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya	Simanindo, Sianjur Mulamula	APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
2.2.	Perwujudan Kawasan Budidaya								
	2.2.1.	Hutan produksi							
	a.	Studi kelayakan dan desain pengembangan sentra industri pengolahan kayu	Kecamatan yang berpotensi	APBN, APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	b.	Pembangunan sentra industri pengolahan kayu	Kecamatan yang berpotensi	APBN, APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	c.	Penyusunan peraturan pelimpahan penguasaan dan atau memberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dari pemerintahan kecamatan terhadap pemerintah desa	Kecamatan yang berpotensi	APBN, APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	d.	Penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang program tebang-pilih dan tebang tanam	Kecamatan yang berpotensi	APBN, APBD Provsu	Dinas Kehutanan Provsu				
	2.2.2.	Kawasan pertanian							
	a.	Penyusunan Peraturan Daerah	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP dan Setdakab				
	b.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang pemberian kredit pinjaman bagi petani termasuk pertambangan	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP dan Setdakab				
	c.	Penyusunan Peraturan Daerah tentang harga pupuk, obat-obatan, dan bibit	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP				
	d.	Pembangunan sentra budidaya pertanian	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP				
	e.	Studi kelayakan pengembang sentra budidaya tanaman lahan kering, lahan basah, peternakan, dan perikanan	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP				
	f.	Pelaksanaan pembangunan sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman pertanian, peternakan, dan perikanan	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP				
	g.	Pembangunan saluran irigasi Tertier	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR dan Dinas KPP				
	h.	Revitalisasi saluran Irigasi Tertier	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR dan Dinas KPP				
	i.	Pelaksanaan pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP				
	2.2.3.	Peruntukan Perkebunan							
	a.	Identifikasi kawasan perkebunan yang masih potensial	Seluruh Wilayah	APBD	Dinas KPP				
	b.	Identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang ijin operasinya	Seluruh Wilayah	APBD	Dinas KPP				
	c.	Pengembangan tanaman tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan diatas 25%	Seluruh Wilayah	APBD	Dinas KPP				
	d.	Peningkatan produktifitas produksi perkebunan dan tanaman tahunan melalui intensifikasi lahan	Seluruh Wilayah	APBD	Dinas KPP				
	2.2.4.	Peternakan							

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	a.	Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau)	Kec. Ronggur Nihuta, Harian dan Palipi	APBD	Dinas KPP				
	b.	Pengembangan dan perlindungan ternak kambing putih spesies endemik wilayah Kabupaten Samosir	Kecamatan Harian	APBN dan APBD	Dinas KPP				
	2.2.5.	Perikanan							
	a.	Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KPP				
	b.	Pengembangan Kolam Darat	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KPP				
	c.	Pembangunan industri pengolahan perikanan	Pangururan	APBD, APBN	Dinas KPP; Dinas KOPUMKM				
	2.2.6.	Pertambangan							
	a.	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang ijin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan)	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG, Dinas PPTSP, Dinas PUTR, dan DLH				
	b.	Pembangunan sentra industri pertambangan dan bahan galian	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	c.	Studi kelayakan dan penataan pengembangan sentra industri pengolahan pertambangan dan galian	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	d.	Pembangunan industri pengolahan pertambangan	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	e.	Pembangunan sentra penyedia kebutuhan pertambangan	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	f.	Fasilitasi pertambangan dan galian	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	2.2.7.	Industri							
	a.	Penyusunan Rencana Pengembangan industri Pengolahan	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	b.	Pembangunan Agroindustri dan Industri Pengolahan	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	c.	Fasilitasi Pemanfaatan teknologi industri tepat guna	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	d.	Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	e.	Promosi investasi bagi Pengembangan Industri Agro	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas KOPUMKM NAKERPERINDAG				
	2.2.8.	Pariwisata							
	a.	Pengembangan Pemasaran dan Promosi Wisata	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar				
	b.	Pengembangan Infrastruktur pendukung pariwisata	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar				
	c.	Pengembangan objek pariwisata	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar				
	d.	Pembangunan pariwisata terpadu	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar				
	e.	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata secara terpadu	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar				
	2.2.9	Permukiman							
	a.	Pengembangan kegiatan permukiman kepadatan tinggi	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR				
	b.	Pengembangan kegiatan permukiman kepadatan sedang	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR				
	c.	Pengembangan kegiatan permukiman kepadatan rendah	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR				
	d.	Pembangunan kasiba dan lisiba	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR				
	e.	Pembangunan dan peningkatan fasilitas permukiman	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR				
	f.	Pembangunan dan peningkatan utilitas permukiman	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas PUTR				
III.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN								
3.1.	Pertumbuhan Ekonomi								
	a.	Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangurusan	Pangurusan	APBD	Dinas PUTR dan DLH				
	b.	Pengembangan kawasan agropolitan	Kecamatan Harian	APBD	Dinas KPP, Dinas PUTR, dan DLH				
3.2.	Sosial budaya								
	a.	Pengembangan Kawasan Pusat Cagar Budaya Pusuk Buhit	Kec. Sianjur Mula- mula	APBD	Dinas Budpar				

NO.	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	b.	Pengembangan Kawasan Wisata Alam Danau Toba	Seluruh kecamatan	APBD	Dinas Budpar				
3.3.	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup								
	a.	Pengembangan Kebun Raya Samosir yang terletak di Palilit Desa Tomok Kecamatan Simanindo seluas 100 Ha	Kec. Simanindo	APBD	Dinas KPP, DLH dan Dinas PUTR				
	b.	Pengembangan Arboretum Kawasan Aek Natonang seluas 105 Ha di Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo	Kec. Simanindo	APBD	Dinas KPP, DLH dan Dinas PUTR				
IV.	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN GEO AREA TAMAN BUMI - GEOPARK								
	a.	Penyusunan rancangan teknis (DED) pembangunan sarana pendukung (fasilitas umum) dan pemeliharaan pada seluruh lokasi Geo Site	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar, Dinas PUTR, dan DLH				
	b.	Pembangunan Fasilitas Umum, Pemeliharaan pada seluruh lokasi Geo site	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar, Dinas PUTR, dan DLH				
	c.	Pengembangan Daya Tarik Wisata berupa promosi dan atraksi budaya	Kecamatan yang berpotensi	APBD	Dinas Budpar, Dinas PUTR, dan DLH				
	d.	Pembangunan dan pembuatan mini museum Geopark pada lokasi-lokasi strategis	Kabupaten Samosir	APBD	Dinas Budpar, Dinas PUTR, dan DLH				
	e.	Pembangunan <i>wall of stone</i> pada lokasi perkantoran dan di tiap perkantoran milik pemerintah	Kabupaten Samosir	APBD	Dinas Budpar, Dinas PUTR, dan DLH				

BAB V

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini dilakukan untuk dapat memetakan permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada dokumen RPJPD ini perumusan permasalahan disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan identifikasi isu strategis untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang daerah Kabupaten Samosir di masa yang akan datang.

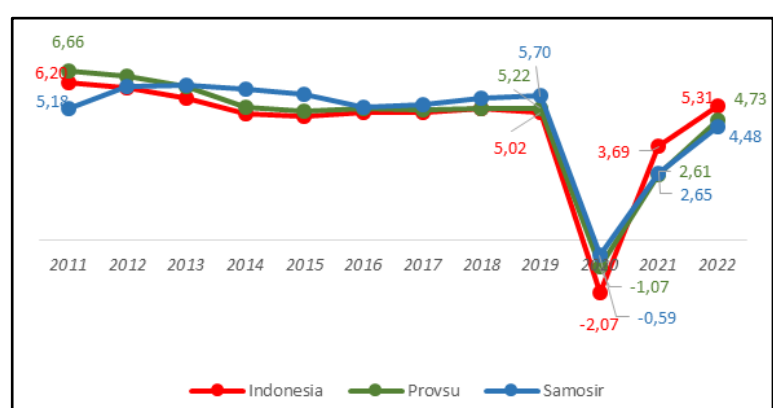
5.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Samosir

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Samosir yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi daerah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran pokok RPJPD.

5.1.1 Permasalahan berdasarkan Indikator Makro

1. Pertumbuhan Ekonomi yang belum pulih pasca *covid-19*

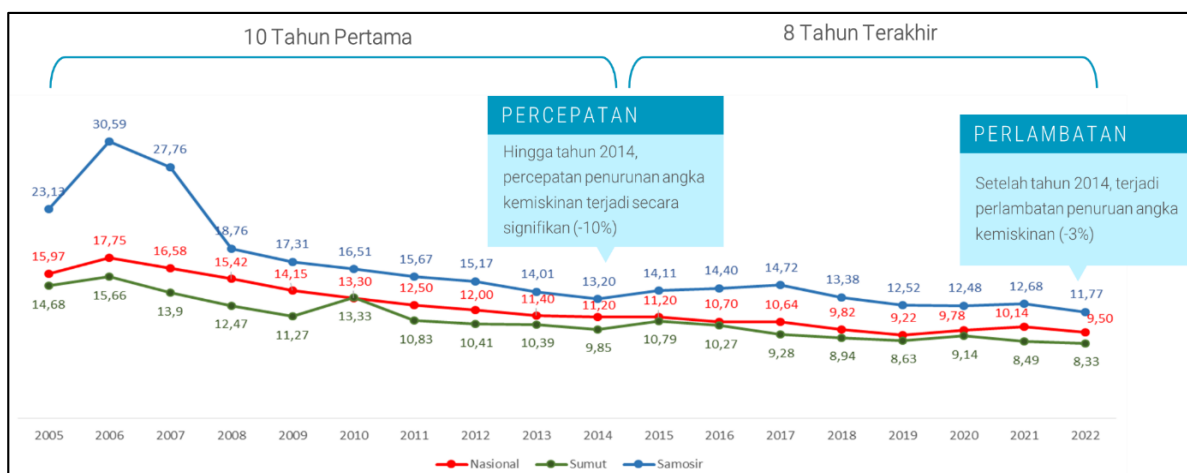
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir secara umum dapat dikategorikan baik pada level 5 persen dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2020 pada waktu pandemi *covid-19*. Hingga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir belum kembali pulih seperti sebelum *covid-19* (masih di level 4,48) berada di bawah level Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara.



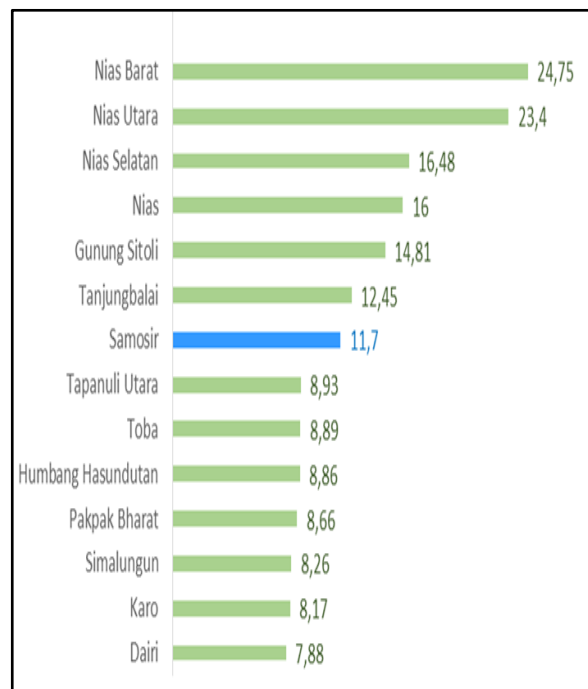
Gambar 5.1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provsu dan Kab. Samosir Tahun 2011-2022

2. Kemiskinan yang masih tinggi

Kemiskinan masih menjadi masalah utama bagi Kabupaten Samosir selama 20 tahun terakhir. Pada 10 tahun pertama hingga 2014 merupakan fase percepatan, dimana penurunan angka kemiskinan mengalami percepatan (berkurang sekitar 10% selama periode 10 tahun). Kemudian terjadi fase perlambatan penurunan kemiskinan selama 8 tahun terakhir, dimana hanya berkurang sekitar 3%. Hingga tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Samosir masih berada pada level 2 digit (11,77 persen) tertinggi diantara Kabupaten se-Kawasan Danau Toba dan urutan ke-7 tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.



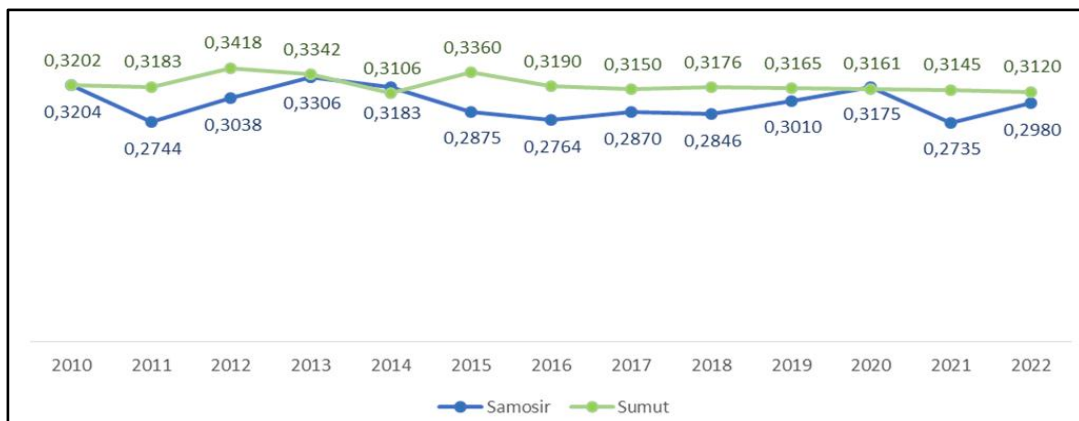
Gambar 5.2. Kemiskinan Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kab. Samosir Tahun 2005-2022



Gambar 5.3. Angka Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara dan se-Kawasan Danau Toba Tahun (Sumber: BPS Kab. Samosir 2023)

3. Ketimpangan

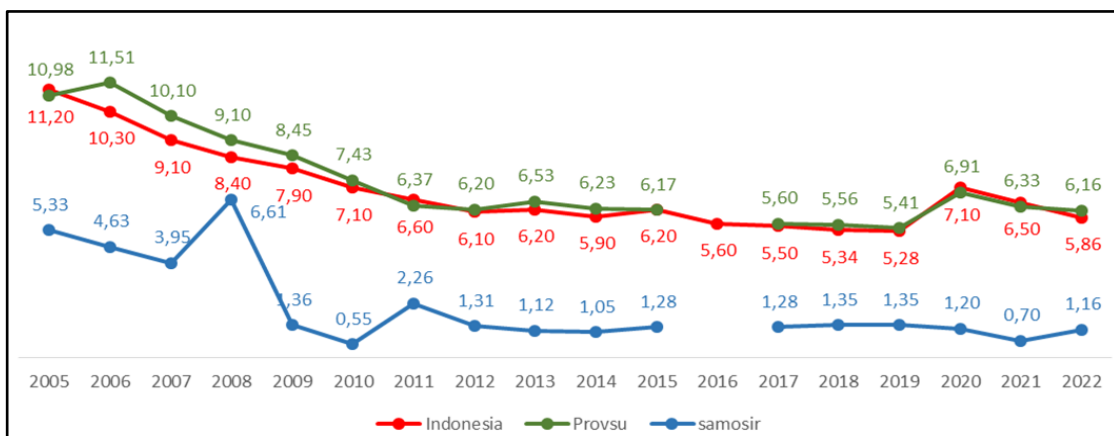
Ketimpangan Kabupaten Samosir cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2010 gini rasio Samosir 0,3204 dan 0,2980 pada tahun 2022. Hal ini berarti, ketimpangan Samosir hanya berkurang 0,0224 poin dalam kurun periode 13 tahun seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 5.4. Ketimpangan Provinsi Sumatera Utara dan Kab. Samosir Tahun 2010-2022 (Sumber : BPS Kab. Samosir 2023)

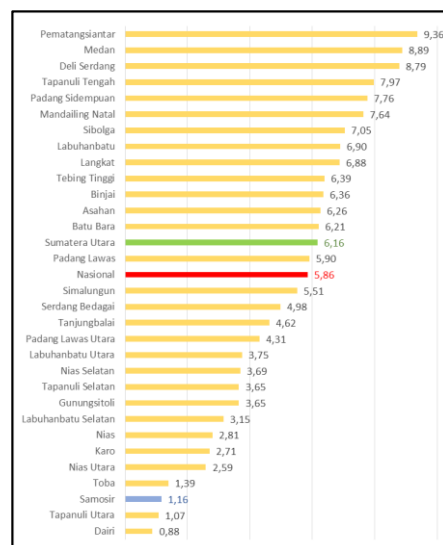
4. Pengangguran

Tingkat pengangguran Kabupaten Samosir berkurang secara signifikan pada periode 20 tahun terakhir dan selalu berada di bawah level pengangguran Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Namun, sejak 10 tahun terakhir, tingkat pengangguran masih stabil di level 1 persen.



Gambar 5.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kab. Samosir (Sumber : BPS Kab. Samosir 2023)

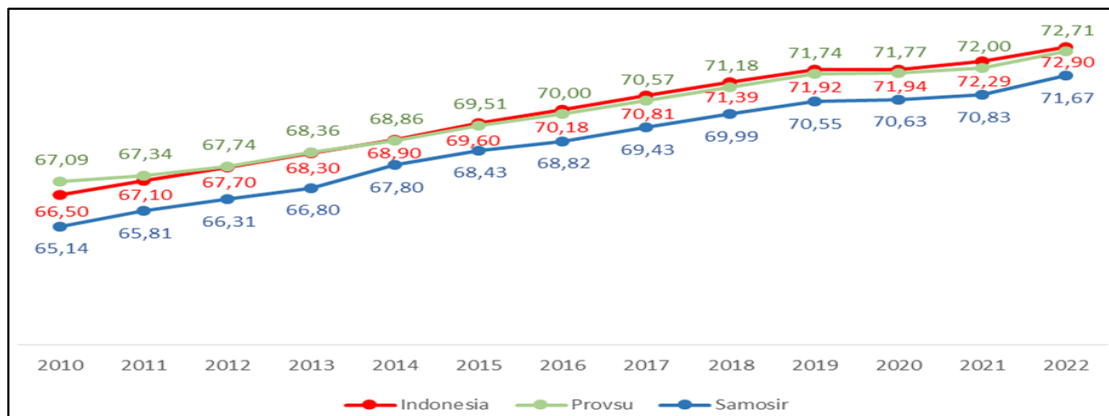
TPT Kabupaten Samosir termasuk yang terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu termasuk 3 terendah setelah Kabupaten Dairi dan Tapanuli Utara.



Gambar 5.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

5. Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 5.7. IPM dengan metode perhitungan baru yang resmi berlaku sejak tahun 2016

5.1.2 Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut menjadi modal bagi pembangunan daerah. Secara umum, permasalahan pokok bidang pendidikan di Kabupaten Samosir adalah rendahnya daya saing pendidikan, akibat rendahnya kualitas tenaga pendidikan, sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, minimnya pemanfaatan teknologi informatika dalam pembelajaran dan kurangnya fungsi dan peran kemitraan komite sekolah dalam pengembangan satuan pendidikan. Rendahnya kualitas tenaga pendidikan disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan, adanya guru yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipersyaratkan. Secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya daya saing pendidikan	Rendahnya kualitas tenaga pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap guru 2. Terdapat guru yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipersyaratkan 3. Terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal 4. Rendahnya kesejahteraan guru
	Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media pembelajaran tidak lengkap 2. Sulitnya memperoleh lahan untuk pembangunan gedung satuan pendidikan
	Minimnya pemanfaatan teknologi informatika dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya akses internet dalam satuan pendidikan 2. Kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan ti dalam pembelajaran
	Kurangnya fungsi dan peran kemitraan Komite Sekolah dalam pengembangan satuan pendidikan	Kurangnya pemahaman anggota Komite Sekolah terhadap fungsinya

2. Bidang Kesehatan

Secara umum permasalahan pokok bidang Kesehatan di Kabupaten Samosir adalah derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal, yang dipengaruhi oleh Kematian Ibu dan Bayi yang masih tinggi, tingginya angka kesakitan dan tingginya prevalensi stunting. Secara rinci permasalahan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Terdapat AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga 2. Kondisi budaya (patrilineal) 3. Rendahnya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan 4. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM 5. Karakter masyarakat 6. Rendahnya pendapatan keluarga
	Tingginya angka kesakitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya perilaku pola hidup sehat masyarakat 2. Rendahnya pendapatan keluarga 3. Rendahnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan 4. Rendahnya sarana dan prasarana kesehatan
	Tingginya Prevalensi Stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya perilaku pola hidup sehat 2. Rendahnya pendapatan keluarga 3. Rendahnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan 4. Rendahnya akses sanitasi dan air bersih 5. Paritas tinggi dan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, permasalahan pokok bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Samosir adalah belum optimalnya penerapan tata ruang dan belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum. Belum optimalnya penerapan tata ruang disebabkan oleh belum memadainya instrumen aturan yang ada. Sedangkan penyebab belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum adalah masih rendahnya kemantapan jalan, banyaknya jembatan kondisi rusak, kualitas permukiman rendah dan layanan irigasi yang belum optimal. Untuk lebih jelasnya, gambaran permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerapan tata ruang	Instrumen aturan belum memadai	Minimnya komitmen terkait penyediaan dokumen tata ruang
Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum	Kondisi jalan tidak mantap	Terbatasnya pemeliharaan jalan
		Sistem drainase jalan tidak memadai
	Tingginya harga satuan untuk membangun jalan	
Banyaknya jembatan dalam kondisi rusak	Banyaknya jembatan dalam kondisi rusak	Terbatasnya pemeliharaan jembatan
		Adanya kebutuhan akan jembatan baru di jalan kabupaten yang baru dibuka

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kualitas permukiman masih rendah	Rendahnya jumlah bangunan yang memiliki IMB
		Belum optimalnya pelayanan air bersih
		Belum optimalnya pengelolaan air limbah
		Kualitas jalan lingkungan masih rendah
	Belum optimalnya layanan irigasi	Kualitas jaringan irigasi rendah
		Ketersediaan air untuk Daerah Irigasi (DI) terbatas
		Organisasi/lembaga pengurus DI masih lemah
		Rendahnya riset dalam mencari dan mengembangkan alternatif sumber air yang baru

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara umum, permasalahan pokok bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir adalah belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas permukiman. Untuk lebih jelasnya, gambaran permasalahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum	Kualitas permukiman masih rendah	Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh
		Masih banyaknya rumah tidak layak huni

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu urusan wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah menjaga kekondusifan satu daerah dengan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Secara umum permasalahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah:

Tabel 5.5. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelanggaran Perda	Banyaknya masyarakat yang tidak menaati Perda	Pengetahuan masyarakat tentang Perda belum memadai
Fasilitasi Kepegawaian	Tidak adanya Petugas penyidikan perda atau PPNS	Tidak adanya keinginan untuk mematuhi Perda
		Tidak adanya PNS yang memenuhi syarat secara formil untuk mengikuti Diklat PPNS

6. Bidang Sosial

Masalah sosial adalah suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Umumnya, masalah ini berkaitan erat dengan nilai atau norma

yang berlaku di masyarakat. Jika dibiarkan saja tanpa usaha untuk membenahi, masalah sosial akan semakin rumit dan menimbulkan dampak buruk pada interaksi kelompok sosial. Adapun masalah yang sering muncul di masyarakat terkait dengan pelayanan sosial yaitu:

Tabel 5.6. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Samosir	Belum optimalnya penanganan terhadap PMKS/PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan Program Perlindungan/pemberdayaan Sosial 2. Tingginya angka PMKS 3. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan sosial
	Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pengendalian terhadap pemanfaatan bantuan 2. Kurangnya minat masyarakat terhadap pola pemberdayaan

5.1.3 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi nasional Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Samosir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 88,38 persen menurun menjadi 52,17 persen pada tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan pada Tahun 2022 sebesar 83,57.

Jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten samosir, peluang bidang lapangan usaha pertanian dan manufaktur menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Samosir, namun hal ini belum menjawab dan menuntaskan angka pengangguran di Kabupaten Samosir akibat rendahnya daya saing tenaga kerja di Samosir. Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya daya saing tenaga kerja	Rendahnya jiwa kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan masyarakat berwirausaha - Belum efektifnya sertifikasi tenaga kerja
	Minimnya kerjasama penyaluran tenaga kerja	Minimnya informasi kerjasama antara Dinas dengan Perusahaan (Tripartit)
	Rendahnya kompetensi tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sesuai kualitas tenaga kerja dengan pengembangan sektor pertanian dan wisata - Kurangnya SDM berupa tenaga pelatihan/instruktur - Kurangnya sarana dan prasarana balai latihan kerja (BLK)

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Kabupaten Samosir.

Sedangkan Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh-kembang anak.

Tabel 5.8. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Sarana publik belum responsif gender 2. Belum optimalnya penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
	Tingginya kasus kekerasan terhadap anak	1. Kondisi ekonomi keluarga yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari 2. Kurang optimalnya peran satgas ppa dalam pendampingan keluarga 3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak
	Belum optimalnya Kabupaten Layak Anak	1. Minimnya sarana dan prasarana publik yang ramah anak 2. Rendahnya kualitas dan kuantitas sdm

3. Bidang Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Untuk mengetahui keragaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) dimana skor PPH ideal adalah 100. Pada tahun 2022 skor PPH Kabupaten Samosir sebesar 82,1 yang menunjukkan pola konsumsi pangan di Kabupaten Samosir belum beragam. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan terbatasnya akses mendapatkan bahan pangan khususnya di daerah perbukitan. Masalah lainnya yang dapat mengganggu ketahanan pangan di Kabupaten Samosir adalah belum adanya kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi atau kelembagaan lainnya yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan menjaga stabilitas pangan di Samosir. Secara umum masalah pokok bidang pangan di Kabupaten Samosir dapat dijelaskan seperti tabel dibawah.

Tabel 5.9. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketahanan pangan	Distribusi pangan belum optimal	Terbatasnya akses mendapatkan bahan pangan
	belum optimalnya konsumsi pangan	Kurangnya pemahaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
	belum optimalnya stabilitas pangan	Kelembagaan ekonomi petani belum ada

4. Bidang Pertanian

Identifikasi masalah pada bidang pertanian bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagai kepastian dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Pada tahun 2022 luas lahan bersertifikat di Kabupaten Samosir masih sangat rendah yaitu 1,16% dari luas wilayah Kabupaten Samosir.

Tabel 5.10. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pertanian	Rendahnya tingkat sertifikasi kepemilikan tanah	Belum terdokumentasinya tanah adat dan tanah ulayat
	Tingginya sengketa tanah	Rendahnya kesadaran masyarakat meleagalkan kepemilikan tanahnya
	Tingginya sengketa tanah	Budaya masyarakat Samosir masih mengikuti tradisi pembagian tanah secara adat/keturunan
		Status kepemilikan tanah yang masih bersifat komunal

5. Bidang Lingkungan Hidup

Secara umum permasalahan terkait dengan lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.11. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas air yang sudah tercemar sedang	Pembuangan limbah cair yang dihasilkan masyarakat langsung dari drainase ke badan air
		Masih adanya aktivitas KJA
		Pembuangan septic tank yang tidak memadai
		Penggunaan pupuk/pestisida untuk pertanian ke drainase
	Pengelolaan sampah yang belum maksimal	Pengelolaan sampah domestik (sampah padat, limbah cair) yang tidak terkendali
		Fasilitas sampah/sarpras persampahan belum memadai
		Manajemen pengelolaan sampah belum memadai
		Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang
Adanya penurunan kuantitas dan kualitas air bersih	Adanya kerusakan hutan dan lahan	
	Berkurangnya tutupan lahan	
Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengolahan limbah belum optimal	Kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah
		Masih rendahnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah
	Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimalnya	Belum memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah
		Lemahnya penegakan hukum untuk pengendalian pencemaran
	Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	Adanya keterbatasan lahan untuk menyediakan IPAL
Belum efektifnya regulasi yang mewajibkan penyediaan IPAL domestik		
Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal	Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan	Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan limbah sebagai EBT
		Kurangnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pengolahan limbah
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT	Terbatasnya ketersediaan teknologi pengolahan limbah

6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa penduduk tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Samosir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Samosir sudah lebih baik, namun perlu peningkatan sehingga seluruh penduduk yang tinggal di Kabupaten Samosir maupun di perantauan terdaftar. Secara umum permasalahan yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dijelaskan seperti dalam tabel.

Tabel 5.12. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	Belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan dokumen kependudukan	1. Tidak adanya petugas registrasi kependudukan dalam melayani masyarakat desa
		2. Sarana dan prasarana pendukung pengurusan dokumen kependudukan belum sesuai standar pelayanan publik

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berfungsi sebagai sarana berorganisasi, berbagi informasi, penyaluran aspirasi serta peningkatan pengetahuan/kemampuan untuk masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan lingkungannya (RT/RW atau kelurahan). Jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Jumlah kelompok yang terlibat dalam LPM perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah (masyarakat) serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Permasalahan terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:

Tabel 5.13. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1. Kurangnya data pendukung untuk profil desa 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur desa 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
	Rendahnya kemandirian desa	Rendahnya kualitas perencanaan desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keberpihakan pemerintah desa terhadap pemberdayaan 2. Keterbatasan regulasi terhadap pengelolaan dana desa 3. Terbatasnya kualitas SDM yang menangani lembaga masyarakat desa 4. Kurang optimalnya pendampingan dalam hal penggalan potensi desa

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana (KB) yang diselenggarakan secara Nasional bertujuan untuk menganjurkan setiap keluarga memiliki 2 (dua) orang anak. Agar program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan, program penyuluhan KB hingga ke desa-desa harus semakin digiatkan. Secara umum permasalahan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah masih diperlukan peningkatan penyuluhan tentang keluarga berencana hingga ke daerah pedesaan.

Tabel 5.14. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengendalian penduduk	Tingginya jumlah PUS yang tidak ber-KB (<i>unmet need</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran PUS dalam ber-KB 2. Kondisi sosial budaya masyarakat yang bersifat patrilineal 3. Ketakutan PUS terhadap efek samping ber-KB 4. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam pentingnya ber-KB
	Belum optimalnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya pembinaan terhadap kader IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan) dalam program Bangga Kencana

9. Bidang Perhubungan

Pelayanan pemerintah daerah yang baik pada sektor perhubungan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan pada saat-saat tertentu. Untuk lebih jelasnya, gambaran permasalahan urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan angkutan umum di Kabupaten Samosir	Belum optimalnya pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Kondisi dermaga belum sesuai standar pelayanan minimal
		Belum tersedianya pedoman penyelenggaraan transportasi lokal (TATRALOK)
		Kualitas SDM masih rendah
		Belum terdapatnya manifes orang dan barang di pelabuhan yang menjadi kewenangan kabupaten
	Masih banyak kapal masyarakat yang belum terdaftar dan memiliki ijin usaha	
Belum optimalnya pelayanan angkutan darat	Belum optimalnya pelayanan angkutan darat	Belum tersedianya angkutan umum pedesaan
		Sarana dan prasarana penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor belum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terakreditasi
		Minimnya fasilitas keselamatan jalan
		Belum tersedianya pedoman penyelenggaraan transportasi lokal (TATRALOK)
		Kualitas SDM masih rendah
		Belum Tersedianya Tempat Parkir
		Belum tersedianya terminal yang sesuai standar

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Samosir dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 5.16. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan TIK di Kabupaten Samosir	Belum Optimalnya infrastruktur Jaringan Telekomunikasi	Topografi Kabupaten Samosir yang berbukit dan berlembah
		Struktur pemukiman Kabupaten Samosir tidak terpusat
	Belum tersedia Pusat Data	Infrastruktur pusat data belum tersedia
		Masih rendahnya kesadaran Perangkat Daerah terhadap fungsi Kominfo sebagai wali data
		Rendahnya kuantitas dan Kualitas SDM Statistik

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Peran Koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif di kabupaten Samosir belum optimal akibat adanya koperasi yang berkinerja rendah yang disebabkan oleh manajemen kelembagaan pengurus koperasi belum optimal, kurangnya pemahaman anggota tentang koperasi dan belum beragamnya aktivitas koperasi (cenderung simpan pinjam).

Sementara itu, kapasitas UMKM sebagai lembaga penggerak ekonomi kerakyatan saat ini belum optimal yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dan UMKM, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pengelola koperasi dan UMKM, rendahnya akses permodalan, belum adanya produk unggulan UMKM yang siap berkompetisi dan pengembangan sentra UKM pendukung wisata (kuliner, cenderamata, souvenir, dll) belum optimal.

Tabel 5.17. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kapasitas UMKM Sebagai lembaga penggerak ekonomi kerakyatan	Rendahnya kewirausahaan dan permodalan koperasi produk UMKM	Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dan UMKM
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pengelola koperasi dan UMKM
		Rendahnya akses permodalan
		Belum adanya produk unggulan UMKM yang siap berkompetisi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengembangan sentra UKM pendukung wisata (Kuliner, Cinderamata, Souvenir, dll)
	Masih minimnya produk UMKM yang terstandarisasi	Minimnya Sarana pendukung untuk standarisasi
	Profesionalitas UMKM dalam penyediaan Produk	Inkonsistensi produksi produk
	Kecilnya Wilayah Cakupan Pemasaran	Kurangnya akses pasar
Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi Produktif	Adanya koperasi yang berkinerja rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya manajemen kelembagaan pengurus koperasi - Kurangnya pemahaman anggota mengenai koperasi - Belum beragamnya aktivitas koperasi (cenderung di simpan pinjam)

12. Bidang Penanaman Modal

Dalam usaha peningkatan jumlah investor di Kabupaten Samosir terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu Rendahnya daya saing Kabupaten Samosir akibat keterbatasan lahan, belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif bagi investor di sektor yang kurang diminati/populer, promosi investasi berbasis IPRO masih terbatas serta lamanya tingkat pengembalian investasi.

Tabel 5.18. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya daya saing Kabupaten Samosir	Rendahnya daya tarik investasi Samosir	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan ketersediaan lahan - Tidak jelasnya kepastian hukum - Letak geografis Samosir (bukan daerah lintasan) - Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif bagi investor di sektor yang kurang diminati/populer - Lamanya tingkat pengembalian investasi - Promosi investasi berbasis IPRO masih terbatas - Belum optimalnya penggalan potensi investasi
	Rendahnya tingkat kepatuhan dalam pengurusan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur sosial budaya yang terlalu melekat - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 5.19. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya prestasi olahraga	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti olahraga berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya sarana prasarana olahraga di setiap kecamatan 2. Minimnya peran organisasi olahraga
	Kurangnya pelatih yang memiliki lisensi	Kurangnya pendidikan dan pelatihan terhadap pelatih sesuai dengan kompetensinya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya pemberdayaan kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya manajerial untuk mengurus peran dan fungsi kepemudaan 2. Banyaknya pemuda yang tidak aktif dan terlibat dalam organisasi kepemudaan 3. Belum optimalnya peran wadah organisasi kepemudaan 4. Belum maksimalnya pelatihan pemuda (pelopor, kewirausahaan dan pemimpin)

14. Bidang Statistik

Permasalahan pokok bidang statistik yaitu belum optimalnya penyediaan data statistik yang akurat dan bersinergis. Sedangkan masalah dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data.

Tabel 5.20. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyediaan data statistik yang akurat dan bersinergis	Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang siapnya data yang akan disampaikan 2. Adanya kendala/ hambatan dalam melakukan pembagian data (data sharing)

15. Bidang Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan juga merupakan sarana promosi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian budaya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya. Juga diperlukan sosialisasi atau seminar yang ditujukan kepada masyarakat agar menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Samosir. Berikut masalah pokok dalam bidang kebudayaan Kabupaten Samosir.

Tabel 5.21. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pemajuan Kebudayaan	Belum Optimalnya pelestarian Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Implementasi Kebudayaan Asli dalam kehidupan sehari-hari - Belum optimalnya penggalian objek pemajuan kebudayaan (10 objek) - Belum optimalnya tatakelola kelembagaan budaya dan adat
	Belum Optimalnya perlindungan Budaya	Belum optimalnya konservasi terhadap objek budaya
	Belum Optimalnya pemanfaatan Budaya	Belum optimalnya pengelolaan objek cagar budaya

16. Bidang Perpustakaan

Jumlah perpustakaan milik daerah dapat menunjukkan tingkat pelayanan kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat umum serta kelangsungan pelayanan pendidikan. Peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang berwawasan dan gemar membaca. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan pelayanan berupa perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, kapabilitas serta kualitas hidupnya.

Tabel 5.22. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya minat baca masyarakat	Sarana prasarana perpustakaan yang kurang memadai	Jumlah koleksi buku yang kurang
		Belum semua perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
		Kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan
	Kurangnya promosi budaya baca	Kurangnya kualitas dan kuantitas Pustakawan
		Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaan
		Kurangnya fungsi perpustakaan desa
	Kurangnya pemanfaatan media sosial	

17. Bidang Kearsipan

Ketersediaan arsip baku ini memudahkan untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap masing-masing PD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. SDM yang berkompeten di bidang kearsipan diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kabupaten Samosir. Selain dengan mencari SDM yang berkompeten, peningkatan kemampuan pengelolaan arsip juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pejabat pengelola kearsipan. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan arsip diharapkan dapat membuat pemerintahan tertib administrasi dalam hal kearsipan.

Tabel 5.23. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku	Rendahnya penerapan manajemen kearsipan di Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Sistem kearsipan berbasis digital belum terlaksana
		Belum tersedianya ruang Depo Arsip
		Belum tersedianya Arsiparis di setiap Perangkat Daerah

5.1.4 Urusan Pilihan

1. Bidang Pariwisata

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Samosir mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan, sebagian potensi tersebut berupa wisata alam dan agro. Akan tetapi dalam pengembangannya terdapat beberapa kendala antara lain belum optimalnya pengembangan Kepariwisataaan akibat minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata, belum optimalnya pemasaran pariwisata dan kualitas SDM sektor pariwisata masih rendah. Secara rinci masalah-masalah dalam bidang pariwisata di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.24. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan	Minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan moda transportasi menuju objek wisata - Rendahnya kualitas jalan menuju objek wisata - Kualitas akomodasi belum terstandarisasi
	Belum optimalnya pemasaran pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya fasilitasi pemasaran pariwisata - Belum beragamnya atraksi wisata - Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK dalam sektor pariwisata
	Kualitas SDM sektor pariwisata masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata - Belum adanya lembaga pelatihan keprofesian pariwisata - Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan

2. Bidang Pertanian dan Perikanan

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Samosir masih cukup tinggi, yaitu 53,86 kw/ha. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Samosir pada tahun 2022 adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu menyumbang 51.25% terhadap PDRB. Tingginya kontribusi pertanian terhadap PDRB masih belum sebanding dengan perbaikan taraf hidup petani. Secara rinci masalah-masalah dalam sektor pertanian di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.25. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Pertanian dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan pertanian	Rendahnya produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan	Rendahnya kualitas SDM Pertanian
		Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
		Sistem pertanian masih konvensional
		Kualitas lahan masih rendah
		Kelembagaan ekonomi petani belum ada
		Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian
	Belum optimalnya budidaya Perikanan	Rendahnya infrastruktur perikanan darat
		Rendahnya kualitas SDM Perikanan
		Rendahnya penerapan teknologi budidaya perikanan
		Kelembagaan ekonomi petani belum ada

3. Bidang Perdagangan

Kurangnya pengawasan terhadap ketersediaan barang di pasar menyebabkan tidak stabilnya harga barang pokok penting di Kabupaten Samosir. Hal ini terjadi karena kuantitas dan kualitas SDM bidang perdagangan masih rendah serta kurangnya sinergitas dalam pengawasan terhadap produk subsidi dan pengendalian harga pasar.

Tabel 5.26. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tidak stabilnya harga barang pokok penting	Kurangnya pengawasan terhadap ketersediaan barang di pasar	- Kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM bidang perdagangan - Kurangnya Sinergitas dalam Pengawasan terhadap Produk subsidi dan pengendalian harga pasar

4. Perindustrian

Daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Samosir masih rendah. Hal ini diakibatkan oleh IKM belum menerapkan standarisasi produk, belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri dan terbatasnya akses pasar produk IKM. Secara rinci masalah bidang perindustrian di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya daya saing Industri Kecil Menengah	Industri Kecil Menengah belum menerapkan standarisasi produk	Minimnya Sarana dan Prasarana Produksi
		Kurangnya dukungan Pemerintah daerah untuk mengajak pelaku IKM melakukan sertifikasi
	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri	Belum adanya kerjasama dengan Balai Diklat Industri Sumut dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di di sektor industri
		Terbatasnya kemampuan dan keterampilan pelaku industri
		Kurangnya pengawasan dan dukungan peralatan di sektor industri
	Terbatasnya akses pasar produk IKM	Kurangnya promosi dan jejaring produk IKM
		Belum tersedianya Pusat Jajanan Oleh-oleh khas Samosir
		Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan IKM dan produknya
		Ketidakpastian Potensi dan prospek Produk IKM di masa mendatang

5.1.5 Urusan Perangkat Penunjang

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui buku-buku rencana yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalkan) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut. Permasalahan pada urusan bidang perencanaan di Kabupaten Samosir antara lain sebagai berikut.

Tabel 5.28. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum	Belum sinergisnya perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan	Belum optimalnya sinkronisasi kebutuhan daerah dengan perencanaan
		Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
optimal	perangkat daerah	Belum optimalnya perencanaan terintegrasi antar sektor
		Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian perencanaan daerah
	Keterbatasan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan	Kurangnya kesadaran PD akan kebutuhan data/informasi
		Adanya perubahan data perencanaan akibat adanya pergantian peraturan
	Tidak adanya wadah untuk menyimpan data secara aman dan berkelanjutan di lingkup kabupaten	

2. Keuangan

Pada urusan keuangan, permasalahan pokok dan akar masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Samosir adalah:

1. Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi masih rendah.
2. Belum optimalnya tata kelola aset daerah

Tabel 5.29. Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah Urusan Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi masih rendah	Pengelolaan pajak daerah belum optimal	Belum sempurnanya database pajak daerah
		Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
		Belum tersedianya SDM bidang penilai pajak, pemeriksa pajak dan juru sita pajak
		Perencanaan dan Penganggaran belum berorientasi pada pendapatan pajak daerah
	Pengelolaan retribusi daerah belum optimal	Kurangnya pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah
		Sistem Pemungutan dan pelaporan belum didukung teknologi informasi
		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di objek objek retribusi
		Perencanaan dan Penganggaran belum berorientasi pada pendapatan retribusi daerah
Belum optimalnya tata kelola aset daerah	Adanya klaim dari berbagai pihak dalam kepemilikan aset	Belum optimalnya aset daerah yang dilegalisasi
		Belum optimalnya pengamanan terhadap aset daerah

3. Kepegawaian

Kabupaten Samosir telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan berbagai program kegiatan berupa **pelatihan dan pendidikan** yang dilakukan secara berkala, selain itu Kabupaten Samosir telah menerapkan Sistem Kepegawaian berbasis teknologi guna menunjang kinerja seluruh pegawai dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Samosir. Beberapa permasalahan pada urusan bidang kepegawaian di Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30. Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Bidang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola ASN	Belum optimalnya penerapan sistem merit	Kurangnya komitmen dalam melaksanakan sistim merit/NSPK
		Masih kuatnya politisasi birokrasi terhadap ASN

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Subjektivitas cukup tinggi
		Belum tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Minimnya perlindungan hukum terhadap ASN
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan ASN	Kurangnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pemenuhan kebutuhan ASN yang kurang
		Belum optimalnya penyusunan ANJAB, ABK, EVJAB
	Masih kurangnya penerapan digitalisasi manajemen ASN	Lambatnya pemanfaatan teknologi digitalisasi manajemen ASN Samosir

4. Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya pelaksanaan riset dan teknologi menjadi permasalahan pokok dalam urusan Penelitian dan Pengembangan *dimana alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan hanya xx persen dari total APBD tahun 2023*. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya SDM bidang riset dan teknologi dan kurangnya komitmen Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan fungsi kelembagaan riset dan teknologi belum optimal. Lebih rinci, permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah urusan Penelitian dan Pengembangan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.31. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan riset dan teknologi	Belum optimal fungsi kelembagaan riset dan teknologi	Belum tersedianya SDM bidang riset dan teknologi
		Kurangnya komitmen pemerintah daerah

5. Pengawasan

Untuk unsur Pengawasan Pemerintah, masalah pokok yang dihadapi adalah belum optimalnya pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang disebabkan oleh implementasi unsur maturitas SPIP yang belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.32. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah urusan Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir	Belum sepenuhnya unsur maturitas SPIP dimplementasikan	Kurangnya sinergitas PD dalam mengidentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
		Kurang optimalnya pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan PD
		Kualitas SDM kurang memadai

6. Sekretariat Dewan

Permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Sekretariat Dewan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.33. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Sekretariat Dewan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan penetapan peraturan daerah	Belum optimalnya layanan terhadap DPRD	Sarana dan prasarana yang kurang memadai

5.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajiannya, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis merupakan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir dalam 20 tahun ke depan.

5.2.1 Isu Strategis Internasional

Terdapat 10 Megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatrend global memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. Perkembangan demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Peningkatan urbanisasi dunia;
5. Konstelasi perdagangan global;
6. Tata kelola keuangan global;
7. Pertumbuhan kelas menengah atau middle class;
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
9. Perubahan iklim;
10. Pemanfaatan luar angkasa atau spesies ekonomi.

5.2.2 Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi (IPTEKIN)
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif tertinggal
8. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan

9. Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi
10. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
11. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
12. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik
13. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
14. Akses dan kualitas yang merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial dalam rangka mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045
15. Kualitas pendidikan yang masih rendah
16. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah
17. Regulasi yang berlebihan dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi baik di pusat maupun daerah
18. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif
19. Proses bisnis dan tata kelola urusan ke pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif
20. Belum terimplementasinya manajemen talenta
21. ASN masih berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik
22. Belum meratanya kualitas pelayanan publik
23. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat
24. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
25. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik.
26. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal
27. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan
28. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
29. Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan
30. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan
31. Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan
32. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat
33. Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
34. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya

35. Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara belum optimal
36. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara pembangunan nasional K/L, Daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang
37. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

5.2.3 Isu Strategis Kabupaten Samosir

Penetapan isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Samosir dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Penetapan isu strategis jangka panjang Kabupaten Samosir diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Permasalahan pembangunan Kabupaten Samosir;
2. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Samosir;
3. Isu strategis kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Samosir;
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Samosir antara lain bersumber dari Evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan RTRW Kabupaten Samosir;
 - b. Isu strategis yang diangkat dari hasil fakta dan analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Samosir untuk kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah;
 - c. Hasil evaluasi kinerja pembangunan yang belum dipenuhi RPJPD sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif;
2. Pembangunan Manusia yang berdaya saing;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan menuju 0 persen;
4. Tenaga kerja yang cerdas dan mandiri;
5. Industrialisasi dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
7. Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian;
8. Pembangunan infrastruktur masih jauh dibawah kebutuhan;
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;
10. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
11. Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.

Tabel 5.34. Keterkaitan Permasalahan Kabupaten Samosir dengan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Samosir

No	Masalah Pokok	Isu
1	Belum optimalnya pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir	Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif
2	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	
3	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	
4	Belum optimalnya tata kelola ASN	
5	Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	
6	Belum optimalnya tata kelola pertanahan	
7	Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku	
8	Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi masih rendah	
9	Belum optimalnya tata kelola aset daerah	
10	Rendahnya daya saing pendidikan	Pembangunan Manusia yang berdaya saing
11	Rendahnya prestasi olahraga	
12	Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	
13	Rendahnya minat baca masyarakat	
14	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	
15	Belum optimalnya pengendalian penduduk	
16	Belum optimalnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	
17	Belum optimalnya Pemajuan Kebudayaan	
18	Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Samosir	Percepatan pengentasan kemiskinan menuju 0 persen
19	Belum optimalnya Kapasitas UMKM Sebagai lembaga penggerak ekonomi kerakyatan	Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian
20	Belum optimalnya peran koperasi Sebagai lembaga ekonomi Produktif	
21	Rendahnya daya saing Industri Kecil Menengah	
22	Belum optimalnya daya saing tenaga kerja	Tenaga kerja yang cerdas dan mandiri
23	Rendahnya daya saing Kabupaten Samosir	
24	Belum optimalnya pengembangan pertanian	Industrialisasi dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
25	Belum optimalnya ketahanan pangan	
26	Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
27	Belum optimalnya penerapan tata ruang	Pembangunan infrastruktur masih jauh dibawah kebutuhan
28	Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum	
29	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	
30	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum di Kabupaten Samosir	
31	Belum optimalnya layanan TIK di Kabupaten Samosir	Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
32	Kualitas lingkungan hidup menurun	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan
		Pencemaran dan kerusakan lingkungan

BAB VI

VISI DAN MISI DAERAH

6.1 Visi

Visi Kabupaten Samosir dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Mempedomani rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 –2045 ditetapkan visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Dengan indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045.

Sedangkan visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2045 ditambah lagi.....

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan mempedomani RPJPN 2025 – 2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2045 maka Pemerintah Kabupaten Samosir menetapkan visi Samosir Na Jogi 2045 yaitu:

“Samosir Berbudaya, Maju, dan Sejahtera”

Pernyataan visi pembangunan Kabupaten Samosir di atas memiliki makna:

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Samosir Berbudaya, Maju, dan Sejahtera	Samosir	Seluruh wilayah dan seluruh aspek yang ada di Kabupaten Samosir
	Berbudaya	1. Suatu keadaan dimana pemimpin, aparaturnya serta masyarakatnya mempunyai sikap jujur, amanah, berakhlak dan memiliki perilaku terpuji. Selain itu juga supremasi hukum dan disiplin ditegakkan, serta adanya keterbukaan informasi. 2. Dalam bidang kebudayaan diharapkan Kabupaten Samosir menjadi pusat pengembangan kebudayaan religius dan Adat Istiadat
	Maju	1. Suatu kondisi fisik dan non fisik yang unggul dan daerah yang maju serta daerah yang berkembang di Kawasan Danau Toba serta berdaya saing,

		berperadaban, profesional, serta berwawasan ke depan yang luas. Pembangunan diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama yang sinergis dan kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. 2. Kondisi lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah, limbah dan polusi, serta berkurangnya bencana alam, kondisi sumberdaya alam yang asri dan terjaga.
	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok dan terjangkau harganya. Semua kegiatan usaha berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan gratis untuk keluarga miskin sehingga masyarakat Kabupaten Samosir sehat jasmani dan rohani.

6.2 Misi

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok. Proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir melalui proses seperti dibawah ini

Tabel 6.1 Perumusan Misi RPJPD

Masalah pokok	Misi
Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	
Belum optimalnya penyediaan data statistik yang akurat dan bersinergis	
Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku	
Belum optimalnya tata kelola aset daerah	
Belum optimalnya tata kelola ASN	
Rendahnya maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir	
Tingginya harga tanah	
Belum optimalnya penerapan tata ruang	
Tingginya Pelanggaran Perda	
Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	
Tingginya sengketa tanah	
Belum optimalnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	Transformasi Pembangunan Manusia dan Perlindungan Sosial
Belum optimalnya pelaksanaan riset dan teknologi	
Fasilitasi Kepegawaian	
Rendahnya daya saing pendidikan	
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	
Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Samosir	

Masalah pokok	Misi
Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	
Tingginya kasus kekerasan terhadap anak	
Belum optimalnya Kabupaten Layak Anak	
Rendahnya prestasi olahraga	
Rendahnya minat baca masyarakat	
Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	
Belum optimalnya ketahanan pangan	
Belum optimalnya Pemajuan Kebudayaan	
Belum optimalnya pengendalian penduduk	
Belum optimalnya daya saing tenaga kerja	Transformasi Ekonomi yang berdaya saing
Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi masih rendah	
Belum optimalnya Kapasitas UMKM Sebagai lembaga penggerak ekonomi kerakyatan	
Belum optimalnya peran koperasi Sebagai lembaga ekonomi Produktif	
Rendahnya daya saing investasi Kabupaten Samosir	
Belum optimalnya pengembangan pertanian	
Tidak stabilnya harga barang pokok penting	
Rendahnya daya saing Industri Kecil Menengah	
Belum optimalnya daya saing tenaga kerja	
Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum	Sarana dan prasarana yang merata dan lingkungan hidup yang berkualitas
Belum optimalnya pelayanan angkutan umum di Kabupaten Samosir	
Belum optimalnya layanan TIK di Kabupaten Samosir	
Belum optimalnya pengembangan dan Pemanfaatan Potensi kepariwisataan	
Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	
Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan	
Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	
Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal	

Sumber : Hasil analisis

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Samosir melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Samosir Tahun 2025 – 2045, sebagai berikut:

Misi I : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel berlandaskan pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja berkualitas dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset negara.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah,

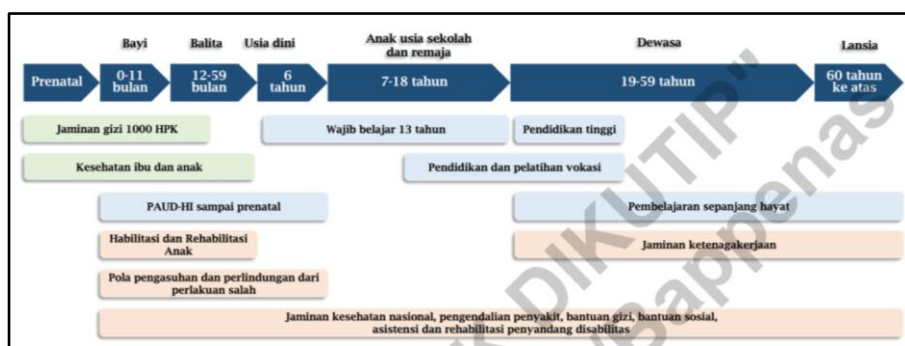
sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik, sehingga berpengaruh kepada peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Misi II : Transformasi Pembangunan Manusia dan Perlindungan Sosial

Pembangunan Kabupaten Samosir dalam 20 tahun kedepan akan menghadapi beberapa perubahan besar yaitu perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi perubahan iklim, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi pembangunan manusia dan perlindungan sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif dengan bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk:

1. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;
2. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan;
3. Membentuk sumber daya manusia yang melek ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
4. Membangun keluarga dan masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, status, dan gender; dan
5. Pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.



Sementara perlindungan sosial ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Kebijakan ini dilaksanakan melalui:

1. Penuntasan kemiskinan dan miskin ekstrim serta perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh;
2. Memperbaiki layanan jaminan kesehatan yang efektif;
3. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha;
4. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
5. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan *care economy*, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan;
6. Penguatan nilai adat dan budaya lokal di tengah masyarakat Kabupaten Samosir yang semakin heterogen dan pengaruh budaya luar.

Misi III : Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing

Pembangunan ekonomi Kabupaten Samosir selama 20 tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi. Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk berorientasi nilai tambah yang lebih tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan perekonomian menjadi lebih efisien dan produktif, sehingga memperkuat sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang.

Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Transformasi ini dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri pertanian, agrobisnis, pariwisata, perdagangan, penerapan ekonomi hijau, digitalisasi pertanian dan jasa, peningkatan produktivitas BUMD, UMKM dan Koperasi, BUMDES/BUMDES Bersama maupun konvensional, penerapan teknologi informasi serta peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih kompetitif dan mampu berkontribusi secara optimal dan didukung pembangunan infrastruktur. Untuk menggerakkan transformasi ini diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga. Untuk mendukung hal ini perlu adanya komitmen kebijakan yang tepat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari pemerintah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal.

Untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lintas generasi, diterapkan konsep ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan

menjamin ketersediaan sumber daya alam dalam jangka panjang. Untuk menunjang hal tersebut peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta transformasi digital harus dipercepat secara merata dan diarusutamakan dalam berbagai sektor ekonomi yang disertai dengan penguatan talenta digital. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi IV : Sarana dan Prasarana yang Merata dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan pembangunan yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan sarana dan prasarana yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat.

Misi ini difokuskan pada pertumbuhan wilayah di mana masyarakat mempunyai kesamaan terhadap semua aksesibilitas yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis diuntungkan oleh kedekatannya dengan pusat pertumbuhan ekonomi (ibu kota kecamatan) tetapi juga pada wilayah-wilayah pegunungan, kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah lingkaran luar Danau Toba dengan tetap mengedepankan dan memulihkan kondisi lingkungan yang bersih, bebas dari segala polusi terutama air Danau Toba yang menjadi satu satunya sumber air baku di Kabupaten Samosir, bebas dari sampah dan limbah yang dapat menurunkan kondisi, kualitas dan daya dukung lingkungan, melakukan mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi, menjaga kondisi dan keasrian sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat luas.

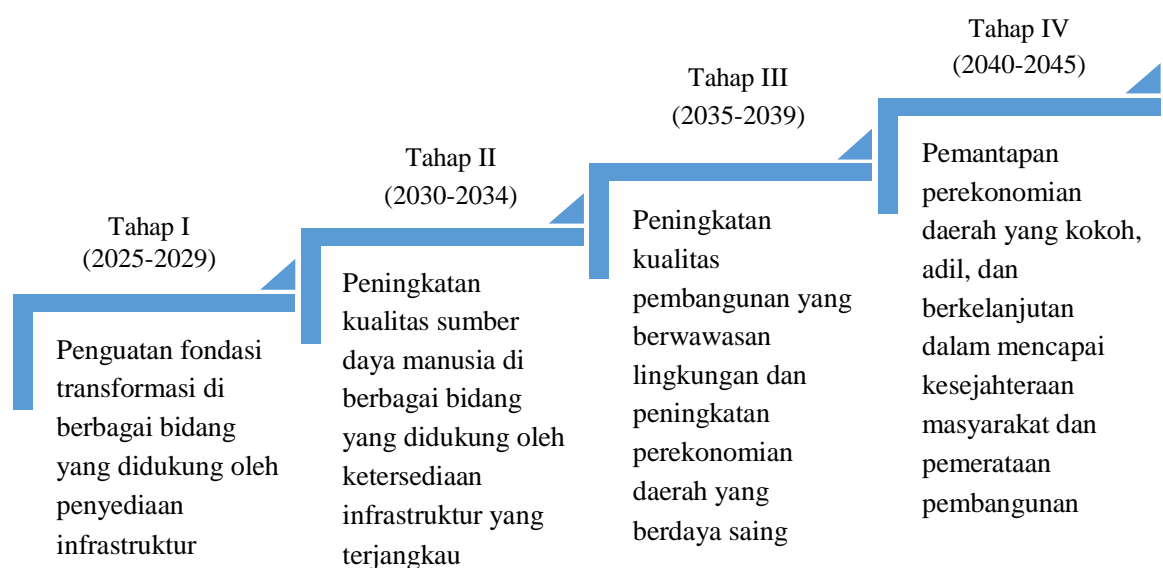
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

7.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya.

Pada lima tahun pertama, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir ditekankan pada penyediaan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Pada tahap kedua, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur yang terjangkau. Pada tahap ketiga, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir ditekankan pada peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh SDM berkualitas di berbagai bidang. Pada lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir ditekankan pada pemantapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Samosir dibagi ke dalam empat periode RPJMD yaitu periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III (2035-2039) dan periode IV (2040-2045).



7.2 Pentahapan Pembangunan

7.2.1 Periode I (2025-2029)

Periode I diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur. Pada kondisi ini, penguatan transformasi tata kelola pemerintahan dilakukan melalui perbaikan lembaga yang tepat fungsi, berkualitas, produktif serta inovatif. Kemudian optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja ASN yang handal berbasis merit serta kebijakan pembangunan berbasis bukti. penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan public yang transparan berbasis teknologi informasi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan melalui terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan non formal serta pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah). Selain itu, terwujud juga pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan khususnya terhadap masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada pelayanan Kesehatan dasar serta meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dan penyuluhan tentang gizi untuk menurunkan angka stunting. Pembangunan manusia diarahkan juga pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan kebutuhan pangan pokok, penurunan kemiskinan menuju 0 (nol) dan meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

Struktur perekonomian mulai tumbuh yang dipacu oleh tersedianya infrastruktur-infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian didukung oleh tersedianya infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan produksi Pangan maupun distribusi pertanian. Pengembangan pariwisata ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang meliputi akses dan akomodasi. Ketersediaan infrastruktur penunjang dan fasilitas pendukung juga diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa. Tersedianya fasilitas penunjang tersebut juga diarahkan agar dapat mendukung terciptanya koperasi IKM dan UKM di Kabupaten Samosir sebagai salah satu bentuk kegiatan perekonomian lokal.

Pembangunan diarahkan pada pemerataan dan berkeadilan. Adanya peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah atas. Pelayanan kesehatan sudah semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya akses pelayanan kesehatan khusus bagi penduduk miskin. Dari sarana dan prasarana dasar sudah semakin baik ditandai dengan adanya upaya pembangunan pemenuhan sarana air bersih, pengelolaan sampah serta air limbah. Kebersihan lingkungan sudah ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjangnya. Jalur transportasi dan aksesibilitas darat sudah dapat di akses selain jalur tele pangurusan yaitu jalur Outer Ring road Kabupaten Samosir sehingga dapat mempercepat distribusi produk pertanian, produk IKM/UMKM, bahan pangan dari dan keluar

kecamatan sitio-tio. Dan akses jalur by pass di kecamatan pangurusan dan kec. Simanindo sudah direncanakan.

Untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan penetapan lahan kritis dan yang menjadi sumber daya air sudah mulai dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan Lembaga dengan tujuan melakukan konservasi dalam air bersih dan air irigasi. Pemanfaatan energi matahari sebagai EBT sudah dimulai untuk irigasi pertanian dan dikembangkan untuk mengangkat air kebutuhan rumah tangga di dataran tinggi. Penguatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sudah mulai dilakukan.

7.2.2 Periode II (2030-2034)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Periode I, Periode II ditujukan untuk lebih memantapkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur yang terjangkau.

Pada kondisi ini, penguatan transformasi tata kelola pemerintahan dilakukan melalui perbaikan lembaga yang tepat fungsi, berkualitas, produktif serta inovatif. penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja ASN yang handal berbasis merit serta penerapan kebijakan manajemen resiko perencanaan dan pembangunan berbasis bukti, serta memaksimalkan teknologi dalam melakukan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus dalam pembangunan tahap ini ditandai dengan Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan kehadiran Pendidikan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Kualitas kesehatan semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat. Selain itu, peningkatan derajat kesehatan juga diarahkan pada penyelesaian masalah gizi buruk, stunting dan menggalakkan imunisasi. Pembangunan manusia diarahkan juga pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Adanya pemenuhan penyediaan kebutuhan pangan pokok khususnya bagi penduduk miskin dan pemenuhan penganekaragaman pangan. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat Kabupaten Samosir yang sejahtera sehingga tercipta kapasitas masyarakat yang kuat.

Struktur perekonomian mulai tumbuh yang dipacu oleh tersedianya infrastruktur–infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi hijau dan bioekonomi. Kegiatan pertanian ditunjang dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan infrastruktur, teknologi pertanian dan fasilitas penunjang kegiatan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi pertanian. Peningkatan juga terjadi pada pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengakses pasar lokal maupun domestik. Seiring dengan hal tersebut, munculnya IKM dan UKM yang didorong oleh pembinaan dan pembangunan SDM yang berkualitas serta peluang di sektor industry pariwisata dan pertanian. Pada sektor pariwisata meningkatnya infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata telah disertai dengan optimalnya pengelolaan daerah wisata. Desa-desa pun sudah mengambil peran

dalam memanfaatkan pariwisata menjadi salah satu sumber perekonomian yang baru disamping pertanian.

Pemerataan pembangunan yang berkadilang ditandai dengan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah atas. Selain itu terdapat juga peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ditandai dengan terkendalikannya Stunting dan gizi buruk. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal disetiap kecamatan. Hal ini juga sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Terbangunnya fasilitas pengelolaan air limbah terpadu yang diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas. Untuk aksesibilitas darat sudah semakin baik terutama akses darat menuju Kabupaten Samosir selain jalur tele pangurusan yaitu jalur Outer Ring Road Kabupaten Samosir sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa yang terisolasi selama ini, Seiring dengan pertumbuhan penduduk akses jalur bay-pass tomok dan by pass pangurusan sudah mulai dilakukan.

Untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan konservasi lahan kritis dan sumber daya air tetap dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan Lembaga sehingga sumber sumber air yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan perpipaan sudah dapat memanfaatkan sumber air yang berasal dari hasil konservasi hutan sehingga akses air bersih sudah diangka 80%. Dengan memanfaatkan energi baru terbarukan irigasi pertanian juga sudah semakin baik dan tetap dikembangkan untuk mengangkat air kebutuhan rumah tangga di dataran tinggi. Penguatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tetap dilakukan.

7.2.3 Periode III (2035-2039)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Periode II, Periode III ditujukan untuk lebih memantapkan pada peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang handal dan kompetitif serta inovatif. Penerapan kebijakan manajemen resiko perencanaan dan pembangunan berbasis bukti, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pelayanan publik sehingga waktu pelayanan administrasi semakin ringkas.

Kualitas sumber daya manusia semakin ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Akses dan pelayanan kesehatan masyarakat semakin ditingkatkan untuk mendukung penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas kesehatan berfokus pada penyelesaian masalah gizi dan pengentasan kasus stunting. Pembangunan manusia diarahkan juga pada

peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja berkualitas dengan minimal lulusan sekolah menengah dan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Keahlian dan keterampilan tenaga kerja sudah terspesialisasi dengan kualitas spesifik untuk suatu pasar tertentu. Kebutuhan pangan lokal yang beragam, bergizi, dan seimbang mulai terpenuhi. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat merupakan capaian untuk menghasilkan masyarakat sipil yang mandiri dan sejahtera.

Struktur perekonomian mulai tumbuh dan berdaya saing yang ditandai dengan munculnya berbagai spesialisasi atau klaster – klaster pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah. Klaster – klaster perekonomian yang tumbuh berbasiskan pada sumber daya lokal yang dikembangkan secara partisipatif oleh masyarakat yang bekerjasama dengan aktor – aktor lain baik pemerintah maupun swasta. Masyarakat sebagai pelaku utama penggerak perekonomian sudah memiliki keahlian yang terspesialisasi dalam mengembangkan sektor – sektor ekonomi. Sektor pertanian diarahkan untuk peningkatan hasil produksi dari segi kualitas dan mengedepankan ciri khas produk dengan - penguatan *smart farming* berbasis ekonomi hijau dan bioekonomi . IKM dan UKM yang menunjang kegiatan produksi berkembang yang didukung oleh akses pemodal dan inkubasi dalam rangka menciptakan IKM dan UKM yang mandiri dan berdaya saing. Disamping pemantapan pengelolaan objek wisata unggulan Sektor pariwisata juga diarahkan untuk eksplorasi dan pengembangan potensi – potensi wisata baru. Sejalan dengan berkembangnya sektor – sektor ekonomi tersebut, dalam rangka meningkatkan daya saing, kebijakan pemasaran diarahkan pada perluasan pasar untuk produk – produk unggulan yang ditandai dengan tersedianya regulasi yang mendorong peluang pasar lokal dan domestik hingga ekspor. Dalam rangka mendukung perekonomian kemasyarakatan, diarahkan juga pada pengembangan dan penguatan lembaga perekonomian masyarakat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pengembangan ekonomi.

Pembangunan diarahkan pada prinsip pemerataan dan berkeadilan ditandai dengan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal. Selain itu terdapat juga peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ditandai dengan terkendalikannya Stunting dan gizi buruk. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal disetiap kecamatan. Hal ini juga sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Terbangunnya fasilitas pengelolaan air limbah terpadu yang diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas. Untuk aksesibilitas darat dan danau sudah semakin baik di semua wilayah terutama akses darat menuju Kabupaten Samosir selain jalur tele Pangururan yaitu jalur Outer Ring Road Kabupaten Samosir begitu juga dengan by-pass Tomok dan by-pass Pangururan sudah dibangun. Ketersediaan

rumah layak huni yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang semakin. Adanya inisiasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan. Adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang ditandai dengan tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan. Akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi semakin meningkat. Konektivitas dan akses antar wilayah diperbaiki melalui pembangunan jalan baru, pengembangan terminal, serta pengembangan sistem angkutan massal. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara terpadu sudah terpenuhi. Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah domestik ramah lingkungan. Dilakukan juga pengembangan drainase berwawasan lingkungan (*ecodrain*) di kawasan strategis perkotaan serta kawasan padat penduduk. Pengelolaan irigasi sudah terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian. Sementara itu, pengembangan perdesaan diarahkan pada desa mandiri yang ditandai dengan peningkatan keberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan pemerataan pembangunan, mulai diinisiasi juga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan manula.

Daya dukung dan kualitas lingkungan diarahkan pada penetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan – kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan ditandai dengan adanya peningkatan penanganan untuk menetralsir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi terhadap danau Toba. Resiko bencana sudah mulai berkurang dengan optimalnya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang sudah terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan. Penyimpangan pemanfaatan ruang semakin diminimalisir melalui penguatan sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7.2.4 Periode IV (2040-2045)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Periode III, Periode IV ditekankan pada pemantapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang terintegrasi dan adaptif. Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan efektifnya sistem pelayanan berbasis teknologi yang sudah terintegrasi.

Kualitas sumber daya manusia semakin meningkat ditandai dengan adanya perbaikan pendidikan dan fokus pada pengembangan pelatihan vokasi yang mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja. Akses dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah merata ditandai dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat serta berkurangnya angka kematian ibu dan anak dan berkurangnya gizi buruk dan stunting. Pengembangan kesehatan fokus pada pengembangan balita melalui investasi pada nutrisi anak dan pengembangan pendidikan pra sekolah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang siap berkompetisi pada era ekonomi digital. Adanya peningkatan kualitas tenaga kerja berdaya saing global ditandai dengan tenaga kerja terqualifikasi tidak hanya dari lulusan menengah atas tetapi juga tersertifikasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuni. Keahlian dan keterampilan tenaga kerja sudah fleksibel dan

mampu mengikuti pergeseran permintaan pasar. Memiliki tenaga kerja terampil dengan keahlian spesifik, tersertifikasi, dan inovatif. Adanya peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan yang difasilitasi tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga penyedia lapangan kerja. Pada akhirnya, tercipta kesejahteraan pekerja di berbagai lapangan usaha yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Kebutuhan pangan lokal sudah terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan ditandai dengan termanfaatkannya bahan baku lokal untuk produksi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Terdapat peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Tercipta lingkungan yang aman bagi perempuan, anak, dan lansia. Pada akhirnya, tercipta masyarakat yang sejahtera ditandai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya rata – rata pendapatan masyarakat.

Struktur perekonomian semakin kokoh yang ditandai dengan terdiversifikasinya sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang pembangunan. Diversifikasi ekonomi tidak hanya pada pengembangan berbagai produk unggulan dalam satu sektor namun juga tercipta keterpaduan antara sektor pertanian, industri, dan jasa. Diversifikasi ekonomi didasarkan pada capaian kondisi ekonomi yang telah berdaya saing pada tahapan sebelumnya sehingga meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup. Keahlian dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan sektor ekonomi sudah terspesialisasi dan semakin fleksibel dalam menciptakan inovasi. Produksi dan kualitas sektor pertanian sudah meningkat ditandai dengan adanya pengolahan limbah secara terpadu. Perkembangan pertanian diarahkan pada pengembangan agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian. IKM dan UKM yang berkembang sudah mandiri dan berdaya saing serta mampu menstimulus pengembangan dan penciptaan IKM serta UKM baru sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Pangsa pasar produk – produk unggulan semakin berkembang yang ditandai dengan terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital. Sementara pengembangan sektor pariwisata semakin diperkuat dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan berkembangnya wirausaha – wirausaha pendukung kepariwisataan berbasis masyarakat (*community based tourism enterprises*). Perwujudan struktur perekonomian yang kokoh juga ditandai dengan telah berkembangnya lembaga perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan memberikan manfaat serta nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian. Investasi semakin meningkat dan sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah yang dikembangkan. Ekonomi kreatif yang fokus pada seni dikembangkan ditandai dengan optimalnya kerjasama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas.

Daya dukung dan kualitas lingkungan semakin baik dengan optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup, optimalnya pengendalian penataan ruang, serta optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian dan kontrol terhadap pencemaran lingkungan sudah optimal ditandai dengan meningkatnya kualitas air, udara, dan tanah. Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditandai dengan semakin

baiknya sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adanya peningkatan akses dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman sudah mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah sekitar RTH.

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, telah dilakukan pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana. Kebutuhan perumahan layak huni sudah terpenuhi yang dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Termanfaatkannya penggunaan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan pertanian. Adanya peningkatan akses pelayanan pendidikan ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan ditandai dengan meratanya layanan kesehatan yang ditunjang oleh tenaga kesehatan handal hingga ke wilayah terpencil. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tersedia infrastruktur non fisik berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu menciptakan ekosistem yang baik antara *network*, *device*, dan *application*. Keterhubungan dan koneksi antar wilayah semakin baik ditandai dengan pengembangan transportasi sudah terintegrasi dan terpadu. Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu secara merata di berbagai wilayah. Pengelolaan sampah sudah efektif dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan. Terpeliharanya fasilitas pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terpadu dan ramah lingkungan. Pemantapan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan (*ecodrain*) yang terpadu di kawasan strategis perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman sudah semakin mantap guna mengendalikan pencemaran Danau Toba. Pemantapan pengelolaan irigasi terpadu dalam rangka meningkatkan cakupan ketersediaan air untuk kawasan pertanian.

7.3. Sasaran Pokok Daerah

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode pembangunan tahun ke - 20 (dua puluh). Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing - masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok menjelaskan keterhubungan dengan visi/misi yang menunjukkan indikator kinerja beserta target masing - masing.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir 2025-2045

VISI	Misi	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
			PERIODE RPJMD I	PERIODE RPJMD II	PERIODE RPJMD III	PERIODE RPJMD IV
Samosir Berbudaya, Maju dan Sejahtera	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi	Kelembagaan Yang kolaboratif	kelembagaan yang adaptif	Kelembagaan yang tepat fungsi
			Peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti	Peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti	kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti	kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti
			penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
			Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Pemantapan pemanfaatan pelayanan publik berbasis teknologi	pelayanan publik ringkas dan efisien berbasis teknologi	pelayanan publik ringkas dan efisien berbasis teknologi
	Transformasi Pembangunan Manusia dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya kualitas SDM	penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan Pembangunan SDM untuk membentuk manusia produktif	Penguatan Pembangunan Manusia dan percepatan pembangunan SDM berkualitas	penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya maju, sejahtera, adaptif, unggul, dan berdaya saing
			Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	Peningkatan Layanan Kesehatan, penyuluhan tentang gizi dan imunisasi untuk mencegah stunting serta menciptakan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal	Pemenuhan saran dan prasarakan kesehatan dan pendidikan seiring dengan penambahan penduduk	Pemenuhan dan Penguatan sarana dan prasarakan kesehatan dan pendidikan seiring dengan penambahan penduduk

VISI	Misi	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
			PERIODE RPJMD I	PERIODE RPJMD II	PERIODE RPJMD III	PERIODE RPJMD IV
			Penerapan Nilai adat dan budaya sebagai modal pembentukan nilai-nilai sosial ditengah masyarakat	optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat	Memaksimalkan Peran adat, budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat	perwujudan sumber daya manusia yang berbudaya maju, sejahtera, adaptif, unggul, dan berdaya saing.
			Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak			
			peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana	penguatan kapasitas masyarakat sipil	penguatan kapasitas masyarakat sipil	
			Menurunkan Angka Kemiskinan menuju 9,2	Menurunkan Angka Kemiskinan menuju 8,0	Menurunkan Angka Kemiskinan menuju 7,2	Menurunkan Angka Kemiskinan menuju 6,2
	Transformasi Ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan	Penguatan sentra produksi pangan dan upaya proses hilirisasi produksi pertanian	optimalisasi produktivitas pertanian dan penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi serta percepatan peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian	penguatan smart farming berbasis ekonomi hijau dan bioekonomi	perwujudan Samosir sebagai sentra pertanian organik di Sumatera Utara
			Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata	percepatan pengembangan dan pengelolaan objek wisata unggulan	pemantapan pengelolaan objek wisata unggulan dan pengembangan Desa berpotensi Wisata	perwujudan Samosir sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia

VISI	Misi	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
			PERIODE RPJMD I	PERIODE RPJMD II	PERIODE RPJMD III	PERIODE RPJMD IV
		Meningkatnya produktivitas daerah	peningkatan kapasitas tenaga kerja dan memprakarsai pertumbuhan kelembagaan koperasi, UMKM, dan IKM	Pengembangan kemitraan dan kewirausahaan koperasi, UMKM, dan IKM	Mewujudkan tenaga kerja yang kompetitif serta pemantapan kemitraan dan kewirausahaan koperasi, UMKM, dan IKM	Mewujudkan wirausaha baru, koperasi mandiri dan UMKM/IKM yang berdaya asing
	Sarana dan Prasarana yang merata dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi listrik) serta infrastruktur penunjang perekonomian	Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi listrik) serta infrastruktur penunjang perekonomian	pemantapan pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi listrik) serta infrastruktur penunjang perekonomian	pemantapan pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi listrik) serta infrastruktur penunjang perekonomian
peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi			lanjutan peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi	pemerataan aksesibilitas dan teknologi informasi		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		konservasi lahan kritis, kawasan sumber daya air, dan daerah rawan longsor dengan melibatkan peran masyarakat	keberlanjutan konservasi lahan kritis, kawasan sumber daya air, dan daerah rawan longsor dengan melibatkan peran masyarakat	keberlanjutan konservasi lahan kritis, kawasan sumber daya air, dan daerah rawan longsor dengan melibatkan peran masyarakat	keberlanjutan konservasi lahan kritis, kawasan sumber daya air, dan daerah rawan longsor dengan melibatkan peran masyarakat	keberlanjutan dan melestarikan konservasi lahan kritis dan sumber daya air dengan mengikutsertakan peran masyarakat
		pembentukan dan penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pelestarian dan keanekaragaman hayati	penegakan hukum lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan	penegakan hukum lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan	
		pembentukan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	penguatan sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	upaya penurunan penyimpangan pemanfaatan ruang	perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang	

VISI	Misi	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN			
			PERIODE RPJMD I	PERIODE RPJMD II	PERIODE RPJMD III	PERIODE RPJMD IV
			Terbangunnya sarana dan prasara pengelolaan sampah disetiap wilayah yang terintegrasi	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang yang terintegrasi sesuai dengan standar pelayanan minimal	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu	Pengelolaan sampah sudah efektif dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan
			transisi energi difokuskan pada transformasi EBT	Pemantapan transisi energi difokuskan pada transformasi EBT untuk pariwisata dan pertanian	Memaksimalkan Penggunaan energi difokuskan pada transformasi EBT untuk pariwisata dan pertanian	Memaksimalkan Penggunaan energi difokuskan pada transformasi EBT untuk pariwisata dan pertanian
			upaya pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan	lanjutan upaya pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan	transisi energi difokuskan pada transformasi Energi Baru dan Terbarukan	optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
			penguatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	penguatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	penguatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	penguatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Baseline Kabupaten Tahun 2022	Target	Target	Target	Target	Ket
				periode I (2025-2029)	periode II (2030-2034)	periode III (2035-2039)	periode IV (2040-2044)	
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Pelayanan Publik	2,86 (C)				
		2	Indeks SPBE					
		3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik					
		4	Indeks persepsi korupsi					
		5	Indeks Inovasi Daerah	46,64 (Inovatif)				
Transformasi Pembangunan Manusia dan Perlindungan Sosial	2. Meningkatnya kualitas SDM	6	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)					
		7	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)					
		8	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)					
		9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)					
		10	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					
		11	Jumlah kecamatan belum tereliminasi Malaria					
		12	Rata-rata nilai PISA (Membaca)					
		13	Rata-rata nilai PISA (Matematika)					
		14	Rata-rata nilai PISA (Sains)					
		15	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)					
		16	Harapan Lama Sekolah					
		17	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar (%)					
		18	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar (%)					
		19	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)					
				20	Tingkat Kemiskinan (%)	11,7		

Misi	Sasaran Pokok	Indikator		Baseline Kabupaten Tahun 2022	Target	Target	Target	Target	Ket
					periode I (2025-2029)	periode II (2030-2034)	periode III (2035-2039)	periode IV (2040-2044)	
	3. Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	21	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)						
		22	Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan (%)						
		23	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)						
		24	Indeks Pembangunan Manusia	71,67					
		25	Indeks pembangunan kualitas keluarga						
		26	Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)						
		27	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)						
		28	Indeks Ketimpangan Gender	0,27					
Transformasi Ekonomi yang berdaya saing	4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan	29	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)						
		30	Rasio PDRB Pariwisata (%)						
		31	Rasio PDRB Pertanian (%)						
		32	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)						
		33	Rasio kewirausahaan (%)						
		34	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)						
		35	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,16					
		36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan						
	37	Indeks Ketahanan Pangan							
	5. Meningkatkan produktivitas daerah	38	Indeks ekonomi hijau						
		39	Tingkat Inflasi						
40		Inklusi Keuangan (%)							
41		Total Kredit terhadap PDRB (%)							
Sarana dan Prasarana yang merata	6. Meningkatkan kualitas	42	Indeks ketahanan energi						
		43	Pemenuhan Kebutuhan Listrik per kapita (kWh)						

Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Baseline Kabupaten Tahun 2022	Target	Target	Target	Target	Ket
				periode I (2025-2029)	periode II (2030-2034)	periode III (2035-2039)	periode IV (2040-2044)	
dan lingkungan hidup yang berkualitas	infrastruktur berkelanjutan	44	Porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan (%)					
		45	Kapasitas Tampung Air (m3/Kapita)					
		46	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Bersih (%)	52,85%				
		47	Kemantapan Jalan Kabupaten dan Desa	55,79%				
		48	Luas Sawah yang Terairi	Na				
		49	Rumah Layak Huni					
		50	Akses sanitasi Aman (%)	52,85%				
	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	51	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,96				
		52	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)					
		53	Proporsi Kerugian Ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB (%)	0				
		54	Indeks Risiko Bencana (IRB)	114 (Sedang)				
		55	Indeks Ketahanan Daerah	0,26				
		56	Persentase penurunan Emisi GRK Tahunan (%)					

Sasaran pokok yang telah dipetakan untuk setiap misi pembangunan jangka panjang akan dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan untuk masing – masing sasaran pokok disajikan sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Misi	Sasaran Pokok	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik				
2. Transformasi Pembangunan Manusia dan Perlindungan Sosial	2. Meningkatnya kualitas SDM				
	3. Menguatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju				
3. Transformasi Ekonomi yang berdaya saing	4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan				
	5. Meningkatnya produktivitas daerah				
4. Sarana dan Prasarana yang merata dan lingkungan hidup yang berkualitas	6. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan				
	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				

7.3.1 Penyesuaian Target Sasaran Pokok dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sinergi TPB di Kabupaten Samosir tergambar dalam visi yang diusung dalam pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 , yakni “**Samosir berbudaya, maju dan sejahtera**”. Selanjutnya, perwujudan visi dilaksanakan dalam 4 (Empat) misi pembangunan beserta masing-masing sasaran pokoknya. Setiap misi dalam pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 di Kabupaten Samosir telah mengakomodir 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pada tabel di bawah ini.

Sinergi TPB dengan Misi Kabupaten Samosir

No	Misi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
1	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	1. TPB 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
2	Transformasi Pembangunan Manusia dan Perlindungan Sosial	1. TPB 1. Tanpa Kemiskinan; 2. TPB 2. Tanpa Kelaparan 3. TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB 4. Pendidikan Berkualitas 4. TPB 5. Kesenjangan Gender 5. TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 6. TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 7. TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 8. TPB 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
3	Transformasi Ekonomi yang berdaya saing	1. TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 2. TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan
4	Sarana dan Prasarana yang merata dan lingkungan hidup yang berkualitas	1. TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak; 2. TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau; 3. TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 4. TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 5. TPB 15 Ekosistem Daratan

BAB VIII

PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 adalah sampai dengan Tahun 2045. Pada pelaksanaannya RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 harus di evaluasi sejalan dengan evaluasi periode RPJMD pada masa RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045. Sebelum RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 berakhir pada tahun 2045, maka pemerintah daerah Kabupaten Samosir harus menyusun rancangan awal RPJPD periode berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Tahun 2025-2045 berakhir. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode.

2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan pedoman pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2045. RPJPD Kabupaten Samosir 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Samosir. Perubahan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Samosir;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Samosir berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Samosir dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Samosir, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045.
4. Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Samosir sesuai dengan periode berkenaan.
5. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Samosir, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan, serta pendanaan.
6. Dalam pelaksanaannya, RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
8. Evaluasi Perubahan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan atau bersamaan evaluasi RPJMD Kabupaten Samosir.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Samosir 2045: **“Kabupaten Samosir Berbudaya, Maju dan Sejahtera”**